

AKTUAL

Edisi 28 | Tahun ke-2 | Desember 2014



#SAVE PERTAMINA!



Rp 30.000

ISSN 2337-8395





TAK BERBATAS WAKTU MENYIAR KABAR



Jokowi dan Pembunuh Naga

Ini kisah lama yang kadang masih didongengkan dari mulut ke mulut. Maklum namanya juga cerita rakyat.

Suatu kali di suatu kampung yang subur namun berpenduduk miskin, datang seorang pemuda. Dia tak terlihat segagah para ksatria yang pernah datang. Biasa saja. Malah amat bersahaja. Tapi sorot mata pemuda ini menunjukkan penuh percaya diri. Dia tak membekal pedang atau tombak, seperti puluhan ksatria sebelumnya. Yang dibawanya hanya sebatang tongkat dan seutas tali.

Pemuda ini pun tak bertanya arah jalan menuju istana naga tempat penguasa negeri subur yang memeras rakyatnya iyu. Dia juga tak bergegas memacu kuda dan menantang sang naga agar membebaskan negeri dari cengkeraman kemiskinan.

Pemuda itu malah berbaur di pasar dan membantu petani di ladang. Meski dia diterima baik, namun penduduk kampung mengamati tindak tanduknya dengan penuh tanda tanya. Apalagi selama berhari-hari menginap, pemuda itu selalu berpindah tempat menumpang, yang kian hari kian mendekati istana naga.

Dari bisik-bisik tetangga, penduduk tahu bahwa pemuda itu berkeinginan

pula membunuh sang naga. Begitu tiba waktunya, dengan dielu-elukan penduduk kampung, pemuda itu berangkat sendiri ke istana naga.

Penduduk tak berani mengantar hingga gerbang istana. Mereka hanya berdoa, agar pemuda ini selamat dan berhasil membunuh naga jahat itu. Apalagi selama ini tidak pernah ada seorang pun ksatria yang berhasil ke luar selamat dari istana naga.

Hari-hari berlalu tanpa ada tanda yang menunjukkan gerangan apa yang terjadi di istana. Sempat terdengar hingar bingar di istana, tapi tak ada yang mengisyaratkan keberadaan pemuda itu. Penduduk akhirnya hanya berbisik. Duh dia tewas pula dimangsa naga seperti para ksatria pendahulunya.

Sebulan telah berlalu. Suatu pagi, penduduk kampung terkejut. Gerbang istana mendadak dibuka. Mereka tercengang melihat sekumpulan naga kecil ke luar sambil mengusung berbagai peti harta karun. Naga-naga ini dipimpin pemuda itu.

Dia ternyata tidak tewas dimangsa Sang Naga. Dengan tongkat dan seutas talinya, pemuda itu menang tarung. Bukan hanya membunuhnya, bahkan dia berhasil merebut mahkota sang naga. Sehingga semua anak-anak naga pun takluk.

Pemuda itu membagikan harta berpeti-peti dan menyerahkan naga-naga kecil yang telah jinak diikatnya untuk dimanfaatkan penduduk membantu kerja di ladang. Dia

bertutur kepada tetua kampung, bahwa sang naga sebenarnya telah berkali-kali tewas dibunuh oleh beberapa ksatria.

“Namun mengapa sang ksatria pahlawan kami tidak kembali pulang? Mengapa sang naga yang telah mati itu selalu tetap ada dan hidup kembali?”

Pemuda itu mengungkapkan, setelah berhasil membunuh naga, dia sempat coba mengenakan mahkota sang naga. Mahkota indah penuh berlian permata itu ternyata pas di kepalanya. Dia merasa sangat gagah perkasa. Namun begitu melihat ke cermin, pemuda itu terkejut. Wajahnya tampak berangsur-angsur berubah. Mulutnya mulai menjorok maju bak moncong hewan. Rangkaian giginya mulai meruncing lengkap dengan taring tajam. Nafasnya pun kini ke luar dari hidung dan bersuara mendengus bagai naga.

Saking takut, pemuda itu mengaku, dia dengan kedua tangan yang gemetar segera mencopot dan melemparkan mahkota itu. Kini kepada tetua kampung itu, pemuda ini menyerahkan mahkota naga, seraya berpesan, “Hancurkan mahkota naga ini. Lebur semua emasnya. Jual permatanya, bagikan kepada semua penduduk.”

Bukan dongeng jika naga itu memang ada. Bukan dongeng pula jika naga itu bisa dikalahkan. Begitu pula dengan berbagai mafia. Termasuk juga kekuasaan politik. Jokowi engkalkah pemuda itu? ▀

AKTUAL

PENDIRI M Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Dhia Prekasha Yoedha
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Hanny Haniffa
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi

SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha, Eko Maryadi, Wahyu Romadhony

DIREKTUR MAJALAH Wahyu Romadhony
REDAKTUR Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto), Sukardjito
ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Saeful Anwar, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Ferro Maulana

STAF REDAKSI Soemitro, Dedy Kusnaedi, Moh Sahlan, Fadlan Syam Butho, Fitria Damayanti, Indra

Tjahya, Maulana Khamal Macharani, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Syahrul Saleh, Vina Fatma Sari, Nicha Muslimawati, Acep Nazmudin, Munzir (Foto), Junaidi (Foto), Warnoto (TV)

IT Radius Rasmangun, Yudi Astira
DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, WM Desangga

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Achmadi Parandangi (Makasar), Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Fajar Sodik (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Ikbal Kuku (Bandung), Joko Pramono (Lumajang Jatim).

PEMIMPIN PERUSAHAAN Febrianto
DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah
STAF KEUANGAN Zulkiffi
MANAGER SIRKULASI Widhi Maulana
MARKETING OFFICER Bobby Ciputra
PERSONALIA Nurlail Qadr

ALAMAT REDAKSI

PT Caprof Media Negeri
Cawang Kencana Building
1st Floor Suite 101
Jl. Mayjen Sutuyo Kav. 22 Cawang
DKI Jakarta 13630 Indonesia
No Telp : (021) 8005520
Fax : (021) 80886466
Email : majalah@aktual.co
iklan@aktual.co

aktual.co

aktualTV

Daftar Isi

Edisi 28 | Tahun ke-2 | November 2014

Laporan Utama

24 Hapus Subsidi Bonus Interpelasi

Prsiden berkilah, kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dari sektor konsumsi ke sektor produksi.



28 Jurus Sakti Buat Kartu Sakti

Sekadar informasi, Kartu Sakti itu adalah bagian dari program Government to Person (G2P).



32 Anatomi Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019

Menelusik latar belakang dan profil para anggota kabinet kerja Jokowi-JK sama sekali tidak mencerminkan jiwa Trisakti.



12 POLITIK

Revisi 'Mental' Menyandera Jokowi



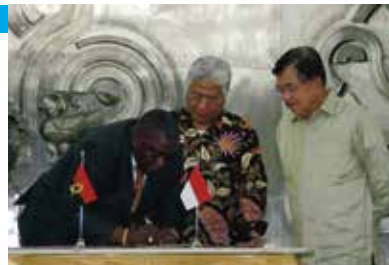
18 NASIONAL

Akankah Pertamina Menari di Lantai Bursa



46 ENERGI

Tanda Jadi Negara Kiri



56 HUKUM

Jaksa Agung Bisikian Sang Surya



58 EKONOMI

Efek Domino Kenaikan BBM



64 INTERNASIONAL

Diplomasi Jokowi di Pentas Global



67 INTERNASIONAL

Memicu "Perang Agama" di Jerusalem



- 3 Tatap Redaksi
- 5 Surat Pembaca
- 6 Kaki Hari
- 8 Kilas Nasional
- 10 Lensa Aktual
- 16 Kilas Politik
- 54 Kilas Energi
- 62 Kilas Ekonomi
- 68 Kilas Nusantara
- 70 Oase



Dapatkan Majalah Digital Aktual di:

aktual.co
TERHANGAT TERPERCAYA

Korupsi Alat Kesehatan Madiun Rp. 4,5 Milyar, Dipertanyakan Komet

Berkaitan dengan berita pertama dari koran Surabaya Pagi, kelompok Macan - Masyarakat Caruban, kabupaten Madiun mempertanyakan kelanjutan penyidikan dugaan korupsi alat kesehatan Rp 4,5M untuk Rumah Sakit Dolopo Madiun. Karena sejak tersangka batal diperiksa dengan alasan sakit itu, kasus ini sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi.

Kelompok Macan juga mempertanyakan, apakah memang kasus ini betul2 ada indikasi korupsi, atau hanya merupakan persaingan usaha dari para distributor alat kesehatan. Sebab awalnya kasus ini menjadi perhatian kejaksaan negeri Mejayan, Jawa Timur, karena adanya laporan dari dokter gigi David Andreas Mito yang merupakan salah satu distributor alat kesehatan di Jawa Timur.

Pertanyaan dari kelompok macan ini berkaitan dengan berita kedua dari koran Surya, yang menyebutkan juga, bahwa kejaksaan negeri Mejayan merasa terganjal oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan) Jawa Timur. Di mana, menurut kejaksaan negeri Mejayan, ada perbedaan pendapat mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam kasus ini

Untuk itu, kelompok macan juga berharap agar media massa bisa menyajikan berita yang lebih obyektif, dengan tujuan jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, maka sebaiknya segera diusut tuntas. Tapi, jika hal ini merupakan rekayasa dari pihak tertentu, yang bisa menyeytir pihak kejaksaan negeri Mejayan, kabupaten Madiun, untuk melakukan pendholiman, sehingga orang bisa dituduh dan dijadikan tersangka korupsi untuk menyingkirkan kompetitor dalam dunia usaha, tentunya siapa yang didholimi patut untuk dibela.

Apalagi dengan adanya fakta, bahwa saat ini Kasi Pidsus dan Kasi Intel kejaksaan negeri Mejayan yang menangani kasus ini mengajukan permohonan pindah tugas sebagai jaksa fungsional ke tempat lain. Kasi Pidsus, bapak Putu Sugiawan yang baru bertugas di kejaksaan negeri Mejayan, selama 4 bulan mengajukan diri untuk pindah sebagai jaksa fungsional ke Bali. Dan bapak Tedjo, kasi Intel yang belum setahun bertugas di kejaksaan negeri Mejayan, mengajukan diri pindah sebagai jaksa fungsional ke Bojonegoro. Ada apakah di balik kepindahan mereka dengan alasan pulang kampung itu? Apakah mereka dianggap tidak mampu oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan, sehingga dipaksa untuk mengajukan diri agar pindah tugas? Atau, dengan kemauan sendiri karena tidak tega untuk melakukan pendholiman?

Dwi Enggo Cahyono

Humas KOMET

Telepon 085215567277



Kolom Agama Langgar Konstitusi

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak menjadi persoalan substansi pada permasalahan kewarganegaraan. UU tidak mengatur secara spesifik pencantuman kolom agama pada dokumen kependudukan.

Pencatuman kolom agama pada KTP tentu saja merugikan para penganut aliran kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah. Yang penting negara hadir dan menjadi pelindung bagi setiap warga negaranya. Agama tidak butuh pengakuan negara.

Identitas agama justru seringkali menjadi pemicu persoalan di masyarakat. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama harus duduk bersama dalam menyelesaikan polemik kolom agama tersebut. Persoalan ini menjadi wilayah kerja dua kementerian.

Pengosongan harus benar-benar mengacu kepada konstitusi negara. Negara seharusnya tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam sendi-sendi agama. Agama tidak memerlukan pengakuan negara.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan dia sedang menunggu fatwa dari Menteri Agama terkait pengosongan kolom agama. Selain itu, Tjahjo juga akan minta pendapat dari tokoh-tokoh agama. "Pencantuman aliran kepercayaan ini telah menimbulkan pro-kontra sejak dulu," katanya di kantornya pada Jumat, 7 November 2014 lalu.

Ayub Manuel

Ketua Umum Pengurus Pusat

Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI)

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

Bhineka Tunggal Ika Suatu Konsep Dialog Keragaman Budaya

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam kesilaman. Dalam ungkapan Clifford Geertz (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru.

Nama Indonesia sebagai proyek 'nasionalisme politik' (political nationalism) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi, ia tidaklah muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah-air beserta elemen-elemen sosial-budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Sebagai proyek nasionalisme politik, Mohammad Hatta pernah mengatakan, "Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya" (Hatta, 1928/1998: 1).

Memang diperlukan pengerahan kemauan dan kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyatukan keluasan teritorial dan kebhinekaan sosio-kultural Indonesia ke dalam kesatuan entitas negara-bangsa. Sebuah negeri "untaian zamrud khatulistiwa", yang mengikat lebih dari lima ratus suku

bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sepanjang rangkaian tanah-air yang membentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 95°45' BT hingga 141°05' BT.

Secara geopolitik, Negara Republik

UNEP, 2003). Lautan menjadi faktor dominan. Dari 7,9 juta km² total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta km² merupakan wilayah laut teritorial dan 2,9 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan sisanya sekitar 1,8 juta km² merupakan daratan.

Dengan demikian, luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia.

Dengan panjang pantai 95.180,8 km, sementara panjang khatulistiwa 40.070 kilometer, maka panjang pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan Eropa, tampak jelas sifat kebaharian Indonesia.

Di atas peta Amerika Serikat, Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat sampai Laut Atlantik di timur; sementara di atas peta Eropa, Indonesia membentang dari London di barat sampai Laut Kaspia di timur. Luas Indonesia dengan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Bedanya, Indonesia terdiri atas ribuan pulau di sebuah wilayah laut yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan (Soemarwoto, 2004).

Di tengah-tengah sebaran kepulauan yang luas itu, alam



Indonesia, seperti pernah dikatakan oleh Soekarno, adalah "negara lautan" (archipelago) yang ditaburi oleh pulau-pulau, atau dalam sebutan umum dikenal sebagai "negara kepulauan".

Sebagai "negara kepulauan" terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau)—sekitar 6000 di antaranya berpenduduk (United Nations Environment Program,



Indonesia beraneka ragam; dari dataran aluvial seperti pantai utara pulau Jawa hingga ke pegunungan yang ditutupi salju abadi dan ratusan puncak gunung berapi dengan ketinggian beribu meter. Di antara lautan dan daratan itu, secara kultural, konsep kewilayahan Indonesia tidak membedakan penguasaan antara laut dan darat, oleh karenanya, bangsa Indonesia merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai tanah-air. Selain itu, meski alam Nusantara beraneka ragam—dari dataran pantai hingga pegunungan—namun tetap merupakan rangkaian dari gugus kepulauan yang pada masanya pernah menjadi bagian integral dari benua Asia dan Australia.

Menurut ekosistemnya, Hildred Geertz (1963) membagi corak kebudayaan Nusantara ke dalam tiga kategori: kebudayaan petani beririgasi, kebudayaan pantai yang diwarnai kebudayaan Islam, dan kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu.

Kebudayaan pertanian beririgasi berkembang di wilayah yang disebut Clifford Geertz (1963) sebagai “Indonesia dalam”, yang meliputi Jawa dan Bali. Kebudayaan ini ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur dengan menggunakan sistem pengairan dan sistem tanam padi di sawah yang bersifat padat karya di daerah yang paling padat penduduknya.

Kebudayaan pertanian ini secara kuat dipengaruhi oleh Hinduisme dan juga mendapatkan stimulus dari peradaban China, kemudian mengembangkan kebudayaan “adiluhung” di sekitar keraton

yang sangat berorientasi pada status. Kebudayaan ini mengalami pergeseran terutama sejak masuknya pengaruh Islam dan Barat-Kristen.

Kebudayaan pantai ditandai oleh kegiatan perdagangan yang secara kuat dipengaruhi oleh Islam. Kebudayaan tersebut tersebar di sepanjang pantai, terutama di wilayah “Indonesia luar”, seperti pantai Sumatra dan Kalimantan yang didukung oleh orang-orang Melayu dan pantai Sulawesi Selatan yang didukung oleh orang-orang Bugis-Makassar. Kebudayaan ini berorientasi pada perdagangan yang bersifat kosmopolitan, mengutamakan pengajaran dan hukum Islam, dan mengembangkan tarian, musik dan kesusasteraan sebagai unsur pemersatunya. Kebudayaan ini mengalami pergeseran setelah kekuatan-kekuatan Eropa menguasai daerah-daerah pesisir.

Kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu berkembang di atas sistem pencaharian perladangan, yang ditandai oleh jarang penduduk dan baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu ke pertanian. Kategori kebudayaan ini meliputi kebudayaan orang Toraja di Sulawesi Selatan, orang Dayak di pedalaman Kalimantan, orang Halmahera, suku-suku bangsa di pedalaman Pulau Seram, suku-suku bangsa di kepulauan Sunda Kecil, orang Gayo di Aceh, orang Rejang di Bengkulu, dan orang Pasemah di Sumatra Selatan.

Meski menunjukkan keragaman dan perubahan, sebagai dampak kehadiran aneka budaya dan peradaban besar dalam jangka

waktu panjang, baik yang hadir serentak maupun beruntun, yang kuat maupun yang lemah, Nusantara, dalam pandangan Dennis Lombard, masih mampu mempertahankan “keasliannya” yang mendalam. Hal ini antara lain mewujudkan dalam kenyataan bahwa nyaris semua bahasa yang kini digunakan di kawasan ini tergolong ke dalam satu kerabat bahasa Austronesia, yang dikenal sebagai bahasa Melayu-Polinesia.

Struktur-struktur bahasa lokal tak berubah meskipun kata-kata baru pinjaman dari bahasa-bahasa Indo-Eropa, Dravida, Semit, dan China tak terhitung banyaknya. Di luar dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia, di titik persilangan antarbenua dan antarsamudera, membuat kepulauan ini sejak lama menjadi kualitas penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia.

Tak heran, Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis, tempat unsur-unsur peradaban purba, tua, modern, dan pasca-modern bisa hadir secara simultan.

Singkat kata, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna (par excellence). Sungguh menakjubkan, bagaimana kemajemukan sosial, kultural dan teritorial ini bisa menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia? Apa pula prasyarat yang diperlukan untuk mempertahankan persatuan di tengah tekanan pluralitas nilai dan kepentingan? Tulisan ini akan mencoba memberikan pendekatan terhadap usaha untuk merekonsiliasikan antara keragaman dan persatuan Indonesia dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”. ■

Pollycarpus Bebas, Suciwati: Penegakan Hukum Busuk!



Suciwati Munir menegaskan bahwa kasus Munir saat ini menjadi tanggung jawab pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kami tidak pernah menyerah dalam menyuarkan keadilan, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintahan Jokowi," katanya kepada Aktual.co, Minggu (30/11) di kota Batu, Jawa Timur.

Keputusan dibebaskannya Pollycarpus merupakan bukti masih rendahnya sistem penegakan

hukum di tanah air. Sampai sekarang, kata Suci, aparat penegak hukum masih belum menyentuh sama sekali tersangka yang diduga sebagai otak intelektual pembunuh Munir. Padahal, lanjutnya, Hendropriyono (mantan Kepala BIN) mengakui dan siap bertanggung jawab penuh atas meninggalnya Munir.

"Buktinya sampai sekarang aparat tidak pernah memproses dan mengembangkan kasus itu, sistem yang busuk, petaka bagi masyarakat," tegas dia.

Lanjut Suci, masyarakat tidak diberikan ruang dalam menyuarkan keadilan. Apalagi, dalam kasus itu tersangka masuk dalam kategori pidana umum, bukan kejahatan kemanusiaan. Karena sejak awal, kasus yang menimpa mendiang suaminya itu sangat terstruktur. Dan, pelakunya lebih dari satu orang. / Ferro Maulana

Pukat UGM: Penunjukan HM Prasetyo Berbahaya

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menilai penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sangat berbahaya dan justru beresiko memperlakukan Joko Widodo.



Direktur Pukat UGM Zaenal Arifin Muchtar mengatakan bahwa posisi Jaksa Agung mestinya tidak diisi oleh orang yang memiliki latar belakang politik. Pasalnya, dalam proses penegakan hukum sangat diperlukan sosok yang memiliki preferensi intens pada keadilan.

"Kalau tiba-tiba jaksa agung berasal dari partai politik, dikhawatirkan akan muncul preferensi interest politik pada saat menangani perkara-perkara politik nantinya," kata dia, Jumat (21/11).

Hal ini diperkuat *track record* HM Prasetyo selama di kejaksaan dinilai minim gagasan, khususnya terkait

reformasi di tubuh kejaksaan, serta tidak memiliki prestasi apapun dalam hal penegakan hukum maupun pemberantasan kasus korupsi.

"Apalagi Prasetya ini adalah 'orang dalam' di kejaksaan sekaligus orang politik. Justru posisi seperti ini yang berbahaya," katanya.

Zaenal mempertanyakan janji Jakowi yang memilih Jaksa Agung bukan dari partai politik. Dia bingung dengan cara berpikir Jokowi dalam menentukan pilihan pada setiap pos jabatan.

"Saya bingung dengan Jokowi. Di satu sisi ia terlihat seperti sungguh-sungguh dalam melakukan upaya pembersihan dengan menunjuk Amien Sunaryadi sebagai kepala SKK Migas. Namun tiba-tiba memilih Prasetyo yang orang politik sebagai jaksa agung." / Karel Stefanus Ratulangi - Haadi Jatmika

Suwarjono dan Arfi Terpilih Sebagai Ketua AJI

Suwarjono dan Arfi terpilih sebagai ketua dan sekretaris jenderal Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dalam Kongres kesembilan organisasi itu di Hotel Grand Rocky, Bukit Tinggi, Minggu (30/11) dinihari.

Keduanya meraih suara 157 suara sedangkan rivalnya Abdul Manan dan Rinjani meraih 88 suara.

Pimpinan sidang pleno pemilihan tersebut terpaksa melakukan penghitungan suara ulang. Pasalnya, suara yang dihitung sah yaitu 245 suara. Namun, setelah pemilihan, kertas suara sebanyak 246 suara. Karena melebihi jumlah suara yang sah, maka dilakukan penghitungan suara ulang.

Hasil penghitungan suara menghantarkan duet Suwarjono dan Arfi memimpin organisasi itu ke depan. Usai pemilihan, kedua kandidat saling bersalaman dan menyatakan diri akan mendukung program organisasi profesi jurnalis itu ke depan.

"Saya akan mendukung Suwarjono-Arifi ketika mereka terpilih nanti. Semoga ke depan, AJI semakin maju dan berkembang di seluruh Indonesia," sebut Abdul Manan.

Sementara itu, Suwarjono menyatakan komit memperjuangkan kesejahteraan jurnalis di seluruh Indonesia. Dia juga berharap perusahaan media mengangkat kontributor daerah menjadi karyawan. Sehingga, jurnalis semakin bisa profesional, independen dan beretika dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Kami butuh dukungan semua pihak untuk kemajuan organisasi dan perkembangan pers di Indonesia," pungkasnya. / Zaenal Arifin



KPK Tetapkan Boediono Tersangka?

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Pekanbaru, ketika ditanya awak media bahwa Boediono sudah tersangka dalam Kasus Century.

“Dalam perjalanannya prestasi KPK 10 tahun kasus semuanya 435. Ada menteri, gubernur, bupati/walikota, diplomat. Terakhir kita sudah men-tersangka-kannya Mantan Wakil Presiden, Boediono, kita menangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian BPK sebagai lembaga tinggi negara,” kata Adnan di Pekanbaru, Kamis (4/12).

Namun ketika ditanyakan kenapa tidak ada pemberitaan sebelumnya, dia menjawab hal itu sudah ada dan menyarankan untuk bertanya kepada yang lain. “Kan Perkara Century, sudah ada beritanya, coba tanya sama yang lain.”

Dia mengatakan prestasi KPK

yang bisa menjerat pejabat negara itu membuat lembaga tersebut kini sangat dihormati di mata dunia. Bahkan, lanjut dia, sudah mengalahkan reputasi KPK Hongkong yang merupakan contoh lembaga pemberantasan korupsi terbaik di dunia.

“Jadi dunia semuanya kalau belajar mengenai korupsi, belajar ke Indonesia.”



Dia menuturkan, pada 435 kasus yang ditangani KPK itu tidak ada satu perkara yang kalah di persidangan. Semuanya, lanjut dia, masuk bui dan yang nomor satu kebanyakan adalah anggota DPR. Itu terjadi karena biasanya korupsi oleh DPR dilakukan secara berjemaah.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. “Sudah saya koreksi tidak benar berita itu karena tidak ada ekspose kasus dengan nama tersebut,” katanya.

Nah, mengapa dua pimpinan KPK bisa berbeda soa ini? / Wisnu Yusep - Ant

Abraham Tak Mau Penunjukan Pimpinan KPK Melalui Perppu

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, menolak usulan agar presiden menerbitkan Perppu penunjukan pimpinan lembaga antirasuah terkait berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas selaku pimpinan KPK 10 Desember 2014 nanti.

“Kami pertegas, kami akan menolak diterbitkan Perppu/Perpres oleh pemerintah untuk menunjuk satu pimpinan. Kami tidak mau, karena sifat penunjukan itu berbahaya,” kata Abraham sebelum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, di gedung DPR, Jakarta, Senin (1/12).

Alasan penolakan KPK terhadap diterbitkannya Perppu itu, karena KPK bukan dalam situasi genting. Dia pun menegaskan KPK tetap bisa berjalan kendati hanya ada empat pimpinan. Sama halnya dengan kepolisian dan kejaksaan yang tetap bisa berjalan kendati hanya di pimpin oleh satu orang.

Meski demikian, Abraham menyerahkan penuh ihwal itu kepada komisi III DPR terkait proses seleksi calon pimpinan KPK ini.

“Perlu saya sampaikan, kalau ada pendapat dan wacana kalau empat pimpinan KPK itu menjadi persoalan, sama sekali tidak benar. Jadi empat pimpinan tidak jadi masalah, kami bisa bekerja secara maksimal. Jangankan empat, dua pun tidak masalah. Kepolisian sampai kabupaten, kejaksaan sampai kabupaten bisa dipimpin satu orang,” kata Abraham.

Sesuai ketentuan, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memperpanjang masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, jika DPR gagal menentukan calon pimpinan KPK yang baru. / Saeful

Anwar - Novrizal Sikumbang

Sebelas Penyidik Polisi Pilih Permanen di KPK

Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan, bahwa 11 anggota Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengundurkan diri dan memilih hijrah ke lembaga pimpinan Abraham Samad Cs.

“11 yang sudah mengundurkan diri,” kata Sutarman di Ditpolair Baharkam Polri, Jl RE Martadinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin (1/12).

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan, 15 penyidik telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Polri. “Sementara yang masuk 15, tapi ada persyaratan yang kurang yang harus kami lengkapi,” ujarnya.

Beberapa syarat administratif memang harus dilengkapi dahulu sebelum menyatakan mundur dari kepolisian. Pihak Polri pun tak mempermasalahkan, mundurnya anggota korps Bhayangkara itu dan memilih menjadi penyidik KPK.

Sementara itu menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, sah-sah saja bila penyidik Polri hijrah ke lembaga superbodi itu.

KPK pun dipersilahkan mengambil Penyidik yang sudah mengajukan permintaan ke instansi asalnya itu. “Ini tidak masalah. UU ASN (aparatur sipil negara) kan sudah mengaturnya. Silakan saja,” ujarnya. / Nebby Mahbubirrahman/Fadlan Syiam Buthe







Mahasiswa dan Buruh Sandera Tanki Pertamina Protes Kenaikan BBM

Mahasiswa dan buruh menyandera truk tangki Pertamina saat menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Aksi ini memprotes kebijakan presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM. Selain itu mereka juga meminta Jokowi pecat menteri yang berbau Neolib di antara menteri perekonomian, BUMN dan ESDM.

Aktual - Tino Oktaviano

Revisi 'Mental' Menyandera Jokowi

Oleh: Soemitro

Presiden Joko Widodo belum mengakui DPR RI di bawah kepemimpinan Setya Novanto. Sikap presiden ini dipertegas dengan menerbitkan surat larangan bagi seluruh menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkatnya memenuhi undangan DPR.

Surat Edaran Nomor SE-12/Seskab/XI/2014 itu diterbitkan 4 November 2014 dan ditandatangani Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto. Larangan ini tetap berlaku hingga DPR selesai melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal dan menjalankan poin-poin perdamaian (lihat tabel).

Poin perdamaian tertuju pada salah satu dari lima butir nota kesepahaman Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Yakni dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Surat edaran Seskab yang bersifat rahasia dan terbatas ini beredar di kalangan wartawan, terutama setelah Komisi VI DPR mengekspos surat permintaan penundaan panggilan dari Menteri BUMN Rini Sumarno.

"Menteri dilarang ke DPR karena koalisi-koalisi masih ramai, percuma kalau kita dipanggil ke sana. Kita menunggu yang dewan selesai," kata Jokowi di Bengkulu, Rabu (26) pekan lalu.

Diakui, larangan dikeluarkan terkait konflik dua kubu di parlemen. Selain itu, pemerintah merasa DPR tidak mempunyai ukuran yang jelas dalam melakukan pemanggilan. Sementara pemerintah sendiri baru bekerja sebulan. Berbeda misalnya jika sudah bekerja sekian lama.

"Kan baru sebulan kerja. Manggil-manggil untuk apa? Sekali lagi kerjanya baru sebulan. Manggil apanya?,"

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan surat edaran Seskab tidak bermaksud memperkeruh hubungan pemerintah dengan DPR. Namun untuk mendorong agar revisi UU MD3 cepat selesai. Selama revisi belum selesai, larangan akan tetap berlaku.

DPR, menurut JK, baru bisa dikatakan sebagai DPR, bila seluruh anggota dari setiap fraksi yang ada turut berpartisipasi dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Apabila itu sudah berjalan, maka menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkat siap memenuhi setiap undangan DPR.

Pembahasan revisi UU MD3 sendiri di parlemen 'mental'. Dalam pengambilan keputusan tingkat dua, Rabu (26/11), penetapan agar revisi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak mencapai kata sepakat. Pimpinan rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan revisi UU MD3 dikembalikan ke Badan Legislasi (Baleg).

Keputusan itu, menurut Fahri, sebagai jalan tengah penyelesaian KMP dan KIH. Karena penundaan berarti masih ada peluang untuk diajukan kembali. Sementara kalau ditolak maka secara otomatis revisi UU MD3 tidak bisa diajukan kembali. Kalau bisa, proses yang harus dilalui sangat rumit.

Awalnya, sebelum diambil keputusan demikian, pimpinan paripurna menawarkan dua opsi. Pertama disetujui atau tidak, usulan Baleg DPR agar revisi UU MD3 dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kedua, disetujui atau tidak, usulan Baleg untuk dibahas sebagai Rancangan



Sidang Paripurna. Anggota dewan mengikuti jalannya Sidang Paripurna DPR membahas revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Undang-Undang (RUU).

Dikembalikannya revisi UU MD3 ke Baleg, lanjut Fahri, sekaligus memberi waktu bagi Baleg untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih diperdebatkan. Antara lain soal mengenai pro-kontra dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)



dalam pembahasan.

Juga perihal payung hukum dari revisi UU MD3 dan potensi dipatahkannya hasil revisi nanti oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya kira kita sepakat tidak ingin membuat Undang-Undang yang seminggu kemudian dipatahkan di Mahkamah Konstitusi. Biar diselesaikan dulu di tingkat Baleg,” kata Fahri.

Sebelum dibawa ke paripurna, pembahasan di Baleg sudah ada kesepakatan mengenai revisi dalam bentuk penghapusan 7 ayat dalam

dua pasal UU MD3. Yakni Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 98 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

Dua pasal itu mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat anggota di tingkat komisi. Hak-hak itu diatur dalam konstitusi. Akan tetapi hak-hak anggota dalam tujuh ayat dari dua pasal tersebut mengulang Pasal 79 UU MD3 dan Pasal 20a UUD 1945.

Tanpa melibatkan DPD, Baleg sepakat menghapus pasal-pasal

itu dan hasilnya diserahkan ke Badan Musyawarah. DPD berang dan mempermasalahkan saudara tertuanya, DPR, dan mengancam akan membuat draf revisi sendiri apabila ke depan, tetap tidak dilibatkan.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Gede Pasek Suardika mengatakan alasan DPR tidak bisa diterima. Bagaimanapun, meski materi revisi UU MD3 hanya beberapa pasal dan tidak terkait dengan DPD, tetap saja ada

perubahan UU.

Terlebih keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU merupakan amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan putusan MK bahwa pembahasan UU harus dilakukan secara tripartit, yakni DPR, DPD dan pemerintah. Begitu halnya dengan UUD 1945 sebagaimana diatur pada Pasal 22D ayat (1).

Senator asal Bali itu menjelaskan bagaimana hasil rapat pleno Baleg DPR. Di mana mayoritas anggotanya menginginkan DPD hanya diperbolehkan memberikan masukan namun tidak terlibat dalam pembahasan revisi.

“Jika kurang 50 persen, termasuk hanya satu dua tiga pasal, tetap sama namanya, yaitu perubahan undang-undang. Tidak bisa karena materinya hanya terkait DPR, DPR saja yang bahas. Ini perbedaan Undang-Undang dengan tata tertib. Kalau tata tertib, silakan saja mereka yang bahas,” katanya.

Revisi UU MD3 adalah syarat islah antara dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Saat diteken perwakilan kedua kubu, masing-masing pihak menyepakati lima poin. Akan tetapi perdamaian itu hanya seumur jagung. Sehari setelah damai, kesepakatan itu mentah lagi saat di paripurnakan.

Kelima butir kesepakatan itu adalah, pertama KIH sepakat menyerahkan daftar nama-nama anggotanya untuk 11 komisi, 4 badan dan satu anggota pada Majelis Kehormatan Dewan. Kedua, KMP-KIH sepakat menambah jumlah satu wakil ketua pada 16 Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Ketiga, sepakat segera mengisi pimpinan alat kelengkapan dewan dan penambahan wakil ketua pada tiga AKD secara musyawarah mufakat. Keempat, mereka sepakat melakukan perubahan pada UU MD3 dan Tatib DPR. Kelima, hal-hal teknis terkait pelaksanaan kesepakatan

Surat permintaan penundaan panggilan dari Menteri BUMN Rini Sumarno

akan dituangkan dalam kesepakatan pimpinan fraksi KMP dan KIH dan diketahui pimpinan DPR.

Kesepakatan kemudian dibawa ke paripurna namun mentah. F-PDI Perjuangan enggan menyerahkan nama-nama anggotanya ke Komisi dan AKD. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu hanya menyerahkan anggotanya ke Baleg dan Badan Urusan Rumah Tangga



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-724/MBU/XI/2014
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penundaan Jadwal-jadwal Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN.

20 Nopember 2014

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal DPR-RI
Di-
Jakarta

Sehubungan dengan adanya beberapa surat undangan dari Deputy Persidangan dan KSAP DPR-RI kepada Deputy Menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Deputy Menteri BUMN dan BUMN (contoh copy terlampir), maka dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari Pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Pimpinan Komisi VI DPR RI;
2. Deputy Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan;
3. Deputy Persidangan dan KSAP DPR-RI;
4. Pejabat Eselon I KBUMN;
5. Direktur Utama BUMN.

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 17 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

(BURT). Langkah partai berlambang banteng moncong putih ini diikuti dua anggota KIH, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dan Fraksi Partai Hanura (F-Hanura).

Untuk Baleg, F-PDIP menyerahkan nama Dwi Ria Latifa, Arief Wibowo, Jalaluddin Rahmat, Rieke Diah Pitaloka, dan Adian Napitupulu. Untuk BURT, masing-masing Indra Simatupang dan Indah Kurnia.

F-PKB menyerahkan nama Jazilul Fawaid, Marwan Dasopang, Taufik

R Abdullah, dan Malik Haramain di Baleg, serta Agus Sulistiyo dan Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz di BURT.

Ketua DPR Setya Novanto lalu memberi tenggat waktu sepekan bagi ketiga fraksi untuk menyerahkan nama-nama anggotanya. Ketiga fraksi itu diperbolehkan menyerahkan nama-nama susulan secara tertulis dan tetap dianggap sah, meski tidak disampaikan secara formal melalui paripurna.

Anggota F-PDIP Aria Bima menyebut penundaan penyerahan nama-nama ini merupakan bagian dari rekonsiliasi KIH dengan KMP di parlemen. Bagaimanapun, lima butir nota perdamaian yang telah disepakati bersama masih perlu diuraikan lagi secara rinci. Khususnya mengenai butir revisi UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Revisi UU MD3 sebagai jaminan,

bila pembahasan revisi UU MD3 bersama aturan turunannya (Tatib DPR) selesai, maka KIH akan segera menyerahkan nama-nama anggotanya ke Komisi dan AKD.

Belakangan, setelah revisi UU MD3 disepakati bersama di Baleg, ketiga fraksi KIH akhirnya bersedia menyerahkan nama-nama anggotanya secara penuh.

Baik KMP maupun KIH optimis pembahasan revisi UU MD3 bakal rampung sebelum 5 Desember mendatang. Dengan begitu mulai Januari 2015 mendatang, DPR bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Saya mengkhawatirkan ini ada skenario. Sebentar lagi masuk reses, artinya apa, ini ada skenario besar,” tegas Wakil Ketua Komisi VI, Azman Natawijaya.

Politisi Demokrat itu mensinyalir ada skenario besar

dari KIH agar parlemen tidak bekerja maksimal, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Padahal, disadari atau tidak, apa yang dilakukan KIH di parlemen sesungguhnya merugikan pemerintahan Joko Widodo sendiri.

Ia menyinggung bagaimana kementerian yang menjadi mitra kerjanya menolak undangan rapat dengan Komisi VI. Di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

DPR, lanjut Azman, akan tetap meminta penjelasan atas program dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Bahkan, apabila program dan kebijakan itu di luar batas kewajaran, maka parlemen tidak akan segan-segan untuk mengevaluasinya.

Menteri BUMN Rini Sumarno sendiri menyatakan surat permintaan penundaan yang dilayangkan ke Pimpinan DPR RI melalui Sekretariat Jenderal DPR RI per tanggal 20 November 2014 sudah dia pikirkan matang-matang (lihat tabel 2). Yaitu, akibat parlemen belum bersatu.

Dengan kondisi yang ada di parlemen sekarang, dia khawatir komunikasi yang dibangun tidak berjalan dengan baik. Atas dasar itulah Rini menunggu perintah ‘Pimpinan’ sambil menunggu selesainya pembahasan revisi UU MD3 dan Tatib DPR di Baleg.

“Urusannya bukan mau tidak mau. Urusannya adalah komitmen kita bersama memberikan yang terbaik pada bangsa. Salah satunya adalah MD3 ini harus terselesaikan dulu, *gitu aja*,” kata Rini.

Sementara anggota F-PDIP Arif Wibowo enggan berandai-andai seakan dengan penyerahan daftar nama-nama anggota seluruh fraksi di KIH untuk AKD, maka kerja DPR dengan mitra kerjanya otomatis akan berjalan lancar. Karena masalah ini hendaknya jangan ditilik dengan logika umum. Tapi, pergunakanlah logika politik.

“Intinya nanti Januari baru mulai efektif,” katanya. ■

Nota Kesepahaman KMP - KIH

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota-anggota fraksi pada 11 komisi, empat badan, dan satu Majelis Kehormatan Dewan, sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal.
2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan, serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014 - 2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah satu wakil ketua pada 16 alat kelengkapan dewan/AKD (seperti yang dimaksud pada angka 1 diatas), melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan dan Pimpinan AKD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
3. Bersepakat untuk segera mengisi pimpinan alat kelengkapan dewan yang masih tersedia (Banggar dan BURT), dan penambahan wakil ketua pada tiga AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat, serta menambah satu wakil ketua pada setiap komisi, badan, dan MKD sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.
4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansial sudah diatur pada Pasal 79, Pasal 194 sampai dengan Pasal 227 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014.
5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan pimpinan fraksi dari Koalisi Merah Putih dan pimpinan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh pimpinan DPR RI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Kala SBY dan Jokowi Perang di Media Sosial



Presiden ke 6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghebohkan jejaring social Jumat (28/11) lalu. Lewat akun Twitter-nya @SBYudhoyono ia menulis tentang visi kepemimpinan.” Kekuasaan juga menggoda. Karenanya, gunakanlah secara tepat dan bijak. Jangan sewenang-wenang dan jangan melampaui kewenangannya,” tulisnya.

Entah kepada siapa SBY ingin menyampaikan tulisannya. Dalam salah satu kicauannya SBY menulis soal pencitraan yang berlebihan tidak baik untuk seorang pemimpin.”Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan dan tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran,” ujarnya.

SBY juga memberikan nasehat agar pemimpin sebaiknya memperbanyak pengetahuan sebelum membuat kebijakan. “Tong kosong nyaring bunyinya”. Akan lebih bijak jika tong yang masih kosong diisi dulu. Isilah dengan pengetahuan dan pengalaman,” tulisnya.

Entah memang merasa tersindir oleh SBY, pada hari yang sama Presiden Joko Widodo mengunggah pendapatnya tentang sosok pimpinan di era demokrasi.” Basis kepemimpinan dalam demokrasi adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu dibangun diantaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja,” ujarnya dalam akun Facebook resminya.

Ia juga memiliki pandangan yang berbeda tentang sosok pimpinan yang disebut oleh SBY sebagai tiran.” Beda antara kepemimpinan yang dipercaya dengan kepemimpinan tirani, kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membunkam kesadaran rakyat, bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja,” ujarnya. / [Nebby Mahbubirrahman](#)

‘Umat Islam’ Bersatu Tolak Ahok

Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) organisasi gabungan dari Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), dan Mujahidah Pebela Islam (MPI), berunjuk rasa untuk menggulingkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Aksi Tolak Ahok yang dibarengi aksi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 28 November ini berlangsung dari Bundaran Hotel Indonesia menuju gedung DPRD DKI di Kebon Sirih.

Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab menginstruksikan anggotanya aktif dalam aksi Tolak Ahok itu sebagai bagian dari aksi pelengseran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada 1 Desember 2014.

Instruksi ini disampaikan Rizieq



melalui akun facebook Muhammad Rizieq Shihab yang diposting sejak tanggal 19 November pukul 22:54 WIB. Aksi ini menjadi kelanjutan dari rencana Koordinator Lapangan

Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) KH Endang yang mengajak Umat Islam dan semua anggota GMJ untuk melakukan aksi tolak Ahok pada 28 November 2014. / [Nebby Mahbubirrahman](#)

KPU Mulai Pusing Soal Regulasi Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku pusing memikirkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang didasarkan pada Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014. Karena Perpu yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menuai kontroversi akibat berlawanan dengan UU Pilkada yang sebelumnya disahkan DPR yang menyatakan Pilkada dilakukan melalui DPRD.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pekerjaan berat sudah menanti KPU karena harus fokus mempersiapkan diri membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Kami akan konsentrasi pada berlakunya Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 yang mengarah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2015,” kata Husni di Jakarta, November 2014.

Perppu 1/2014 tentang Pilkada langsung bersama Perppu 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah tengah dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua Perppu itu dinilai pemohon uji materi memiliki kecacatan

hukum yang dapat merusak sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Apalagi munculnya Perppu itu juga dilatarbelakangi perbedaan sikap politik yang bersifat temporer antara Presiden SBY dengan DPR saat itu.

“Ini bias menjadi preseden buruk, apalagi jaman Presiden Jokowi ini konflik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebar (KIH) begitu keras,” kata pemohon uji materi Didi Supriyanto.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengaku akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutuskan apakah perkara ini dapat dilanjutkan ke pleno atau tidak. Karena, MK belum memiliki wewenang untuk menguji Perppu.

“Kami akan menyerahkan permohonan-permohonan ini kepada RPH, dan kalau hal ini dilanjutkan ke pleno maka akan mendengarkan keterangan DPR dan presiden, lalu bisa mengajukan saksi atau ahli,” ungkap Maria. / [Nebby Mahbubirrahman](#)

Pembentukan Tim Reformasi Migas ‘Lebay’



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Untuk itu Faisal Basri ditunjuk sebagai ketuanya. Pembentukan komite ini didasari laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bahwa sektor migas mendapatkan rapor merah.

Faisal Basri pun sigap langsung memeriksa PT Pertamina Trading Limited (Petral) yang berkantor

di Singapura. Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini sering disebut sebagai sarang mafia dalam bertugas mengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia.

Gebrakan yang ditunjukkan Faisal ditanggapi kritis oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resource

Studies (IRESS) Marwan Batubara. Dia menilai Instruksi Presiden kepada Faisal untuk mengurus Petral dalam waktu tiga bulan harus dilakukan secara terbuka dan benar.

Marwan berharap, tim ad hoc yang diketuai Faisal bisa independen, konsisten, dan tidak tersusupi kepentingan-kepentingan mafia.

“Faisal harus independen dan tidak tersentuh oleh kepentingan mafia agar bisa memberikan rekomendasi yang tepat bagi Pemerintah. Dan kita juga berharap

Istana dan DPR tidak tersusupi oleh mafia,” ungkapnya.

Sebaliknya, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lucky Hakim menilai pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini terlalu mengada-ada. Apalagi sudah ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas memberantas mafia migas. “Untuk apalagi mesti ada pembentukan Tim Reformasi tersebut jika tugasnya sama dengan PPNS,” ucap Lucky.

Lucky menilai dari empat tugas dan fungsi utama tim reformasi tata kelola migas, jelas terlihat ada tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait.

Tim Faisal bertugas memantau semua pengelolaan kegiatan migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama, padahal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab SKK Migas. Begitu pun dengan tugas Mengkaji semua proses perizinan, padahal itu pun bisa langsung ditangani oleh Kementerian ESDM dengan berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Komisi VII DPR RI. / [Nebby Mahbubirrahman](#)

Akankah Pertamina Menari di Lantai Bursa

Oleh: Ismed Eka, Dhanu, Novrizal

Visi pengelolaan kekayaan alam termasuk migas termaktub dalam pasal 33 UUD 45 yang diungkapkan bahwa pengelolaan migas harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, Pasca penyerahan kedaulatan pada 1949, Bung Karno berfikir keras bagaimana cara mentransfer kepemilikan kekayaan alam dan perusahaan vital dari tangan asing ketangan rakyat Indonesia. Nasionalisme menjadi sentimen umum rakyat Indonesia setelah merdeka, segera setelah itu, tuntutan nasionalisasi perusahaan milik asing bergolak dimana-mana. Namun, Sektor migaslah yang akhirnya membuat Soekarno digulingkan dari kekuasaannya. Disini terlihat seberapa kuat pengaruh sektor migas untuk menguasai politik di Indonesia.

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan ada beberapa posisi penting yang menjadi incaran mafia migas, seperti Menteri ESDM yang melahirkan kebijakan, Menteri BUMN yang membawahi PT Pertamina, SKK Migas yang mengatur perizinan sektor hulu mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi, PT Pertamina yang melakukan kegiatan sektor migas baik hulu maupun hilir dan terakhir Menteri Keuangan yang turut serta menentukan kajian finansial proyek migas.

“Muara dari seluruh praktek mafia dalam pengelolaan migas tersebut adalah kebocoran, korupsi dan intervensi kekuasaan, yang menyebabkan berpindahnya kekayaan rakyat ke tangan sindikat dan mafia. Keberadaan mafia minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia tidak hanya bercokol di industri hulu, namun juga hilir,” ujarnya.

Setelah mundurnya Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina, salah satu BUMN di sektor migas dengan nilai pendapatan US\$71,1 miliar, produsen migas terbesar di Indonesia dan perusahaan Fortune Global 500 2014 peringkat 123 maka tidak heran jika jaringan-jaringan mafia migas ingin berebut menjadi pengganti Karen.

Sementara menunggu pemerintahan baru terbentuk, pemerintah melalui kementerian BUMN menunjuk Muhammad Husen sebagai plt Dirut Pertamina. Namun ketika Pemerintahan Jokowi dilantik, pengganti Karen tak kunjung ditunjuk. Bahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memperpanjang masa jabatan Muhamad Husein





hingga bulan November. Rini mengakui bahwa orang yang diseleksi tak hanya dari lingkungan perusahaan pelat merah saja.

“Butuh waktu kira-kira satu bulan. Akhir November akan dilakukan seleksi yang sangat ketat baik dari internal, lingkungan BUMN, dan dari luar sehingga kita ada pilihan,” ujarnya.

Spekulasi pun bermunculan dari berbagai macam pengamat dan pemerhati migas. Pasalnya, Menteri Rini melakukan pemilihan Dirut Pertamina secara tertutup. Rini menunjuk PT. Daya Dimensi Indonesia (DDI) melakukan assesment Dirut Pertamina. Penunjukan PT DDI sebagai konsultan *assesment* Dirut dan Direksi Pertamina dinilai rawan praktek KKN dan diragukan kapabilitasnya. Pasalnya, informasi yang diterima, Rini Soemarno melibatkan pihak eksternal PT DDI yang ternyata masih berkaitan dengan keluarga Soemarno.

“Saya mohon maaf pada Menteri BUMN, Rini Soemarno agar mawas diri, menghentikan praktek-praktek KKN. Dia telah melibatkan kedua abangnya Arie Soemarno dan Ongky Soemarno dalam pemilihan direksi Pertamina melalui penunjukan PT DDI,” ujar mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli di Jakarta.

Bila Menteri Rini masih menerapkan praktek KKN tersebut, dirinya tak segan untuk meminta Presiden Joko Widodo untuk bertindak.

“Sebaiknya Menteri Rini menghentikan praktek-praktek KKN, kalau tidak saya minta pak Jokowi bertindak,” ujarnya.

Koordinator Indonesia Migas Watch Tri Widodo juga mempertanyakan apakah lembaga konsultan swasta yang ditunjuk Pemerintah untuk menguji *fit and proper* kepada para kandidat tersebut benar-benar tahu sosok seperti apa yang dibutuhkan Pertamina.

“Saya rasa PT DDI belum tahu kondisi Pertamina. Dia tidak tahu



Dirut Pertamina yang baru Dwi Soetjipto (tengah), didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan), bertumpuk tangan usai pengumuman jabatan Dirut Pertamina di kantor BUMN, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Pertamina dan bagaimana korporat budayanya,” kata Tri yang juga Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN.

Syarat utama kriteria sosok calon Dirut Pertamina, lanjutnya, berasal dari internal. Kemudian, sosok internal itu harus dapat melakukan transformasi, tahan intervensi, bisa menghapus mafia migas, dan harus dekat dengan Presiden.

Menurut Analis Politik-Ekonomi Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, hasil *assesment* yang dilakukan PT DDI berbeda jauh dibandingkan tahun 2009 dan 2011.

“Hasil *assesment* dari PT. DDI terkait calon direksi dan Dirut PT Pertamina patut dipertanyakan obyektifitasnya. Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan PT. DDI yang cenderung tidak transparan,” ujar Karyono di Jakarta.

Kepentingan tersebut semakin

mencolok ketika orang-orang dari eksternal lolos seleksi PT DDI menjadi kandidat dirut pertamina. Nama-nama tersebut erat hubungannya dengan jaringan dari Soemarno. Mereka yakni Ahmad Faisal Mantan Dirut Niaga Ptm Era Ari Soemarno, Widhyawan mantan deputy SKK Migas-Stafsus Sudirman Said. Sedangkan tiga kandidat eksternal yakni Budi Sadikin Dirut Mandiri, Rinaldi Firmansyah mantan Dirut Telkom, dan Dwi Soetjipto Dirut Semen Indonesia.

Menurutnya, PT. DDI memiliki kedekatan hubungan dengan Ongky Soemarno yang notabene adalah kakak Rini Soemarno. Dari awal terlihat ada irisan-irisan kepentingan Rini Soemarno untuk memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk direksi dan komisaris BUMN. Untuk menunjukkan nilai profesionalitasnya, Development Dimensions International (DDI)



harus segera melakukan audit Development Dimensions (PT DDI) yang ada di Indonesia.

Presiden Serikat Pekerja Pertamina Bersatu meminta Presiden Joko Widodo agar tidak memilih Dirut Pertamina dari kalangan Eksternal yang tidak mengetahui sektor Migas seperti Dirut Semen Indonesia, Dwi Soetjipto.

“Pakai logika saja, produksi semen dan migas itu berbeda. Sektor migas itu lebih rumit, Jauh sekali dibandingkan dengan mengurus Semen. Kandidat dirut Pertamina dari internal lebih banyak dan bagus,” ujar Presiden Serikat Pekerja Pertamina, Ugan Gandar.

Menurutnya, pengalaman yang dimiliki Dwi Soetjipto di industri Semen tidak sebanding dengan sektor migas. Persoalan di Pertamina, bukan semata-mata masalah keuangan. Tugas penting Dirut Pertamina adalah meningkatkan *lifting* minyak, membenahi sektor hulu dan hilir, berjuang untuk membangun kilang, memperbaiki bisnis kapal minyak dan tanker.

Jika Rini tetap memaksakan Dirut Semen Indonesia Dwi Soetjipto menjadi Dirut Pertamina, dirinya yakin Pertamina akan menuju kehancuran. Pertamina bakal di privatisasi, *lifting* minyak bakal menurun, dan timbul gejolak dalam internal Pertamina.

“Kami siap melakukan dan menggerakkan aksi massa turun ke jalan jika dirut Pertamina bukanlah orang yang ahli di sektor migas, apalagi Dirut Semen,” pungkasnya.

Ahli Geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari menyayangkan jika Menteri Rini Soemarno memilih Dirut Pertamina dari kalangan eksternal yang tidak mengetahui latar belakang migas.

“Kandidat Dirut Pertamina dengan latar belakang keuangan hanya akan mementingkan sisi keuangan saja. Dia tidak pasti tidak mengetahui bagaimana meningkatkan *lifting*, mencari cadangan minyak dan membangun kilang,” ujarnya.

Pasalnya, dengan meningkatnya konsumsi minyak dalam negeri yang dibutuhkan adalah peningkatan *lifting* dan pembuatan kilang baru, bukan hanya masalah akuntansi belaka.

“Yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat terkait posisi kredibilitas yang dicari, yaitu dirut Pertamina yang ahli di sektor migas, jujur, berani melawan intervensi kepentingan tertentu dan berani melawan tindak korupsi” tegasnya.

Namun, akhirnya pada hari Jumat (28/11) menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said mengumumkan bahwa Pemerintah mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Dirut Utama Pertamina.

“Dwi Soetjipto mulai tanggal 28 November 2014 diangkat menjadi Direktur Utama Pertamina periode 2014-2019,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya, Jakarta, Jumat (28/11).

Menteri Rini memilih Dwi Soetjipto karena bisa menganalisis

secara mendalam *supply chain* Pertamina dari hulu ke hilir. Terutama sistem *accountable*, transparan sehingga semua pihak yakin Pertamina baik untuk bangsa. Dwi juga bisa menganalisis secara mendalam terkait efisiensi. Salah satu *challenge* Dwi adalah terkait tiga orang direksi Pertamina. Dalam waktu seminggu tugas tersebut harus di *review* terlebih dahulu.

Selain menunjuk Dirut Pertamina, Menteri Rini juga melakukan efisiensi dengan memangkas jajaran direksi dari delapan orang menjadi 3 orang.

“Semua direksi Pertamina diberhentikan secara hormat. Dilantik juga tiga direksi baru,” ujar Rini.

Tiga orang direksi baru tersebut adalah Direktur Pertamina PT Trans Continental Ahmad Bambang, PV Gas & Power Pertamina Yenni Handayani, dan Arif Budiman dari Mackenzie Stuart Oil & Gas.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto pun membenarkan efisiensi direksi Pertamina dari delapan orang menjadi tiga orang.

“Karena ini baru, jadi untuk posisi Pak Arif Budiman karena dia sebelumnya di Mackenzie jadi lebih ke *background* keuangan. Nanti Pak Ahmad dan Bu Yenni lebih ke *supply chain*, mungkin lebih ke pemasaran dan distribusi dan lain-lain. Nanti masih akan dikalkulasi lagi, dipikirkan lagi posisi yang pas,” ujar Dwi.

Informasi yang dihimpun Aktual menyebutkan penunjukan Dwi juga berkat restu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Ia memang memiliki pengaruh yang kuat dalam setiap kebijakan strategis Presiden Jokowi. Seperti diketahui Hendro merupakan mantan penasehat di tim transisi yang banyak direpresentasikan sebagai utusan Megawati.

Menanggapi hal itu, Mantan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan Pertamina ke depan akan ‘reput’ jika dipimpin oleh orang yang tidak memiliki dasar di dunia Migas.

“Agak reput, kalau tidak punya

pengetahuan perminyakan. Pasalnya, minyak memiliki sesuatu yang khas, dan tidak bisa disamakan dengan sektor industri lain,” kata Kwik.

Menurut Kwik, diperlukan keahlian khusus dalam memimpin perusahaan minyak. Tidak seperti sektor lain yang bisa hanya dengan kata ‘mampu’.

Meski bukan berasal dari dunia migas, Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengharapkan Dwi dapat memimpin Pertamina dengan baik untuk membuktikan bahwa sosok yang dipilih Presiden Joko Widodo bukanlah orang yang salah.

“Yang penting Pak Jokowi-JK jangan *hypocrite*, buktikan siapapun yang dipilihnya menjadi Dirut Pertamina harus bisa memberantas mafia dengan benar. Dan mudah-mudahan bisa menghilangkan mafia ini, dan tidak menciptakan mafia baru,” ujar Marwan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean pun menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terkesan ‘acuh’ dengan proses seleksi Dirut Pertamina yang dilakukan tidak transparan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya, proses seleksi banyak diambil alih Rini Soemarno dengan alih-alih melibatkan pihak eksternal yakni PT DDI itu, banyak yang tidak jujur disampaikan kepada presiden.

“Kami yakin informasi yang diberikan oleh Rini ke presiden adalah informasi yang tidak jujur. Rini mungkin memanfaatkan situasi dan posisinya untuk menguasai dunia migas Indonesia. Kami sangat kecewa, karena ketidakpahaman DS (Dwi Soetjipto) tentang seluk beluk migas. Dwi Soetjipto bakal tidak berani melawan mafia,” ujarnya.

Menurutnya, Catatan tentang Dwi Soetjipto menunjukkan dia tunduk pada kepentingan politisi partai berkuasa waktu itu (ketika menjabat sebagai Dirut Semen Indonesia). Ketidakpahaman Dwi tentang energi secara makro akibat Dwi tak punya latar belakang sama sekali di



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, didampingi Meneg BUMN Rini Soemarno dan Ekonom Faisal Basri, saat melakukan jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

bidang Migas. Sehingga menambah keyakinan bahwa Dwi hanya akan dijadikan sebagai eksekutor dari kebijakan orang di belakangnya.

“Nah kami melihat dia juga akan melakukan hal yang sama di Pertamina, dia akan tunduk dan mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang menjadikan dia sebagai Dirut Pertamina,” tandasnya.

Beberapa pengamat pun memberikan kritikan pedas, penunjukkan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bakal membuat PT Pertamina (Persero) semakin terperangkap dalam utang. Mereka merupakan bagian dari imperialisme pasar keuangan, yang hendak memasukan semua perusahaan negara dalam perangkap rezim keuangan global.

“Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bersama kroninya adalah orang-orang yang berprestasi membuat utang luar negeri, menumpuk utang luar negeri swasta dan utang luar negeri BUMN,” ujar peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta.

Senada dengan hal tersebut, Pengamat dari Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) M

Hatta Taliwang menilai Pemilihan Dwi Sutjipto sebagai dirut Pertamina sudah dalam desain meliberalisasi pengelolaan energi nasional.

Penunjukan ini pun memperkuat anggapan bahwa keberadaan Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) yang diketuai Faisal Basri hanyalah tameng untuk mengelabui kebijakan-kebijakan yang sudah diskenario pemerintah Jokowi-JK.

“Dari awal saya katakan, pembentukan Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) hanyalah *lip service* rezim ini saja. Itu LSM enggak jelas,” ucap Hatta Taliwang.

KRTKM adalah lembaga semu yang tak bakal mampu menghadapi mafia migas. Dahlan Iskan selama menjabat menteri BUMN pun tak sanggup memberantas mafia migas, apalagi Faisal Basri yang tak punya track record bagus sama sekali.

Pakar energi dari Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa pun meragukan kapabilitas mantan Dirut PT Semen Indonesia (Persero) ini dalam mengelola sektor migas. Apalagi latar belakang Dwi Soetjipto lebih dekat sebagai pengusaha.

“Persyaratan utama memilih dirut Pertamina haruslah dari orang yang punya pemahaman di sektor energi bukan komoditas. Visi dan misi seperti ini tidak ada pada Dwi Soetjipto,” ujar Iwa di Jakarta.

Semestinya pemilihan Dirut

PT Pertamina didasarkan pada seberapa jauh orang tersebut faham tentang visi dan misi pengelolaan energi nasional. Jika yang ditunjuk adalah Dirut perusahaan PT Semen Indonesia, maka yang terjadi adalah sektor energi tidak dianggap sebagai bagian dari hajat hidup orang banyak.

“Sepertinya Dirut yang dipilih adalah seorang *entrepreneur* (pengusaha), sehingga bicaranya bisnis. Pertamina akan semakin liberal,” ujar Iwa.

Dari sisi yang lain, Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan jajaran Direktur baru PT Pertamina sudah disusupi oleh para mafia migas. Selain penetapan Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama PT. Pertamina, Menteri BUMN, Rini Soemarno juga mengangkat tiga Direktur baru yakni Ahamd Bambang, Yenni Andayani dan Arif Budiman.

“Yenni Andayani adalah anak didik Ari Soemarno,” ungkap Uchok.

Selain itu, Uchok juga kembali menegaskan bahwa Pertamina saat ini sudah bukan lagi memproduksi minyak, tetapi memproduksi mafia. Dengan komposisi Direksi Pertamina sekarang, dirinya tetap tidak yakin jika Pertamina bisa lebih baik dari sebelumnya.

“Berbicara tentang Pertamina adalah berbicara tentang mafia. Di Pertamina tidak ada lagi minyak yang ada mafia,” kata Uchok.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa Direktur Utama PT Pertamina tidak harus orang yang menguasai atau ahli migas.

“Direktur PT Pertamina (3 direktur lainnya) harus ada yang ahli di bidangnya masing-masing. Direktur itu terdiri dari Pemimpin migas, pemimpin keuangan, pemimpin human capital...dst. Sedangkan Direktur Utama, itu pemimpin dari semuanya,” ujar Menteri Sudirman Said kepada Aktual di Jakarta (30/11).

Ketika ditanya apakah tidak sebaiknya Direktur Utama Pertamina mempunyai ilmu Migas karena

Dirut adalah pembuat kebijakan, menurutnya pemimpin tidak harus ahli.

“Presiden memang seluruh pemimpin, kan tidak harus ahli segala macam. Yang penting hatinya lurus untuk rakyat Indonesia. Dengan keahlian teknis pengetahuan substantif akan datang berbondong-bondong berbagai kalangan untuk menopang. *Just give the new CEO time.* Jangan pagi-pagi sudah dihakimi,” tambahnya.

Terkait penunjukan Dwi Soetjipto menjadi Dirut Pertamina yang terkesan tertutup dan mementingkan kelompok tertentu, Menteri Sudirman Said menjamin tidak ada keterlibatan Ari Soemarno. Menurut Ari Soemarno tidak ikut campur dalam penunjukan Dwi.

“Dwi juga tidak kenal-kenal amat sama Pak Ari,” jelasnya.

Dalam sebuah diskusi, Ketua Umum Serikat Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Efendi Hutabarat menegaskan bahwa pengaruh jaringan Soemarno sangat jelas terlihat dalam penunjukan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, bahkan sesaat sebelum ditunjuk menjadi Dirut Pertamina, Dwi diminta berjanji akan setia kepada keluarga Soemarno.

“Kami mendapat informasi, Dwi sebelum ditetapkan sebagai Dirut Pertamina dia (Dwi) disuruh menghadap kepada Ari Soemarno. Dihadapan Ari, dia diminta berjanji setia kepada Soemarno Inc,” ujar Binsar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM mengatakan jika itu hanyalah sebuah halusinasi.

“Halusinasi orang kok hebat benar. Yang terjadi Dwi saya ajak sumpah darah untuk kepentingan merah putih, itu sebelum dipanggil Pak Presiden,” pungkasnya.

Keterpilihan Dwi tidak bisa lepas dari torehan prestasinya di perusahaan semen. Ia bahkan mendapatkan sebutan sebagai bakap “Semen Indonesia”. Pasalnya lewat tangan Dwi lah tiga perusahaan semen, yakni Semen Padang, Semen Gresik, dan Semen Tonasa menjadi PT Semen Indonesia Tbk.

Tahun 2013, Semen Indonesia mengakuisisi perusahaan semen asal Vietnam, Thang Long Cement pada 18 Desember 2013 senilai US\$157 juta. Thang Long, yang punya pabrik di Quang Nihn, merupakan salah satu produsen semen terkemuka di Vietnam, dengan total kapasitas 2,3 juta ton semen per tahun.

Di bawah kendali Dwi, kapasitas produksi Semen Indonesia melesat jadi 26 juta ton per tahun. Ini membuat Semen Indonesia menguasai produksi semen di Asia Tenggara. Namun agaknya keterpilihan pria asal Surabaya tersebut lebih dikawatirkan keberhasilan dalam melepas saham Semen Indonesia ke lantai bursa. Agaknya hal ini akan dilakukan Dwi terhadap Pertamina. Terlebih saat ini Dwi merupakan salah satu komisaris di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti dicitakan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Ia menyepakati jika Pertamina kelak melempar obligasi ke lantai bursa. Ini bisa jadi langkah awal Pertamina untuk *go public*. “Saya setuju kalau Pertamina mengeluarkan obligasi utang ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi Pertamina akan lebih terbuka untuk masyarakat,” kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12).

Kendati demikian, lanjut dia, untuk mencapai transparansi sebetulnya Pertamina tidak harus menjadi *listed company* di lantai bursa, cukup dengan melaporkan manajemen keterbukaan setiap tiga bulan. “Manajemen keterbukaan memang harus dilakukan. Tapi karena Pertamina utangnya juga besar, saya rasa tidak ada salahnya menjual utang obligasinya,” tandasnya.

Menanggapi rencana tersebut pengamat energy Marwan Batubara berharap wacana tersebut tidak diteruskan. “Kita akan melakukan perlawanan jika Pak Dwi melakukan *Initial Public Offering (IPO)*. Pertamina ini perusahaan yang strategis, dan pemilik sahamnya harus 100 persen negara, dan tidak boleh dijual,” kata Marwan. ■



HAPUS SUBSIDI BONUS INTERPELASI

Oleh: Dedy Kusnaedi

Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, masing-masing Rp 2000,00 perliter. Sehingga harga premium sebelumnya Rp 6500,00 perliter naik menjadi Rp. 8500,00 perliter, begitu juga dengan harga solar yang sebelumnya dipatok Rp. 5500,00 perliter menjadi Rp 7500,00 perliter.

Presiden berkilah, kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja dari sektor konsumsi ke sektor produksi, sehingga pembangunan lebih baik karena fokus pemberian subsidi bukan lagi

disektor konsumsi.

Selain itu, pemerintah juga sudah memiliki program pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketiga kartu sakti ini adalah janji kampanye Jokowi saat bertarung memperebutkan kursi RI 1 di Pilpres Juli lalu dan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam mempertahankan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemangkasan subsidi BBM dinilai sebagai solusi perbaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui melakukan pengelolaan anggaran yang semakin

tertib, dengan demikian pemerintah dapat mengambil pelajaran di masa lalu dalam persoalan mengatasi krisis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya telah menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2015 beserta nota keuangannya kepada DPR, Jumat (15/8). Secara kumulatif, anggaran belanja nonkementerian dan lembaga dalam RAPBN 2015 direncanakan sebesar Rp 779,3 triliun. Anggaran subsidi energi dan nonenergi Rp 433,5 triliun. Dari subsidi energi Rp 363,5 triliun, belanja subsidi BBM tercatat Rp 291,1 triliun atau naik 18,1 persen dibandingkan APBN Perubahan 2014 yang sebesar Rp 246,5 triliun. Sedangkan, subsidi listrik Rp 103,8 triliun atau turun Rp 72,4 triliun dibandingkan APBN Perubahan 2014.

“Kenaikan subsidi BBM ini tentu berimplikasi kepada arah kebijakan fiskal selama satu tahun ke depan,” kata Direktur Institute for Development of Economics and



Estimasi Pertumbuhan Ekonomi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberi penjelasan mengenai rencana pengalokasian dana dari penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di Jakarta, Rabu (19/11).

Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

Lebih lanjut Enny mengatakan dalam postur anggaran yang baik, segala belanja yang bersifat *mandatory* turut meningkat jika pos belanja yang bersifat rutin dan mengikat juga mengalami kenaikan. Hal ini berarti dengan kenaikan subsidi BBM maka seharusnya anggaran 20 persen untuk pendidikan juga harus meningkat. Begitu juga dengan alokasi lima persen untuk kesehatan juga harus ditambah.

Tetapi sambung Enny jika melihat postur APBN era SBY, meski APBN sudah menembus angka Rp 1000 triliun, tetapi anggaran fiskal malah semakin kecil. Karena subsidi BBM terlalu besar.

Dan tentunya kata Enny hal ini akan berimbas terhadap terhambatnya program-program kerja Presiden Joko Widodo dalam perbaikan infrastruktur.

Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2000,00 perliter, negara akan berhemat APBN sebesar Rp 120 triliun di tahun 2015. Namun kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan memicu inflasi sebesar 2 persen, dari 5,3 persen menjadi 7,3 persen tahun 2014. Dan inflasi ini diprediksi akan berlanjut di bulan Januari sampai Februari 2015 mendatang. "Tetapi tidak akan sebesar pada dua bulan pertama, November dan Desember 2014," terang Menteri Keuangan Bambang S Brodjonegoro di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Pemangkasan subsidi harga BBM, kata Bambang mengakibatkan defisit

transaksi berjalan sebesar 2,2 persen dapat ditekan lagi, dan pemerintah sendiri akan mendapat tambahan fiskal lebih dari Rp 100 triliun, sehingga ada pengalihan subsidi ke infrastruktur. "Kurang dari dua bulan lagi ada penghematan Rp 9,5 triliun," tutur dia.

Sementara itu, Bambang juga mengakui jika kenaikan harga BBM bersubsidi akan menekan pertumbuhan ekonomi tahun ini hingga menyentuh angka 5,1 persen, yang menjadi penyebabnya adalah sektor konsumsi juga akan mengalami penurunan.

Namun dirinya berharap jika Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung dan pihak swasta (domestik) juga mengikuti, sehingga pelemahan konsumsi dikompensasi oleh adanya peningkatan investasi yang masuk ke negara.

Dalam hal ini, Bambang optimis meski pertumbuhan ekonomi tahun 2014 terkoreksi, defisit neraca transaksi akan berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, defisit transaksi berjalan masih berada di posisi 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan tahun 2014 sendiri defisit diperkirakan sebesar 3 persen dari PDB. Dan dirinya berharap pada tahun 2015, akan semakin membaik yaitu 2,5-3 persen terhadap PDB.

Disisi lain, perekonomian Indonesia juga akan semakin membaik di tahun depan asalkan pemerintah sendiri dapat memanfaatkan kondisi ekonomi dunia saat ini, karena Indonesia sendiri dinilai sebagai pasar yang

cantik sehingga mampu mengundang para investor untuk menanamkan modalnya, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi diprediksi dapat mencapai angka 5,3-5,6 persen.

Namun demikian, Indonesia tidak dapat hanya sekedar menggantungkan harapan kepada sektor ekspor ditengah kelesuan ekonomi dunia, terutama akibat dampak dari Jepang dan Uni Eropa yang belum keluar dari masalah resesi ekonomi yang hingga kini masih membelitnya.

Dalam rencana pembangunan 2015 ada kekurangan dana mencapai Rp 85,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Pembiayaan ini akan diambil dengan jalan meningkatkan peran swasta, penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jaminan ketersediaan tanah dan penyediaan skema pembiayaan.

Sementara itu, jika pemangkasan subsidi BBM dilakukan beberapa infrastruktur yang dapat dibiayai dari penghematan tersebut, antara lain :

Pertama, Peningkatan Ketahanan Air, melalui pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi seluas 71.000 hektar, rawa seluas 39.000 hektar. Pembangunan 21 waduk lanjutan, 9 waduk baru dan embung sebanyak 513. Pengendalian banjir sepanjang 600 KM dan rehabilitasi banjir sepanjang 450 KM. Pembangunan sarana dan prasarana air baku 11 m2/detik.

Kedua, Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan cara Meningkatkan elektrifikasi dari 83,2 persen menjadi 85,2 persen. Meningkatkan akses air minum dari 70 persen menjadi 70,25 persen melalui pembangunan SPAM kawasan MBR sebanyak 206, regional di lima kawasan IKK sebanyak 133, SPAM di 316 desa, SPAM di 25 kawasan khusus. Meningkatkan akses sanitasi dari 60,5 persen menjadi 62,4 persen melalui infrastruktur air limbah di 240 kawasan, drainase perkotaan di 34 kabupaten/kota, tempat memproses akhir sampah di 54 kabupaten/kota, tempat pengolahan sampah terpadu di 97 kawasan.

Warga beraktifitas dekat logo Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (25/11).

Menangani perumahan kumuh dari 10 persen menjadi 8 persen melalui pembangunan PSU sebanyak 105.000 unit, penataan kumuh seluas 2000 hektar, pembangunan perumahan swadaya 5.000 unit dan penyediaan infrastruktur pemukiman perkotaan di 85 kawasan.

Dan ketiga, Penguatan Konektivitas Nasional, langkah yang dilakukan adalah preservasi jembatan 9,652 m, peningkatan kapasitas atau pelebaran jalan 1,237 km, penggantian jembatan 2,296m, pembangunan jalan baru 258,9 km, pembangunan *flyover* atau *underpass* 2.044,8 m, pembangunan jalan tol 23.32km, serta pembangunan jalan dan jembatan di kawasan strategis, perbatasan, pulau terpencil dan terluar sepanjang 739,4 km dan 1.414 km. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 100 km, peningkatan kapasitas sepanjang 700 km, antara lain Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Lintas Selatan Jawa dan Lintas Timur Sumatera. Pembangunan prasarana penyeberangan baru di 59 lokasi, 14 dermaga sungai dan 3 dermaga danau. Penyediaan armada perintis 13 kapal di wilayah Timur Indonesia, pembangunan/peningkatan pelabuhan 167 lokasi. Pengembangan 8 bandara yang akan dioperasikan tahun 2015, pengadaan 2 pesawat kalibrasi, pengadaan 2 pesawat penumpang perintis, lanjutan pembangunan Bandara Tjilik Riwut dan Singkawang. Peningkatan jumlah pemancar sebanyak 15 unit dan studio sebanyak 10 unit (sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Perbaikan kondisi perekonomian di dalam negeri dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen APBN dan optimalisasi belanja pemerintah sebagai faktor utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu dari sektor



perbankan, dalam merespon keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dengan melakukan bauran lima kebijakan sekaligus, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta maru enopang pertumbuhan ekonomi.

Adapun lima kebijakan BI tersebut adalah: pertama, menaikkan BI Rate, BI Rate dinaikan 25 basis point menjadi 7,75 persen. Dan kenaikan ini akan meningkatkan suku bunga pinjaman dan pengendalian inflasi. Kedua, menyesuaikan kebijakan makroprudensial, yang bertujuan memperluas sumber pendanaan bagi perbankan, mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendorong penyaluran kredit kesektor produktif. Kebijakan ini berupa perluasan definisi simpanan dan pemberian insentif untuk mendorong penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah. Ketiga, memperkuat sistem pembayaran, yang bertujuan mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui penggunaan uang elektronik dan layanan keuangan digital. Keempat, stabilisasi nilai tukar Rupiah, reformasi subsidi BBM diyakini dapat memperkuat kepercayaan diri pasar dan memperbaiki transaksi berjalan.

Dan kelima, memperkuat koordinasi dengan pemerintah.

Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalkan potensi tekanan inflasi akibat kenaikan tarif angkutan dan harga pangan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, menegaskan dukungan BI kepada terhadap kebijakan reformasi fiskal Presiden Joko Widodo yang merealokasikan anggaran subsidi BBM ke sektor produktif, pasalnya hal tersebut merupakan langkah mendasar dan menjadi bagian penting dari reformasi struktural dalam memperkuat fundamental perekonomian.

Walaupun terjadi peningkatan harga dalam jangka pendek, dengan bauran lima kebijakan BI dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Agus optimis tekanan inflasi akan tetap terkendali dan bersifat temporer.

DPR Tidak Bisa Halangi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, KMP Ajukan Interpelasi

Merespon masalah pemangkasan subsidi BBM yang sudah diputuskan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui ketuanya, Setya Novanto menilai jika parlemen tidak dapat menghalangi kebijakan tersebut, pasalnya pemerintah sendiri memiliki kewenangan dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. "Semuanya adalah kewenangan

pemerintah, bukan DPR. Tapi, kami belum menerima pemberitahuan,” ungkap Setyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam konteks ini kata Setyo, DPR meminta pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang diambil dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain itu DPR juga mengundang pemerintah untuk menggelar rapat untuk membahas alokasi anggaran yang dialihkan dari subsidi BBM, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan sebelum DPR memasuki masa reses atau paling lambat 5 Desember mendatang.

Sementara itu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo, yang dahulu pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagian besar mendukung kenaikan harga BBM, kini pada Pemerintahan Joko Widodo berhaluan arah, mereka menegaskan akan mengajukan hak interpelasi guna meminta kejelasan Presiden Joko Widodo terkait keputusannya dalam menaikkan harga BBM bersubsidi.

Seperti dilontarkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang menyatakan PD mendorong partai lainnya yang tergabung dalam KMP untuk menggunakan hak interpelasi. Ibas menilai jika kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi berbeda dengan presiden sebelumnya, SBY.

Kenaikan pada tahun 2013, jelas Ibas dilakukan karena harga minyak dunia saat itu tengah naik, dan dirinya pun merasa pesimis dengan keberhasilan tiga kartu sakti yang digelontorkan Presiden Joko Widodo sebagai program pengalihan subsidi BBM.

Sependapat dengan Ibas, dikatakan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Viva Yoga Mauladi, dengan mengatakan jika hak interpelasi harus diajukan karena kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak luas pada masyarakat, misalnya kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok di masyarakat.

Tak kalah dengan anggota partai

KMP lainnya, Partai Golkar (PG) pun akan menggunakan hak interpelasi, sebagai hak yang melekat pada DPR untuk meminta penjelasan dari pemerintah, seperti diungkapkan oleh Politisi PG Bambang Soesatyo.

Sementara itu Pengamat Politik dari LIPI, Prof Siti Zuhro mengatakan hak interpelasi tidak dapat dipakai untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, pasalnya sistem presidensial yang kita anut sesuai dengan konstitusi tidak memungkinkan adanya pemakzulan.

Lain lagi pendapat Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintah, Kurtubi mengatakan Partai Nasdem mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah, pasalnya impor minyak yang dilakukan setiap bulan kini sudah mencapai sekitar Rp 7 triliun. Tentu saja hal tersebut sangat membebani neraca keuangan terkait subsidi BBM.

“Namun, yang harus menjadi perhatian adalah adanya pengawasan oleh masyarakat terkait kompensasi kenaikan harga BBM yang diberikan pemerintah dan tepat sasaran,” ujar Kurtubi.

Kurtubi menyarankan jika melihat kondisi ketersediaan minyak maupun produksi sekarang ini, pemerintah harus terus mendorong pemfaatan dan pengembangan gas bumi yang dimiliki. Karena produksi BBM oleh Pertamina hanya mampu mencukupi 40 persen kebutuhan dalam negeri sementara 60 persen berasal dari impor.

Langkah lain yang harus diambil oleh Presiden Joko Widodo kata dia adalah menyikat habis mafia perminyakan, dan dirinya pun mengapresiasi langkah Joko Widodo yang mengimpor langsung minyak dari Angola tanpa melalui perantara.

Selain itu, Kurtubi mendesak kepada pemerintah agar UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat liberal segera dicabut. Ia berharap kebijakan pengelolaan migas yang menyimpang di bawah SBY, dikembalikan ke jiwa UUD 1945.

Sementara itu Politisi PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan kebijakan

strategis yang diambil pemerintah Joko Widodo untuk bangsa dan negara termasuk kebijakan realokasi subsidi bahan bakar minyak merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah.

Dan PDI Perjuangan kata Hasto melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui program-programnya melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, merupakan kebijakan yang tepat sebagai alokasi subsidi BBM.

Kenaikan BBM ini langsung berimbas pada menurunnya popularitas Jokowi. Berdasarkan hasil survei itu, hanya 44,94 persen publik yang masih puas dengan hasil kerja Jokowi setelah dilantik pada 20 Oktober lalu. Adapun 43,82 persen lainnya menyatakan tak puas. Sisanya, 11,24 persen, tidak menjawab atau menjawab tak tahu.

Berdasarkan hasil survei LSI pada 24-27 Agustus lalu, kepercayaan publik terhadap Jokowi-Jusuf Kalla cukup tinggi, yaitu 71,73 persen. “Keyakinan publik yang sangat tinggi ini juga berarti tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK,” kata Peneliti LSI Rully Akbar.

Menurut dia, penurunan popularitas merupakan peringatan bagi Jokowi -JK. “Belum 100 hari pemerintahannya, hanya di bawah 50 persen publik yang menyatakan puas,” ujarnya.

Dari hasil survei, publik dengan segmen ekonomi kelas menengah-bawah paling banyak menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Jokowi, yaitu 48,52 persen. Adapun yang menyatakan puas hanya 39,60 persen. Begitu pula saat ditanyakan kepada publik berpendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah), mereka banyak menyatakan ketidakpuasannya, yaitu 55,56 persen. Adapun yang puas 33,33 persen. “Wong cilik paling banyak yang tak puas karena mereka sangat merasakan dampak harga BBM. Waktu pemilu lalu, mayoritas pemilih Jokowi justru wong cilik,” katanya. ■

JURUS SAKTI BUAT KARTU SAKTI

Oleh: Andy Abdul Hamid, Soemitro



Sebut saja namanya Prof X. Dia adalah seorang guru besar dari sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Pengabdian buat almamaternya sudah dilakukannya sejak tahun 70-an. Dia merintis pendirian Fakultas Hukum di almamaternya. Dia dan beberapa rekannya mengembangkannya menjadi salah satu fakultas hukum yang bisa diandalkan di Indonesia.

Sejak tahun 2008 an lalu dia pensiun. Namun dia tercengang ketika dia menerima pensiun pertamanya yang sekitar Rp2 juta saja. “Saya mengabdikan buat negara selama lebih dari 30 tahun lebih ini kok hanya dihargai seperti ini ya,” katanya.

Maklum, jika disejajarkan dengan dengan tingkat inflasi yang ada saat itu, nilai pensiun itu tidak bisa diandalkan untuk menopang kebutuhan hidup dia dan istrinya di hari tuanya. Apalagi, dia dan istrinya terserang penyakit yang biasanya muncul pada hari tua seperti diabetes, rapuhnya tulang dan persendian serta penurunan daya tangkap indera.

Biaya kesehatan menjadi masalah paling serius dihadapinya. “Ya, terus terang saya berharap dari pemberian bulanan anak-anak saya, meski saya tidak tega untuk meminta secara terus terang ke mereka,” tambahnya.

Mungkin Prof X adalah salah satu dari jutaan pensiunan dan jutaan orang miskin yang suaranya tidak pernah didengar negara. Padahal sesuai dengan undang-undang negara wajib melindungi warga negaranya. Dalam bahasa kebijakan, negara harus punya kebijakan perlindungan atau jaminan sosial (social security) yang mumpuni dan adil yang bisa

menjamin kesejahteraan mereka.

Dulu kebijakan jaminan sosial ditangani langsung oleh Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen. Dari tahun ke tahun, kelima badan itu selalu menjadi perbincangan terutama soal dugaan korupsi dibalik operasi mulianya. Jadi, tak salah peran besarnya dalam melaksanakan program jaminan sosial buat rakyat dipertanyakan.

Setelah Soeharto lengser pada 1998, dan industri keuangan Indonesia diliberalisasi sesuai dengan skenario liberal ala IMF. Maka keberadaan kelima badan itu mulai goyang. IMF menyaratkan bahwa kebijakan *social security* yang ada harus mengikuti skenario IMF. Artinya, tata kelola negara dalam hal jaminan sosial harus mengikuti aturan yang ditetapkan IMF.

Setelah itu, pada Desember 2002 lalu, Asian Development Bank (ADB) menggelontorkan sekitar USD250 juta untuk sebuah program “Financial Governance And Social Security Program (FGSSR)”. Itu belum tercatat beberapa komitmen pinjaman lain yang terus bergulir setelah itu.

Intinya, lewat pinjaman itu, Indonesia harus mereformasi sistem tata kelola keuangan negara dan jaminan sosial. Salah satu produk dari pinjaman ini disamping PPATK dan OJK adalah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk didalamnya UU BPJS.

Dalam skala global, rupanya bukan Indonesia saja yang dipaksa mengikuti kemauan IMF. World Bank dengan dukungan IMF, ADB, WHO, ILO, dukungan perusahaan finansial dan asuransi besar (termasuk beberapa perusahaan multinasional) sebenarnya sudah melakukannya di



Kartu Sakti. Warga menunjukkan kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Pusat Pasar Baru, Jakarta (03/11).

Amerika Latin sejak tahun 80-an lalu.

Sebuah penelitian yang dimuat di *International Journal of Health Services*, Volume 31 tahun 2001 dengan judul “*Health and Social Security Reforms in Latin America : The Convergence of The World Health Organization, The World Bank, and Transnational Corporation*” menyimpulkan bahwa yang diuntungkan dengan meliberalisasi Jaminan Sosial di beberapa negara Amerika Latin adalah perusahaan multinasional dan



perusahaan keuangan lokal. Bukan rakyat di beberapa negara Amerika Latin. "...Aetna, CIGNA, AIG, and Citibank (Citicorp) controlled large sectors of health care and pension funds in several countries by the end of the last decade," seperti tertulis dalam penelitian tersebut.

Yang menarik lagi, kalau membaca tulisan Sue L.T. McGregor, ekonom dari Mount Saint Vincent University, Halifax, Nova Scotia, Canada. Studi dan kajian Sue adalah *home economics* dan *consumer studies*. Pada 2001 lalu, dia menulis di *International Journal of Consumer Studies* sebuah artikel dengan judul "*Neoliberalism and Health Care*".

Dia memberi beberapa catatan

logis mengapa jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan perlu diliberalisasi. Memang, dalam catatan yang ada, beberapa negara liberal seperti Prancis atau Inggris memiliki sistem jaminan kesehatan yang bagus. Namun, ketika liberalisme diterapkan di negara-negara berkembang atau miskin justru tingkat *error*-nya besar.

Dengan melihat contoh Kuba atau Venezuela, tanpa liberalisasipun mereka punya sistem jaminan kesehatan yang cukup bagus juga. Tak kalah dengan negara-negara di Eropa.

Hipotesa Sue, individualisme sebagai pondasi dan akar cara berpikir neoliberalisme akan gagal

jika dipaksakan ke negara-negara yang masih mementingkan sistem kekerabatan (seperti gotong royong di Indonesia.red) dalam budaya kesehariannya.

Kartu Sakti

Dalam konteks seperti itu harusnya kita meletakkan isu di sekitar Kartu Sakti.

Presiden Jokowi meluncurkan tiga kartu sakti yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Jakarta Pusat pada 3 November lalu.

Sekadar informasi, Kartu Sakti itu adalah bagian dari program Government to Person (G2P) yakni

bantuan langsung untuk keluarga kurang mampu. Mirip sebenarnya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM yang penyalurannya secara tunai dilakukan lewat Kantor Pos. Namun bedanya, Kartu Sakti Jokowi ini penyalurannya lewat Layanan Keuangan Digital melalui kartu digital yang bisa diuangkan melalui ATM atau kantor Pos. Jadi tidak tunai.

G2P adalah sebuah salah satu program dari The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) yang berkantor di World Bank. G2P secara global didukung langsung oleh sekitar 34 lembaga bisnis dan non bisnis untuk menjamin keberlangsungan program financial inclusion di negara miskin dan berkembang. Termasuk Indonesia. *“Our mission is to improve the lives of poor people by spurring innovations and advancing knowledge and solutions that promote responsible, sustainable, inclusive financial markets,”* seperti tertulis dalam laman CGAP.

Menurut Menteri Khofifah, program itu akan ditujukan buat 1,289 juta rakyat miskin secara bertahap. Total anggarannya diperkirakan mencapai Rp 6,44 triliun yang diambil dari anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial.

Disamping itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian dana dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) buat Kartu Sakti ini. Menurut catatan *katadata.com*, sekitar 50 persen lebih atau sekitar 26 triliun alokasi itu untuk KIS dan KKS; sekitar 38 persen untuk pembiayaan infrastruktur dan sisanya untuk pertanian.

Pada hari yang sama setelah peluncuran program Kartu Sakti, Jokowi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Dia meminta seluruh Menteri, Menko,



Gubernur sampai Bupati berkordinasi agar program ini terselenggara dengan baik.

Ini jurus sakti Jokowi agar program Kartu Sakti ini bisa diimplementasikan dengan cepat meski harus diakui masih banyak kendala ketika diimplementasikan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga mengakui bahwa dalam implementasinya, program KIS ternyata hampir sama dengan BPJS. Perlu waktu dan proses agar pada suatu titik tertentu, semua kartu bisa harus diintegrasikan jadi satu kartu saja. Satu kartu Jaminan Sosial. *“Kita perlu masa transisi untuk merubah menjadi satu kartu yang terintegrasi,”* katanya beberapa saat lalu.

Yang cukup kritis terhadap program Kartu Sakti ini adalah Ketua Ombudsman, Danang Girindra Widodo. Menurut Danang, potensi kejadian maladministratif masih sangat terjadi jika dipaksakan.

Danang memiliki data, bahwa sekitar 60 pemerintah daerah di Indonesia memiliki program yang sama atau mirip dengan program Kartu Sakti Jokowi. Jika Jokowi tetap menggunakan jurus saktinya untuk memaksakan program ini maka akan terjadi *over budget*.

Data yang dimiliki Ombudsman, rata-rata pemda mengeluarkan budget sekitar Rp70 miliar sampai Rp 80 miliar setahun untuk program mirip kartu Jokowi itu. *“Negara juga menerbitkan hal yang sama. Ini menjadi redundant (hal tidak*



Foto Kiri: Presiden Jokowi beserta isteri didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek saat peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Pos Pusat Pasar Baru, Jakarta (03/11).

Foto Kanan: Warga antri untuk mendapatkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos di Jalan Baru Bogor, Senin (24/11).

berguna) yang tidak boleh diteruskan. Harus segera dihentikan mumpung belum sampai APBN 2015,” kata Danang seperti yang dituturkan ke Kompas.

Pro kontra Kartu Sakti terus melebar. Jurus sakti Jokowi kali ini harus dihadapkan pada implementasi mulai dari soal data, proses bisnis sampai *overlapping* kebijakan antara pusat dan daerah.

Namun, esensi masalah Kartu Sakti yakni liberalisasi kebijakan *social security* tidak pernah tersentuh atau disentuh oleh publik. Prof James Petras, Guru Besar Departemen Sosiologi di Binghamton University, New York pada Desember 2012 lalu pernah menulis bahwa kebijakan *social security* di AS adalah “The Great Social Security Robbery”. Prof

Petras melihat publik di AS yang berharap banyak pada kebijakan *social security* di AS ternyata tidak tahu bahwa mereka justru menjadi sapi perah negara dan kapitalisme. “For decades only a small fraction of Social Security contributions are used to pay recipients, the bulk is transferred into the general treasury to pay for current expenditures – mostly hundreds of billions of dollars in war spending, payments on bonds and T-notes; subsidies to agro-business, bailouts to Wall Street speculative investment banks and other elite economic interests,” katanya.

Ya memang esensi dari meliberalkan kebijakan *social security* seperti *report* yang dikeluarkan PBB adalah melakukan proses *underwriting* rakyat miskin. “Underwrite the poor like we underwrote the banks,” begitu

proposal PBB ketika meminta agar dibentuk sebuah badan baru yang bernama “Global Fund for Social Protection”. Lebih ditel, coba baca *Briefing Notes* yang dikeluarkan PBB pada 7 Oktober 2012 yang berjudul “Underwriting the Poor A Global Fund for Social Protection”.

Memang semangat Presiden Jokowi dan negara untuk menyejahterakan rakyat harus didukung terus. Apalagi ketika menyentuh hal paling vital yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial orang miskin.

Namun, politisi, intelektual, cendekiawan dan publik juga harus terus mengingatkan bahwa meliberalkan kebijakan *social security* itu tidak selamanya menguntungkan rakyat. Karena tidak semua keuntungan dari proses bisnis Kartu Sakti itu sepenuhnya atau 100 persen dikembalikan lagi buat rakyat. Negara juga tidak pernah menjamin bahwa keuntungan dari liberalisasi *social security* seluruhnya akan disalurkan buat rakyat.

Ini seharusnya yang menjadi titik tolak untuk mengawasi dari waktu ke waktu apakah jurus sakti Jokowi buat Kartu Saktinya benar-benar bermanfaat besar buat rakyat.

Perlu kontrol kuat agar Kartu Sakti ini bisa menunjukkan kesaktiannya... 📌

Anatomi Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019

Oleh: Hendrajit

Menelisk latar belakang dan profil para anggota kabinet kerja Jokowi-JK sama sekali tidak mencerminkan jiwa Trisakti sebagaimana jargon yang dikumandangkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pada masa kampanye pilpres. Sejatinya Trisakti adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Sayangnya, formasi kabinet yang seharusnya mencerminkan skema dan strategi kepemimpinan nasional Jokowi yang berjiwa Trisakti, pada kenyataannya justru merupakan kontra skema terhadap Trisakti.

Di Sektor Perekonomian

Mari kita mulai menelisk di pos strategis bidang ekonomi. Pada pos ini, setidaknya ada beberapa sosok yang punya reputasi sebagai ekonom berhaluan neoliberal, atau setidaknya rentan terhadap orbit pengaruh para ekonomi neoliberal.

Pertama, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Menelisk profil maupun laterbelakangnya, Putra kelahiran Aceh 23 September 1953 ini boleh dibilang “orang dekat” Wakil Presiden Jusuf Kalla. Lebih daripada itu, melihat serangkaian studinya di Amerika Serikat, Sofyan Djalil nampaknya tidak berlebihan jika dipandang sebagai *Man Power* yang sudah lama dipiapkan untuk mewakili skema ekonomi neoliberal di tanah air.

Bukan sebagai ekonom, melainkan sebagai pakar hukum dan diplomasi yang menyiapkan seperangkat perundang-undangan

dan peraturan hukum yang ditujukan untuk membuka pintu kepentingan-kepentingan korporasi global Amerika untuk menguasai sektor-sektor strategis dalam perekonomian nasional kita. Misalnya pada masa pemerintahan transisi dari era Suharto ke reformasi di bawah Presiden BJ Habibie, Sofyan Djalil tercatat sebagai salah seorang staf ahli Menteri Negara BUMN Tantri Abeng yang menyusun konsep Privatisasi/Swastanisasi BUMN.

Kenyataan sejak lulus dari program studi Hukum Bisnis pada 1984, Djalil kemudian meraih gelar Master of Art dari Graduate School of Arts and Sciences Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat pada 1989. Menariknya, pada 1991 Djalil juga meraih gelar master namun kali ini dibidang hukum dan diplomasi dari The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat Dan dua tahun kemudian, pada 1993 Djalil meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) dari perguruan tinggi yang sama.

Secara analitis yang harus disorot adalah keberhasilannya diterima untuk studi di The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat. Karena bagi kalangan di Amerika sendiri, diterima di perguruan tinggi ini berarti masuk kategori “orang-orang terpilih.” Sehingga siap dijadikan kader-kader yang menegara di lembaga-lembaga strategis negara Paman. Sehingga alumni perguruan tinggi tersebut yang berasal dari negara lain seperti Menko Ekonomi Sofyan Djalil, tentunya sudah berada dalam radar



pengawasan dan pembinaan kalangan pengambil keputusan strategis di Washington, Bank Dunia dan IMF.

Kedua, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Meski jabatan puncak terakhir Bambang semasa pemerintahan SBY adalah Wakil Menteri Keuangan, tak berlebihan jika Bambang mencerminkan kesinambungan kebijakan strategis keuangan pemerintahan SBY yang sejatinya berhaluan neoliberal dan patuh pada inti dari Washington Consensus.

Sedikit berbeda dengan Sofyan Djalil yang nampaknya lebih disiapkan sebagai konseptor hukum ekonomi yang mewakili para penentu kebijakan strategis perekonomian



Rapat kabinet kerja. Presiden Jokowi memimpin rapat pertama Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta (27/10). Rapat yang langsung diadakan usai pelantikan menteri ini diantaranya membahas program kerja dan koordinasi antar menteri.

global di Washington, jika menelisis program studi lanjutannya setelah S-1, Bambang nampaknya secara sistematis dan terencana dipersiapkan untuk menata dan mengorganisasikan skema ekonomi neoliberal pada tataran manajemen.

Pria kelahiran 3 Oktober 1966 ini, lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1990, yang kemudian melanjutkan program S-2 dan S-3 di University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Bidang studi yang ditekuninya adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Sehingga sejak meraih gelar doktor bidang ekonomi, Bambang punya reputasi sebagai pakar ekonomi khususnya

terkait Desentralisasi Wilayah dan Pembangunan Perkotaan.

Dari jaringan dan relasi yang terbentuk dalam komunitas internasional, Bambang praktis merupakan ekonom yang rentan berada dalam orbit pengaruh skema ekonomi neoliberal baik Amerika Serikat maupun Jepang. Bambang tercatat pernah menjadi Ketua dalam program Formulasi Sistem Rencana Pembangunan yang disponsori oleh JICA (Japan International Cooperation Agency), yang mana seperti halnya USAID (United States Agency for International Development), seringkali merupakan perpanjangan tangan dari politik luar negeri Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, Bambang pernah dipercaya sebagai Ketua Program Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dutch Trust Fund, yang disponsori oleh Bank Dunia. Juga dengan mitra yang sama, Bambang menjadi Ketua Program Formulasi Institusi Transfer antar pemerintah di Indonesia.

Yang lebih menarik lagi, pada perkembangannya merupakan *contact person* Jepang di Indonesia. Terbukti dengan diberi kepercayaan sebagai Ketua Program Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia, yang disponsori oleh JICA. Fakta ini membuktikan bahwa Bambang dipandang sebagai kader terpercaya

Jepang terkait penanganan kebijakan strategis perekonomian yang melibatkan kerjasama bilateral kedua negara. Apalagi ketika Bambang juga mendapat kepercayaan sebagai Tenaga Ahli Badan Penasehat untuk Otonomi Wilayah yang disponsori oleh Asian Development Bank (ADB). Maupun dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Nasional untuk Desentralisasi di Indonesia, juga atas sponsor ADB. Sekadar informasi, ADB ini meski resminya beranggotana banyak negara di kawasan Asia Pasifik, namun pemain kunci dan penentu kebijakan strategis ADB adalah Jepang.

Dengan kata lain, dalam mengamankan tetap berlangsungnya penerapan Skema Ekonomi Liberal seperti halnya di era pemerintahan SBY antara 2004-2014, posisi Bambang sebagai Menteri Keuangan merupakan integrator bersatunya aliansi strategis AS-Uni Eropa-Jepang sebagaimana yang sudah dirajut oleh David Rockefeller pada 1973 melalui terbentuknya Trilateral Commission.

Lantas bagaimana halnya dengan Rini Soemarno sebagai Menteri Negara BUMN? Sejak Rini dipercaya oleh Presiden Megawati sebagai menteri perdagangan pada 2002-2004, Rini praktis telah berfungsi sebagai “Pemain Samping Serba Guna” yang kewenangan strukturalnya sebagai menteri. Tipologi sosok dirinya sebagai seorang *lobbyist* dan *arranger*, seringkali Rini ditugasi peran sebagai pemain sentral dalam serangkaian kerjasama dengan beberapa negara, yang mengharuskan adanya terobosan diplomatik lewat “pintu belakang.” Seperti dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi Rusia, maupun yang di era pemerintahan Jokowi-JK sekarang, memprakarsai kerjasama dua BUMN kita PT Kereta Api Indonesia dan PT Jasa Marga, dengan China International Fund (CIF).

Kalau dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi pada era pemerintahan Megawati dipandang telah menabrak UU Pertahanan, maka dalam kasus kerjasama dengan CIF ditengarai telah terjadi kesepakatan-kesepakatan



Demo Tolak BBM Naik dan Antek Neolib. Pengunjuk rasa mengenakan topeng Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri ESDM Sudirman Said, Meneg BUMN Rini Soemarno serta Menteri Perekonomian Sofyan Djallil, sambil membawa keranda mayat saat menggelar aksi di depan Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (27/11/2014)

tertutup dan tidak transparan, yang mendahului penandatanganan MOU antara pihak Indonesia dan Cina.

Sehingga manuver Rini Soemarno terkait kerjasama Indonesia-Cina berdasarkan skema CIF, dipandang tidak strategis dan bukan dengan pertimbangan untuk menciptakan keseimbangan baru di tengah menguatnya dominasi dan pengaruh AS dan Uni Eropa di sektor-sektor strategis perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, manuver yang beraroma misterius tersebut, malah akan menyeret Indonesia berpindah dari “mulut macam ke mulut buaya.”

Dari rangkaian pengalaman kerja Rini, ada benang merah yang cukup menarik untuk dicermati. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat pada 1981, catatan seputar aktivitas Rini antara 1981-1988 praktis hilang dari radar pengawasan. Dalam analisis intelijen, fakta ini mengindikasikan sesuatu yang disembunyikan. Atau bisa juga, karena ada kegiatan-kegiatan tersamar dalam periode tersebut. Berkembang informasi bahwa pada masa itu, Rini tercatat pernah menjadi staf pada Kementerian



Kuangan Amerika Serikat.

Kedua, ketika karirnya mulai tercatat pada 1989, Rini tercatat sebagai General Manager Finance Division, PT Astra International. Pada 1995, setelah diselingi oleh pengalaman kerja di beberapa tempat, kembali tercatat sebagai Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari. Bahkan pada 1990-1998, dipercaya sebagai Direktur Keuangan PT Astra International. Dan pada 1998-2000, Presiden Direktur Astra International.

Yang menarik dari serangkaian jabatan strategis di lingkungan Astra International, bukan pada fakta bahwa ada kedekatan antara Rini dan Jepang. Melainkan sebuah fakta menarik bahwa Rini berarti ada kedekatan dan koneksi yang luas dengan jaringan para pebisnis Cina yang berada dalam

orbit beberapa pengusaha seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Sofyan Wanandi, dan beberapa pengusaha Cina yang tergabung dalam jaringan Yayasan Prasetya Mulya.

Karena Yayasan Prasetya Mulya yang notabene merupakan wujud dari kekuatan konglomerasi Cina di Indonesia pada era pemerintahan Suharto, telah mengambil-alih mayoritas kepemilikan saham dari tangan Willem Suryajaya.

Inilah sisi rawan dari pemerintahan Jokowi-JK. Fungsi Rini sebagai "Pemain Samping Serba Guna" pada perkembangannya telah menjadi *arranger* yang mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan strategis konglomerat-konglomerat Cina dan bahkan juga debitur BLBI, dengan Ketua Umum

PDIP Megawati.

Di Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Jokowi menunjuk Sudirman Said sebagai menteri. Pria Kelahiran 16 April 1963 ini, merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Sekolah atas biaya negara berdasarkan ikatan dinas pada 1990.

Meski bukan penganut paham ekonomi neoliberal yang cukup kental seperti halnya rekan-rekannya dari UI dan lulusan Amerika Serikat lainnya, namun lingkup pergaulannya yang dekat dengan Kuntoro Mangkusubroto dan ekonom Sri Mulyani Indrawati, nampaknya cukup rentan untuk berada dalam skema ekonomi neoliberal di bawah panduan skema Washington Consensus.

Memang benar, jika menelisik lingkup pergaulannya sebagai aktivis anti korupsi dan pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), membuat kedekatan dirinya dengan beberapa tokoh seperti Erry Riyana, Mar'ie Muhammad, Todung Mulya Lubis dan sosiolog UI Dr Imam Prasodjo.

Lepas dari fakta bahwa kedekatan Sudirman Said dengan para figur publik tersebut karena kegiatannya yang intensif sebagai aktivis anti korupsi, tak bisa dibantah bahwa Sudirman Said berada dalam orbit pengaruh klan politik yang berhaluan Neoliberal.

Alhasil, seperti halnya juga dengan rekan-rekannya yang duduk dalam pos perekonomian kabinet kerja Jokowi-JK, Sudirman Said diyakini akan tetap meneruskan kebijakan strategis tata kelola Migas yang bertumpu pada skema Washington Consensus. Yaitu tetap mempertahankan ketergantungan impor Migas Indonesia pada negara asing, dan bahkan akan mengembangkan swastanisasi migas di sektor hilir kepada pihak asing, menyusul keberhasilan pihak asing dalam menswastanisasikan migas di sektor Hulu melalui payung hukum UU Migas 22/2001. Sehingga praktis Pertamina sebagai produsen minyak, telah dilumpuhkan dari dalam.

UU Migas 22 meski diberlakukan

pada 2001, namun menurut informasi yang telah terkonfirmasi, draf RUU Migas sebenarnya sudah disusun di Washington sejak 1997. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, rasanya masuk akal jika ditarik kesimpulan bahwa penempatan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM tentunya ditujukan untuk mengamankan, dan bahkan memantapkan skema Neoliberal tersebut secara lebih solid.

Melihat lingkup pergaulan dan perkawanannya melalui beberapa aktivitasnya terdahulu, seperti kedekatannya dengan Kuntoro Mangkusubroto dan Sri Mulyani, nampaknya Sudirman merupakan mata-rantai penting sekaligus representasi kesinambungan pemerintahan SBY di era pemerintahan Jokowi-JK.

Di Sektor Polkam

Nah, terkait keputusan Jokowi menunjuk Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum Keamanan, ada sebuah cerita yang cukup menarik. Semula, Megawati sebagai ibu suri PDIP, sudah mantap akan memasang mantan KSDAD Ryamizard Ryacudu sebagai Menko Polhukam. Sedangkan Menteri Pertahanan bisa diajukan nama lain.

Namun tiba-tiba, ada masukan dari seorang paranormal yang cukup dekat dengan Megawati dan Tjahyo Kumolo, agar Ryamizard sebaiknya dipasang sebagai Menteri Pertahanan. Karena di pos ini, perlu orang kuat dan berjiwa NKRI. Sedangkan untuk Menkopolhukam, cukup dipasang sosok yang tidak terlalu kuat, tapi cukup sabar. Maka kemudian, muncullah nama Tedjo Edhy untuk jabatan Menko Polhukam. Sedangkan Ryamizard dipasang sebagai Menteri Pertahanan.

Benar tidaknya informasi seorang paranormal orang dekat Mega tersebut yang disampaikan langsung kepada penulis, memang bisa benar bisa juga tidak. Yang jelas, kenyataannya memang seperti itu formasinya. Tedjo Edhy meski direktur melalui Partai Nasdem, salah satu unsur koalisi



Indonesia Hebat (KIH), namun secara personal Tedjo Edhy merupakan rekomendasi dan restu dari mantan Panglima TNI Wiranto. Pria kelahiran Magelang 20 September 1952 ini, pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pada 2008-2009. Kenyataan bahwa Tedjo merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut 1975,

kiranya harus dibaca adanya jalinan halus dengan para perwira militer yang dari generasinya mantan Presiden SBY yang lulusan Akabri 1973. Sebagaimana tradisi di kalangan perwira militer, biasanya para perwira senior punya kedekatan dengan para perwira juniornya dua angkatan di bawahnya.

Dari sekelumit kisah penempatan



(Foto Atas) Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Kepala BPKP Mardiasmo (kiri) dan Seskab Andi Widjajanto (tengah) sebelum mengikuti pengarahannya Presiden Joko Widodo kepada pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11).

(Foto Bawah) Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kiri) dan Jaksa Agung Prasetyo (kanan) sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11).

Tedjo Edhy maupun Ryamizard, bisa disimpulkan dalam dua makna. Pertama, bisa jadi diplotnya Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan dimaksudkan agar pos kementerian pertahanan itulah yang justru harus diperkuat. Namun dari sisi lain, bisa juga dengan penempatan Tedjo Edhy justru merupakan sebuah skema untuk membendung pengaruh Ryamizard di pos kementerian pertahanan.

Melihat formasi di sektor Polkam ini memang menarik, apalagi terjadi

instabilitas politik yang mengarah pada vakum kekuasaan. Jika skenario pelengseran Jokowi terjadi, yang kemudian disusul dengan tampilnya Jusuf Kalla sebagai presiden pengganti, memang hal ini sudah banyak diprediksi berbagai kalangan sebagai sebuah kemungkinan yang bakal terjadi.

Namun bagaimana dengan skenario triumvirat Menhan-Menlu-Mendagri? Lepas dari kemungkinan semacam ini masih susah dibayangkan, namun paranormal orang dekat Mega tersebut sempat memaparkan kemungkinan ini kepada penulis. Menurut dia, hal ini sudah dalam perhitungan Megawati. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, dan negara dalam keadaan vakum kekuasaan, maka tiga menteri tersebut akan bisa memainkan peran. Dan dalam perhitungan Mega, Mendagri Tjahyo Kumolo dan Menhan Ryamizard Ryacudu merupakan kartu truf Megawati.

Dalam skenario terburuk vakum kekuasaan, Mendagri dan Menhan berada di tangan Megawati. Dan biasanya, dalam situasi politik yang krusial semacam itu, Menlu biasanya ikut arus dan tren politik yang berkembang. Alias ikut ke mana arah angin berhembus.

Apakah hal semacam ini bisa dijalankan semudah itu dalam penerapannya nanti, entahlah. Yang jelas, bayangan semacam ini memang ada di benak kubu Jokowi. Yang tentunya hal ini sekaligus juga untuk mengantisipasi kemungkinan skenario pelengseran Jokowi namun didasarkan gagasan untuk memunculkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Presiden pengganti Jokowi.

Membaca adanya skenario semacam ini, maka meski posisi menlu hanya faktor pelengkap, namun hal ini berarti penunjukan Retno Lestari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri mustahil jika sekadar asal pilih. Pastinya juga sudah dalam pertimbangan dan perhitungan strategis.

Jika menelisik karir awalnya sebagai diplomat yang ditempatkan

di luar negeri, ada sebuah benang merah yang cukup menarik. Pada 1997-2001, Retno mengawali karir diplomatiknya sebagai Sekretaris Satu bidang ekonomi Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Retno ditunjuk sebagai Direktur Eropa dan Amerika. Bahkan kemudian, pada 2003, Retno mendapat promosi sebagai Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri.

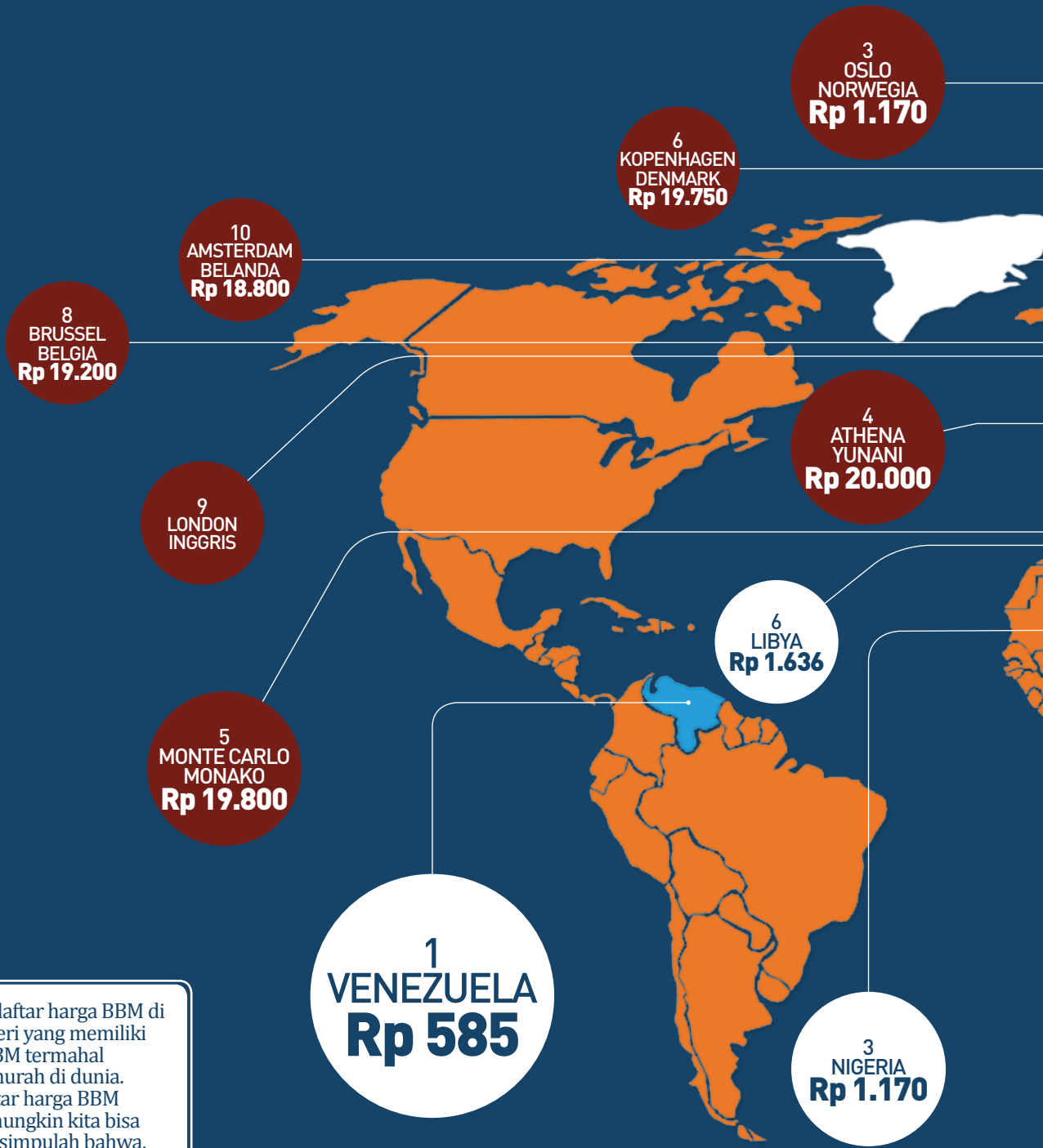
Nampaknya, Belanda menjadi tempat menyiapkan Retno sebagai pemain kunci untuk menyatukan kepentingan strategis Amerika dan Eropa Barat. Karena sesudah dipromosi sebagai Direktur Eropa Barat, Retno tak lama kemudian meraih gelar S2 hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belanda.

Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama masa tugasnya, ia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011, menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Selain itu, ia juga sempat mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo. Sebelum masa baktinya selesai, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika.

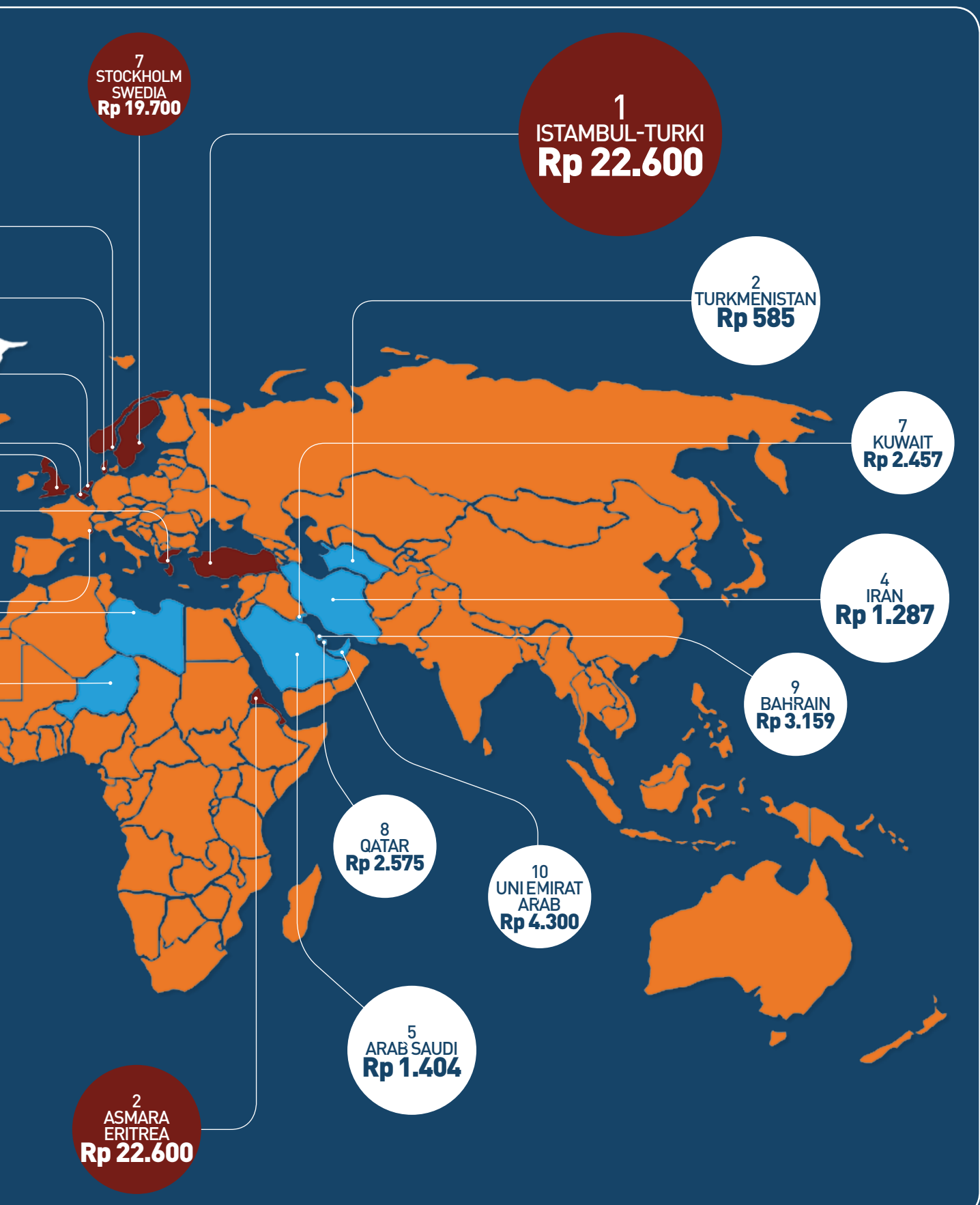
Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM (Asia-Europe Meeting) dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation).

Jelaslah sudah, bahwa penunjukan Retno sebagai Menteri Luar Negeri tidak sesederhana seperti terlihat di permukaan. Dalam situasi Indonesia yang normal ataupun dalam keadaan vakum kekuasaan negara, Retno merupakan representasi hajat Amerika Serikat dan Eropa Barat di Indonesia. Catatan karir diplomatiknya, telah berbicara dengan sendirinya. ■

PERBANDINGAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERMURAH DAN TERMAHAL DI 20 NEGARA



Itu tadi daftar harga BBM di luar negeri yang memiliki harga BBM termahal dan termurah di dunia. Dari daftar harga BBM di atas mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa, harga BBM di negara kita memiliki tingkat harga yang relatif cukup murah. 🇮🇩



7
STOCKHOLM
SWEDIA
Rp 19.700

1
ISTAMBUL-TURKI
Rp 22.600

2
TURKMENISTAN
Rp 585

7
KUWAIT
Rp 2.457

4
IRAN
Rp 1.287

9
BAHRAIN
Rp 3.159

8
QATAR
Rp 2.575

10
UNI EMIRAT
ARAB
Rp 4.300

5
ARAB SAUDI
Rp 1.404

2
ASMARA
ERITREA
Rp 22.600

JURUS SAKTI JOKOWI DI SEKTOR ENERGI

Penghapusan Subsidi BBM hanya merupakan langkah awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membenahi sektor energi. Sederet rencana panjang telah disusun sejak pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang Pilpres Juli lalu.

Di bawah kendali Ketua Pokja Energi Tim Transisi, Ari Soemarno, pemerintah membuat *roadmap* dan *timeline* yang terbagi atas lima permasalahan besar. Mulai dari pemberantasan mafia migas hingga skema pembubaran Petral.

Berikut penjabaran *roadmap* dan *timeline* tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari Pokja Tim Transisi.

KEDAULATAN - KEMANDIRIAN - KETAHANAN ENERGI

Upaya untuk mengurangi ketergantungan BBM dalam bauran energi nasional lambat.

AKAR MASALAH

1. Harga keekonomian selalu dibandingkan dengan harga keekonomian BBM, apalagi dengan BBM bersubsidi;
2. Konversi BBM ke Gas tidak terkoordinasi dengan baik (persaingan antar BUMN). Penugasan pemerintah ke BUMN tersebut tidak tegas;
3. KEN (Komisi Ekonomi Nasional) belum di PP-kan sehingga belum ada detail *roadmap* dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 5 tahunan untuk mencapai bauran energi 23 persen nonfosil pada tahun 2025.

REKOMENDASI TAMBAHAN (TENGGAT WAKTU)

1. Meevaluasi serinci mungkin dan memperbarui data potensi sumber daya panas bumi berikut cadangannya (1-6 bulan),
2. Memprogramkan konversi BBM ke Gas secara terarah, terpadu dan terpimpin. Program selesai (1-3 bulan),
3. Pilot Project : Konversi BBM - BBG transportasi umum Jabodetabek program lintas sektoral transportasi, ESDM, Pemda, BUMN Migas, Pemangku kepentingan lain. Merealisasikan *pilot project* BBG untuk transportasi umum, logistik darat, dan kendaraan pemerintah (6 bulan),
4. Membuat skema bisnis bioenergi yang dapat disepakati oleh semua *stakeholder* (pemerintah - Pertamina - pengusaha) dengan titik berat ketegasan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan skema program (12 bulan),
5. Menetapkan kebijakan khusus pengembangan aneka EBT (Energi Baru Terbarukan) ; air, surya, angin, biomassa, dll, sesuai dengan *cost effectiveness* dan potensi lokal yang ada (1-6 bulan),
6. PP tentang KEN segera disahkan agar segera RUEN yang berisi *roadmap* diversifikasi energi dapat disahkan (12 bulan)

MENGATASI ANCAMAN KRISIS LISTRIK

Ancaman krisis listrik yang tidak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 7 persen dan tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2019.

AKAR MASALAH

- Banyak proyek-proyek kelistrikan (pembangkitan, transmisi, gardu induk, distribusi) terlambat selesai.

REKOMENDASI TINDAKAN (TENGGAT WAKTU)

1. *Monitoring* dan *debottlenecking* oleh pemerintah untuk penyelesaian 3.058 MW program 10.000 MW agar segera beroperasi untuk mengatasi krisis sekaligus pengurangan penggunaan BBM. (1 bulan),
2. Percepatan pembangunan PLTGU Grati, Muara Tawar, Muara Karang, Tanjungpriok dan lokasi lain minimal 1.800 MW dengan mengalokasikan gas yang diperlukan untuk mengatasi krisis listrik Jawa-Bali 2016 pada saat beban puncak (3 bulan),
3. Crash program untuk penyelesaian proyek investasi pembangkit dan transmisi, baik oleh PLN maupun IPP 2015 (2.838 MW), 2016 (5.948 MW), 2017 (5.459 MW), 2018 (10.627 MW), 2019 (9.154 MW) dan transmisi 40.000 kms (3-6 bulan),
4. Penuntasan renegotiasi kontrak (PPA) geothermal (PLTP) sekapasitas 2.290 MW yang tersebar di 34 lokasi dan IPP (3 bulan),
5. Implementasi PLTU batubara mulut tambang di Kalimantan dan Sumatera untuk industrialisasi setempat, sekaligus mengatasi krisis listrik Jawa-Bali dengan penyaluran melalui kabel laut (3-6 bulan),
6. Reformasi, restrukturisasi tata kelola kelistrikan termasuk PLN untuk memperkuat kemampuan finansial dan percepatan pembangunan,
7. Penerapan tarif listrik regional untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (3-6 bulan),
8. Penggunaan energi surya, mikro hidro dan energi terbarukan yang tersedia dilokasi penugasan kepada PLN melalui APBN/APLN/IPP (3-6 bulan).

REFORMASI SUBSIDI ENERGI (BBM, LPG DAN LISTRIK)

Subsidi energi dapat meningkat setiap tahun membebani APBN dan tidak menurunkan angka kemiskinan.

AKAR MASALAH

1. Berlaku subsidi umum terhadap komoditas BBM, Gas dan listrik dan bukan subsidi yang ditargetkan pada orang (*not targeted subsidy*),
2. Migas : Disparitas harga yang tinggi di antara BBM dan LPG bersubsidi dengan non subsidi, menyebabkan penyalahgunaan migas sehingga memicu peningkatan pemakaian dan pembengkakan nilai subsidi akibat distribusi terbuka dengan sistem penjualan bebas,
3. Listrik : Subsidi listrik yang sekarang berlaku untuk golongan tertentu masih didasarkan pada besaran KWH dan tidak ada pembatasan.

REKOMENDASI TINDAKAN (TENGGAT WAKTU)

1. Penerapan kartu prabayar (bekerjasama dengan Bank BUMN) untuk penggunaan BBM bersubsidi, sehingga memungkinkan pembatasan volume BBM bersubsidi secara otomatis untuk masing-masing kendaraan, dengan catatan: pembelian BBM non subsidi tidak dibatasi (3-6 bulan),
2. Realokasi subsidi solar menjadi LPG bagi nelayan. Target 600.000 nelayan pengguna solar (rata-rata 8 liter/nelayan/hari atau total senilai Rp 36 miliar/hari atau Rp 13 triliun/tahun. Biaya *converter kit* per nelayan Rp 12 juta atau total investasi pemerintah sekitar Rp 7,2 triliun (24 bulan),
3. Penggunaan kartu prabayar untuk subsidi listrik bagi rumah tangga miskin, sehingga penggunaan listrik subsidi bisa terkendali. Catatan: sekaligus juga dilakukan pengalihan subsidi energi listrik (KWH) kepada subsidi tunai listrik bagi golongan orang tertentu. (3-6 bulan),
4. Penerapan distribusi LPG subsidi tertutup dan mencatu 2-3 tabung jatah per keluarga per bulan dengan pemberlakuan kartu kendali elektronik bagi keluarga berpenghasilan rendah yang berhak (3-6 bulan),
5. Penerbitan PP tentang pengaturan subsidi tertutup atas migas sebagai payung hukum reformasi (3 bulan).

KEDAULATAN – KEMANDIRIAN – KETAHANAN ENERGI

Kedaulatan dan ketahanan energi Indonesia semakin melemah

AKAR MASALAH

- Pola pikir/tujuan dasar pengelolaan SDA energi selama 40 tahun terakhir ini adalah guna memaksimalkan penerimaan negara dalam membiayai belanja APBN. Ketidakefektifan pengelolaan SDA, membuat pengembalian dana bagi pengembangan infrastruktur dan peningkatan kemampuan industri energi nasional semakin terbatas. Sehingga infrastruktur dan kemampuan nasional pun semakin jauh tertinggal dan memprihatinkan. Padahal energi merupakan komoditas strategis yang menguasai hajat hidup semua orang dan penunjang utama kegiatan ekonomi. Ketergantungan pada sumber daya finansial dan teknologi asing pun semakin besar sehingga membahayakan kedaulatan dan kemandirian energi.

REKOMENDASI TINDAKAN (TENGGAT WAKTU)

1. Mengubah paradigma semua regulasi yang terkait energi dari SDA energi sebagai sumber penerimaan negara, menjadi modal dasar penguatan industri energi nasional untuk menjamin ketahanan energi, BUMN dibebaskan dari kewajiban membayar dividen dalam 10 tahun mendatang, sehingga bisa berkemampuan optimal dalam mengembangkan usaha,
2. Seluruh PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari SDA energi dikembalikan untuk memperkuat ketahanan energi nasional (6 bulan).

PEMBERANTASAN MAFIA MIGAS

Pengaruh mafia migas di sector hulu dan hilir migas terus berlangsung dan makin meluas.

AKAR MASALAH

- Mafia migas adalah para pemburu rente yang memiliki kedekatan dan pengaruh pada para pejabat tinggi pengambil keputusan, sehingga membuat produksi migas tidak optimal, inefisien. dan ekonomi biaya tinggi pada penyediaan BBM dan mata rantai pasok gas. Hal tersebut juga difasilitasi oleh kelemahan peraturan/legislasi yang berlaku.
 - b. Distributor/agregator gas : PGN dan Pertagas, BUMD hanya dapat diberikan alokasi untuk penggunaan di daerahnya saja tetapi tidak untuk daerah lain,
 - c. Penyalur gas antara distribusi/aggregator ke konsumen hanya diperkenankan satu lapis dan hanya kepada yang mempunyai fasilitas/infrastruktur.
- 5. Pembelian/impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina dengan cara lebih transparan. Jangka menengah, Pertamina diminta memperkuat fasilitas/infrastruktur hingga tak dapat didikte lagi oleh pasar. Catatan : Pertamina adalah pembeli dengan skala besar,. Selayaknya, Pertamina juga mendapat 'leverage' besar terhadap pasar, berupa perolehan harga terbaik. (1 bulan),

REKOMENDASI TINDAKAN (TENGGAT WAKTU)

1. Membekukan Petral dan mengalihkan kegiatannya ke Kantor Pusat Pertamina dibawah organisasi *integrated supply chain* (ISC) yang telah direformasi dan melapor langsung ke Dirut Pertamina (1 bulan),
2. Perubahan regulasi/aturan penawaran dan penetapan wilayah kerja (WK) migas baru, agar tender WK baru tidak memungkinkan lagi broker mendapatkan WK untuk diperjualbelikan (1 bulan),
3. Penerbitan Peraturan Regulasi/aturan yang mewajibkan ada penentuan keputusan secara transparan dan akuntabel jauh hari sebelum WK berakhir, guna memastikan investasi dalam memproduksi migas tetap bisa berlangsung seoptimal mungkin. (1-3 bulan),
4. Penetapan alokasi gas diberikan hanya kepada pembeli yang berhak (*eligible buyers*), yaitu : (1-3 bulan)
 - a. Pengguna akhir : K3S atau Pertamina untuk penggunaan lapangan, kilang Pertamina, pembangkit PLN, bahan baku pupuk dan industri besar lainnya,
6. Pertamina diwajibkan melakukan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari pusat-pusat kilang yang berkapasitas lebih, seperti India, Korea, Jepang, Middle East. Sehingga tidak tergantung dari kilang Singapura (1 bulan),
7. Peningkatan kapasitas tangki/terminal penerimaan minyak mentah, BBM dan LPG Pertamina hingga mencapai total kapasitas 30 hari konsumsi (program selesai 2 bulan, pelaksanaan selesai 1 bulan),
8. Melaksanakan proyek penambahan kapasitas kilang 400.000 – 800.000 bph dengan ekspansi dan modernisasi eksisting maupun pembangunan kilang baru. (*Project structure* selesai 12 bulan. Pelaksanaan selesai 5 tahun).

Tanda Jadi Negara Kiri

Oleh: Ismed Eka, Dhanu, Novrizal

Angola, negara di bagian Barat Daya Afrika, Jumat (31/10) menjadi negara pertama yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Malam itu Presiden melalui PT Pertamina sepakat menjalin kerjasama dengan Sonangol EP, perusahaan minyak milik Angola untuk pembelian minyak mentah sebanyak 100 ribu barel (bbl). Kerjasama ini ditandatangani kurang dari satu minggu setelah Jokowi membentuk Kabinet Kerja.

Kesepakatan antara Indonesia dengan negara berhaluan politik komunis tersebut dituangkan dalam Framework Agreement yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Chairman of Board of Director Sonangol EP Francisco de Lemos Jose Maria yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Republik Angola Manuel Domingos Vicente. Kerjasama kilat tersebut tidak mungkin terjadi tanpa ada campur tangan Ketua Umum Partai nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.

Surya yang menawarkan kepada Jokowi untuk menjajaki kerjasama antar Negara dengan Angola guna mendapatkan minyak mentah murah. Usulan tersebut dikatakan setelah Jokowi gagal melobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM diujung masa kepemimpinannya. “Kerjasama ini terjalin sebagai wujud dari hubungan baik yang telah terjalin erat antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Angola. Pertamina siap merealisasikan kerjasama ini sekaligus sebagai

milestone bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis utamanya di sektor minyak dan gas bumi. Kami bersama mitra akan bersama-sama menggali berbagai potensi proyek, baik proyek hulu minyak dan gas bumi di Angola, Indonesia maupun di negara lain, maupun proyek pembangunan kilang yang sangat diperlukan Indonesia untuk menjamin ketahanan energi nasionalnya,” kata Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen.

Sonangol dibawa ke Indonesia melalui Sam Pa yang merupakan kongsi lamanya Surya Paloh.

Tahun 2009, Surya Energi dapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana USD200 juta ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu. Surya Energi sendiri adalah pemilik 75% saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Kabar tersebut langsung dibantah oleh Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto. Ia menyebut tidak ada peran Surya dalam kerjasama Pertamina dengan Sonangol. “Enggak itu ada pada dasarnya. Karena ini G to G, Indonesia dan Angola, ke bawahnya ada bussines to bussines, antara Sonangol dan Pertamina,” ujar Andi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (3/12).

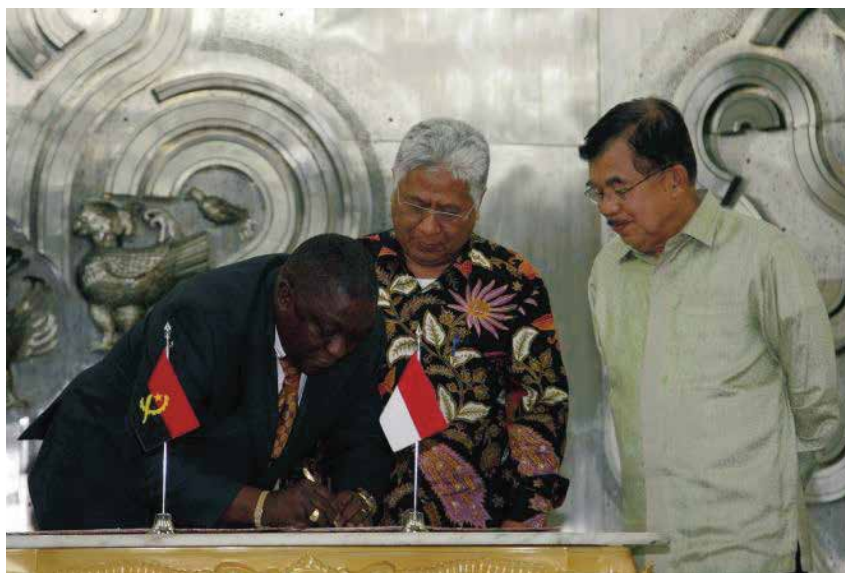
Andi mengklaim pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dengan adanya kerjasama tersebut. “Dilihat aja nanti kedua BUMN ini Sonangol dan Pertamina lakukan kerja samanya. Kalau saya ditanya, siapa saja yang



dilibatkan, dan siapa tradernya, tidak ada satu pun yang bisa jawab karena antara Pertamina dan Sonangol lagi berunding. Saya tidak tahu isunya dari mana, kemudian ada kekhawatiran a,b, c dan membawa nama Surya Paloh,” tegas Andi.

Angola merupakan Negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang pada tahun 2013 lalu memproduksi minyak dan kondensat sejumlah 1,8 juta barel per hari. Sejak tahun 2002, pertumbuhan produksi minyak Angola mencapai rata-rata 15% per tahun yang disokong oleh lapangan-lapangan *deepwater*.

Pemilik saham mayoritas China Sonangol yakni Sam Pa adalah kenalan lama Surya dalam



membangun gurita bisnis. Sam Pa awalnya menjanjikan diskon sebesar USD 15 bbl di bawah harga pasar dengan pembelian 100 ribu barrel per hari. Namun belakangan diskon tersebut urung diberikan (Red-Lihat dokumen). Berbagai kalangan menilai kerjasama impor minyak dengan diskon USD15 bbl telah melakukan pembohongan publik. Peralnya Sonangol membantah

Perjanjian Kerja Sama. Administrator of Sonangol EP Mateus Neto (kiri) menandatangani perjanjian kerja sama (MoU) disaksikan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla (kanan) dan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan CEO Pertamina Muhamad Husen.

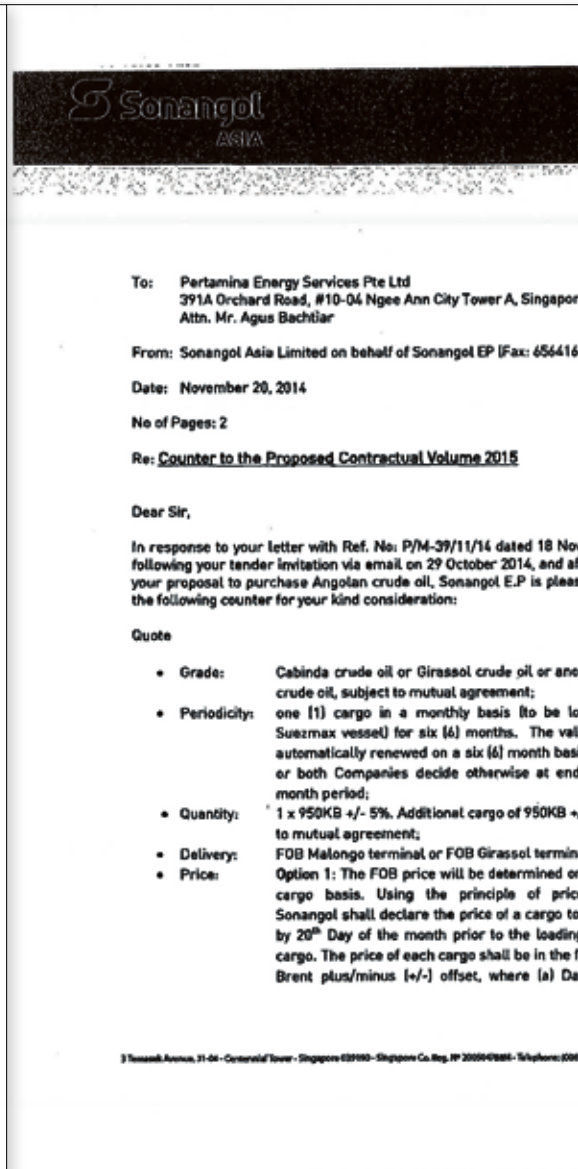
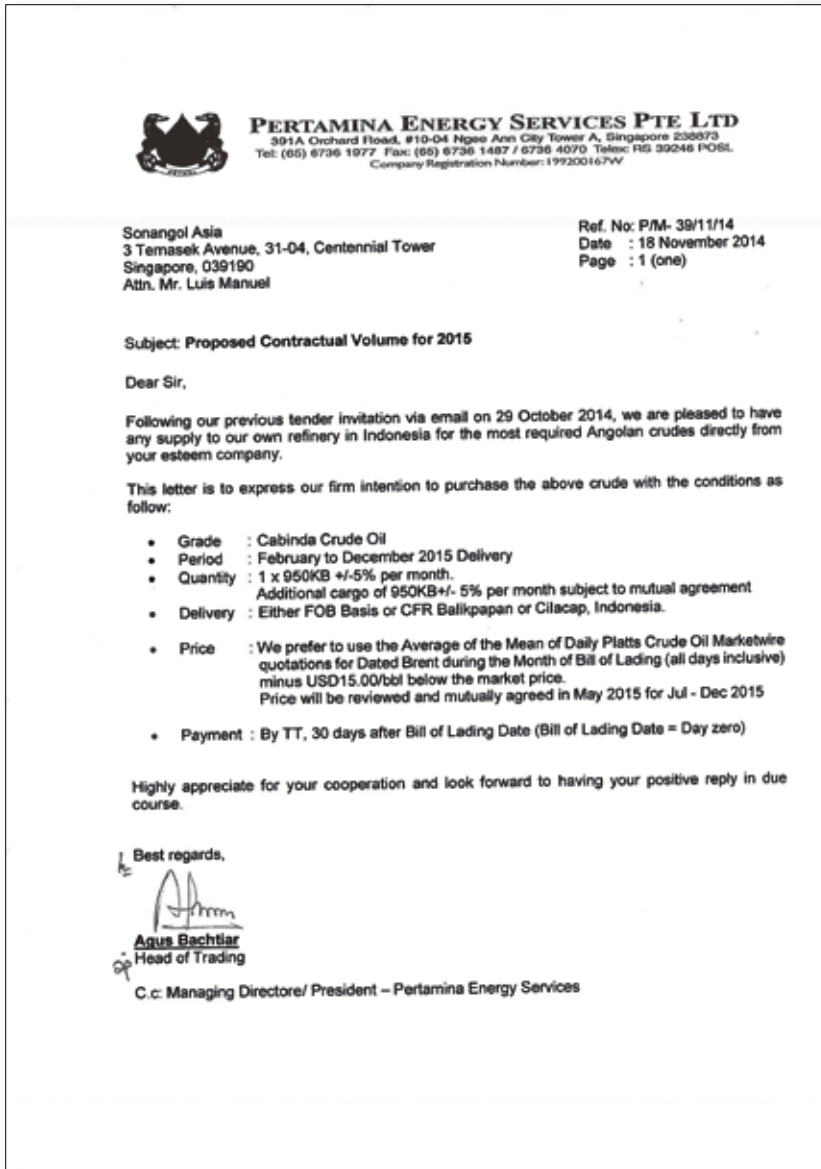


Foto 1. Surat permintaan diskon impor minyak mentah USD15 bbl, dari Pertamina kepada Sonangol.

Foto 2-3. Surat jawaban dari Sonangol kepada Pertamina, terkait diskon harga impor minyak mentah.

akan memberikan diskon USD15 bbl di bawah harga pasar. "Ketika Pertamina akan melakukan deal tersebut, Sonangol ingkar janji tidak mau mensuplai USD15 dibawah harga pasar, melainkan harga normal saja seperti ke pembeli lainnya. Jadi penghematan yang dijanjikan hanya

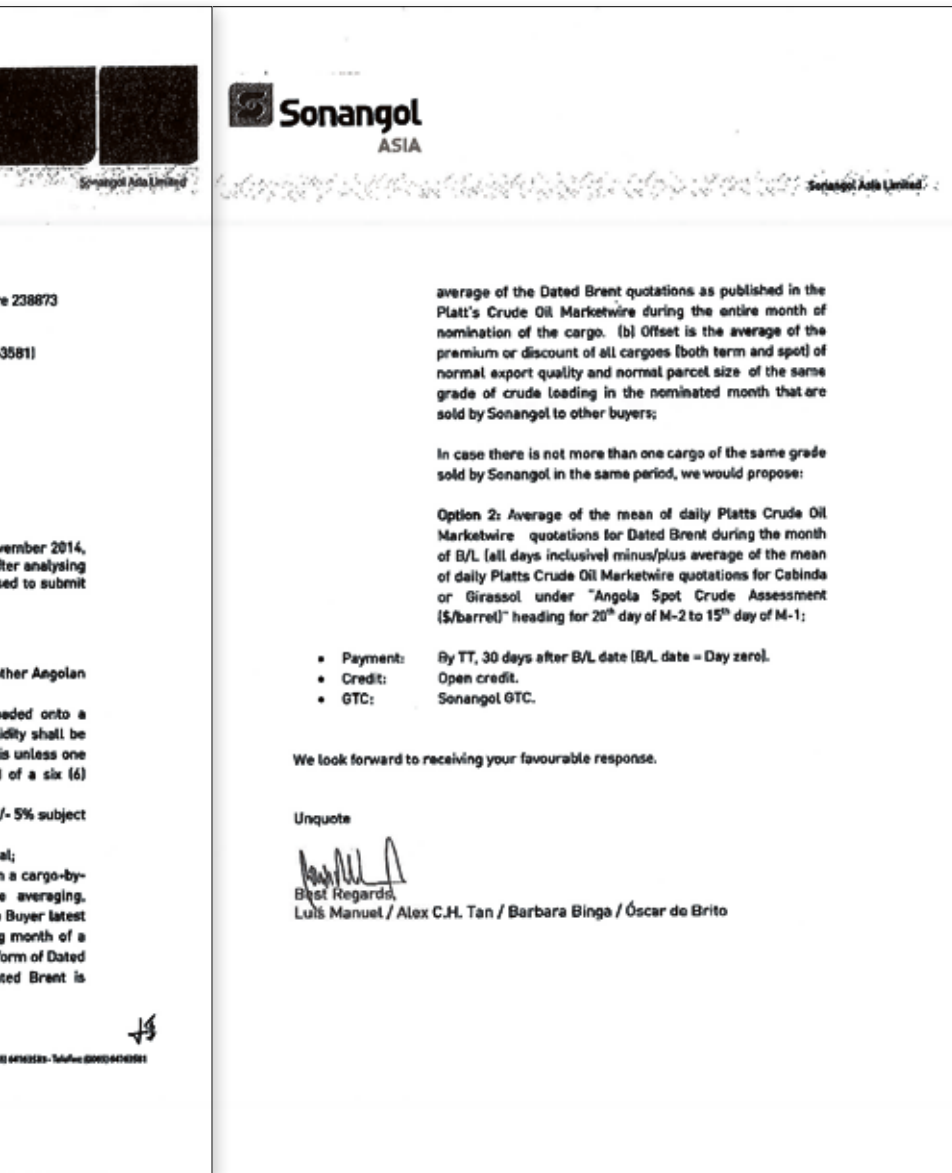
angan-angan saja," ujar Direktur Global Future Institut, Hendrajit ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu (29/11).

Lebih lanjut dikatakan jika Sonangol tetap menginginkan pembentukan *joint venture company* (JV). Perusahaan JV ini dimasa depan disinyalir bakal menjadi alat beberapa oknum untuk menjerah Pertamina. "Modus ini persis sama seperti yang dilakukan oleh kroni keluarga cendana dengan Perta Oil pada kurun masa orde baru," tegasnya.

Namun melihat iming-iming yang ditawarkan komprador China dan

Surya Paloh, seharusnya pemerintah lebih jeli melihat kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di balik meja. "Diskon USD15/bbl intinya bukan terletak pada angka yang di gemborgemborkan. Ada satu kesepakatan yang sifatnya di bawah meja yang justru melibatkan komprador China Surya Paloh di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan menteri BUMN dalam JK-connection," jelasnya.

Menurutnya, ketika pemerintah melakukan kerjasama dengan Angola, otomatis telah 'deal' dengan para komprador China. Jangan terkecoh dengan angkanya, tapi



“Saya meragukan ada harga minyak di diskon hingga USD15/ bbl. Pasalnya harga minyak di dunia selalu mengikuti harga pasaran, ada *term and condition*, kemudian ada biaya angkut dsb. Banyak loh diskon 15 dolar itu,” ujar Misbakhun

Ide dan gagasan soal Sonangol itu menarik untuk mencari jalan keluar terhadap sistem rente perdagangan minyak dunia yang sifatnya ‘G to G’. Jika itu dilakukan harga minyak yang dikonsumsi di Indonesia menjadi lebih murah. Namun, perlu ditegaskan bahwa kerjasama ini harus benar-benar dilakukan secara G to G melalui pertama, jangan lagi melalui pihak ketiga seperti Surya Energi.

“Transparansi itu penting. Lakukan secara Government to Government, Jangan pakai operator lapangan lagi. Kalau akhirnya pemerintah melalui orang ketiga, seperti Surya Energi. Ini namanya mafia ganti mafia,” tegasnya.

Dirinya mengibaratkan Partai berkuasa dan berada disekeliling Jokowi seolah mendapatkan jalan khusus untuk mendapatkan beberapa proyek.

“Dahulu kamu yang berkuasa, sekarang giliran Aku, karena saat ini partai aku yang berkuasa,” celotehnya.

Pakar energi dari Universitas Indonesia, Prof. Iwa Garniwa mengatakan bahwa Pemerintah dinilai telah melakukan kebohongan publik jika realisasi kerjasama impor minyak dari Sonangol EP batal dilaksanakan. Pasalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said sebelum kontrak ditandatangani sudah melakukan pencitraan ke publik.

“Pembelian minyak Government to Government bisa saja terjadi. Namun Angola itu masuk dalam anggota pengeksport minyak, artinya mereka juga terikat dengan harga pasar dunia,” ujar Iwa.

Menurutnya, diskon bisa saja diberikan apabila kerjasama itu Government to Government, artinya yang memberikan diskon adalah pemerintah. Sedangkan Angola sebagai negara pengeksport minyak bagian dari OPEC tidak bisa serta merta menurunkan harga dibawah

perhatikan modusnya. Modus China memanfaatkan kedekatan Surya paloh dengan Menteri BUMN. Ini juga akan memberi peluang bagi Ari Soemarno untuk berada di posisi Komisaris Pertamina.” Kontrak dengan Sonangol EP sarat kepentingan Surya Paloh di bawah Surya Energi. Apalagi Surya Paloh memiliki peran penting di istana, bisa dibbilang dia motornya,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat dengan berkata jika Indonesia

membeli minyak mentah ke negara Angola, Indonesia akan mendapat diskon sekitar 25 persen.

“Dari surat terakhir kesepakatan itu, Angola mematok harga minyaknya sama dengan harga minyak internasional. Kalau benar diskon, beli *dong* minyak yang banyak, terus disimpan di kilang-kilang minyak,” ungkap Uchok.

Politisi partai Golkar, Mukhamad Misbakhun dan inisiator Hak Interpelasi kenaikan BBM pun meragukan diskon pembelian dan kerjasama minyak impor asal Sonangol.

harga *market*.

“Diskon itu ada di kebijakan negara. Kalau Angola tidak termasuk dari anggota OPEC, dia bisa memberikan diskon. Pasalnya, Angola adalah anggota OPEC,” tegasnya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengakui belum mengetahui pasti diskon yang diberikan Sonangol EP. Menurutnya, itu masih dalam tindak lanjut Pertamina sebagai operator di lapangan.

“Kita memang belum tahu secara pasti. Saya tahu kan dari hasil diskusi itu memang ibaratnya kan begini, bahwa ada potensi untuk kita bisa berhemat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman saat dihubungi Aktual.co.

Menurutnya, angka tersebut didapatkan melalui diskusi awal dengan pihak Sonangol. Akan tetapi untuk hasil akhir akan ditentukan dalam negosiasi antara Pertamina dan Sonangol yang saat ini masih terus berlangsung.

“Nanti *fixed*-nya usai pembicaraan Pertamina dengan Sonangol. Karena itu kan bukannya hanya soal jual beli minyak saja, tapi juga ada soal pembangunan kilang, lalu soal investasi Pertamina di Angola dan *partnership* disini,” ungkapnya.

Terkait Pertamina dan Sonangol yang memberikan pernyataan tidak ada diskon USD15 bbl, Menteri ESDM Sudirman Said ketika dihubungi melalui pesan singkat mengatakan ada indikasi Sonangol dipaksa untuk mengatakan hal tersebut.

“Ada indikasi Sonangol dipaksa mengatakan hal tersebut. Ada yang ingin menunjukkan jika Indonesia tidak bisa mendapat suplai energi alternatif,” ujarnya singkat.

Sonangol, Pertamina, Transparan, Faisal Basri, Andi

Sentilan-sentilan kerjasama impor minyak mentah yang konon melalui bisikan Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo akhirnya berbuntut panjang. Hal itu bermula ketika Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)



Rini Soemarno mengatakan ke depan publik bahwa kerjasama Government to Government dengan Sonangol EP negara diuntungkan dengan diskon USD15 bbl dari harga pasar minyak dunia. Jika Pertamina membeli minyak mentah pada Sonangol, maka pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun.

Surya Paloh pun mengakui jika dirinya menyarankan Presiden Jokowi agar Pertamina bekerjasama dengan Sonangol. Dirinya mengklaim kerjasama itu bertujuan membantu pemerintah baru agar bisa menghemat dari impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun, ditengah ketidakpastian diskon yang diberikan Sonangol EP ke Pertamina, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto pun membantah jika kerjasama dengan Sonangol melibatkan bisnis Surya Paloh. Menurutnya, kerjasama itu terjadi

karena kerjasama antarpemerintah.

“Pada dasarnya, enggak ada kaitannya (dengan Surya Paloh). Karena ini Government to Government antara Indonesia dan Angola, ke bawahnya Busines to Busines, antara Sonangol dan Pertamina,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/12).

Kerjasama Sonangol tersebut atas keinginan Presiden Jokowi terkait sumber alternatif energi yang lebih murah, termasuk kerjasama dengan Angola. Andi pun menantang untuk melihat kinerja B to B dari Sonangol dan Pertamina. Menurutnya, semua itu murni tidak ada kaitannya dengan ‘bisikan’ Surya Paloh terhadap Presiden.

“Lihat saja nanti bagaimana kedua BUMN ini (Sonangol dan Pertamina) melakukan kerja sama. Kalau saya ditanya, siapa saja yang dilibatkan, dan siapa tradernya, tidak ada satu pun yang bisa jawab karena antara Pertamina

dan Sonangol lagi berunding. Saya tidak tahu dari mana isu tersebut. Ada kekhawatiran a, b, c dan membawa nama Surya Paloh,” ujarnya.

Menanggapi kerjasama B to B Sonagol dan Pertamina, Direktur PT Pertamina Ahmad Bambang memperkirakan kerjasama tersebut bakal rampung pada Februari 2015. Pasalnya, Pertamina belum mendapatkan *Privilege* sesuai yang tercantum dalam nota kesepahaman (MoU). Dalam MoU tersebut ada beberapa syarat yang antara lain terkait *Joint Venture*. Jika proses *joint venture* selesai maka Pertamina akan mendapatkan keistimewaan berupa pemotongan harga hingga USD15 bbl.

“Saya pernah bikin *joint venture* dengan Korea, lama juga prosesnya. Tapi kalau 1-2 bulan bisa selesai itu bagus. Kalau januari bisa jadi, Februari kita bisa dapat *privilege* sesuai dengan harga MoU, Semoga saja,” ujarnya.

Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa pihak Sonangol akan mendistribusikan minyak sebanyak 100 ribu barel per hari dengan kontrak perjanjian jangka panjang hingga 20 tahun. Sementara itu, pihak Sonangol belum berencana untuk membangun kilang minyak baru meskipun terdapat pembicaraan ke arah tersebut.

Akan tetapi, hal berbeda terlihat dari respons teknis oleh Senangol Asia per tanggal 20 November 2014, menjawab surat Pertamina, per tanggal 18 November 2014 mengenai “Counter To The Proposed Contractual Volume 2015” dimana Senangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon USD 15 /bbl tidak dapat diberikan dan masih mengacu pada normal-market price.

Pasalnya, Grup Sonangol diketahui sebagai kongsi lama Surya Paloh. Sonangol ini dikuasai oleh oleh konglomerasi China yang diketahui bernama Sam Pa. Sam Pa dianggap media-media Barat sebagai pemilik CIF. Di Angola, tangannya melalui China Sonangol. Dan Sam Pa ini memiliki koneksi sangat kuat dengan para kepala negara di Afrika dan Amerika Latin. ■

SI “KAMBING HITAM” PETRAL

Memberantas mafia migas menjadi salah satu janji pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Jika berbicara tentang mafia di sektor Migas salah satu topik yang akan dibahas adalah penti tidaknya posisi PT Pertamina Trading Limited (Petral). Wacana pembubaran Petral seolah menjadi obat utama dalam memberantas mafia Migas.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Saat ini pihaknya bersama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh Faisal Basri sedang membahas penting tidaknya perusahaan trading yang berbasis di Singapura tersebut. “Kalau petral tidak berfungsi sebagaimana berfungsi di atas, maka dibuka kemungkinan, kalau bisa ditutup, ya ditutup. Tapi terlebih dulu dilakukan review,” tegas Sudiman.

Petral berdiri pada 1969 dengan

nama PT Petral Group dengan dua pemegang sahamnya dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS). Pada 1978, perusahaan asal Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Ltd., sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong sebagai hasil dari reorganisasi besar-besaran.

Pada 1998, perusahaan tersebut diakuisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Tugas utamanya menjadi kepanjangan tangan perdagangan dan pemasaran Pertamina di pasar Internasional, serta mendukung tugas Pertamina untuk memasok dan memenuhi permintaan minyak dan gas di Indonesia. “Petral awalnya bernama

Fasilitas LC dan Penggunaan Dana PETRAL

| NO | BANK | LINE FACILITIES (USD) | LC RATE |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | ABN Amro | 400.000.000 | 1/36 |
| 2 | Bank Mandiri | 50.000.000 | 1/24 or 1/32 |
| 3 | BNI | 23.000.000 | 1/32 |
| 4 | BNP Paribas | 580.000.000 | 1/36 |
| 5 | Credit Agricole | 850.000.000 | 1/32 |
| 6 | DBS | 339.000.000 | 1/36 |
| 7 | First Gulf | 300.000.000 | 1/32 |
| 8 | HSBC | 125.000.000 | 1/36 |
| 9 | Mizuho | 315.000.000 | 1/36 |
| 10 | Natixis | 500.000.000 | 1/36 |
| 11 | RBS | 100.000.000 | 1/36 |
| 12 | SMBC | 400.000.000 | 1/36 |
| 13 | Socgen | 300.000.000 | 1/36 |
| 14 | Standard Chartered | 200.000.000 | 1/36 |
| 15 | Intesa San Paolo | 60.000.000 | 1/36 |
| 16 | Bank of Tokyo Mitsubishi | 150.000.000 | 1/40 |
| 17 | UOB | 300.000.000 | 1/40 |
| 18 | QNB | <i>in process</i> | 1/40 |
| 19 | ICICI Bank | <i>in process</i> | 1/40 |
| TOTAL | | 4.992.000.000 | 1/36 % |

NOC yang Mempunyai Trading Arms di Singapore

| NO | NOC | COUNTRY ORIGIN | TRADING ARMS IN SINGAPORE |
|----|---------------------------------------|-----------------|---|
| 1 | ADNOC UEA | Abu Dhabi | Adnoc MArketing Internasional (Singapore) Pte Ltd Singapore Abu Dhabi Nasional Oil Company |
| 2 | Brunei National Petroleum Company | Brunei | Petroleum Brunei Trading Sdn Bhd |
| 3 | China Offshore Oil Limidet | China | China Offshore Oil (Sing) Int'l Pte Ltd |
| 4 | China National United Oil Corporation | Hongkong, China | Chinaoil (S) International Pte Ltd |
| 5 | ENI S.P.A | Italy | ENI Trading and Shipping |
| 6 | ENOC | Emirates | ENOC (Singapore) Pte Ltd |
| 7 | Gazprom Neft | Rusia | Gazprom Marketing & Trading |
| 8 | KazMunayGaz | Kazakhstan | KazMunayGaz Trading AG |
| 9 | Kuwait Petroleum Corporation | Kuwait | Kuwait Petroleum (s) Pte Ltd |
| 10 | Maldives NOC | Maldives | STO Maldives (Singapore) Pte Ltd |
| 11 | National Iran Oil Company | Iran | National Iran Oil Company Pte Ltd |
| 12 | Opet | Turkey | Opet Trade (Singapore) Pte Ltd |
| 13 | Petrobras | Brazil | Petrobras Singapore Pte Ltd |
| 14 | Petrochina | China | Petrochina International (Singapore) Pte Ltd |
| 15 | PTT Public Company Limited | Thailand | PTT International Trading |
| 16 | PV Oil | Vietnam | PV Oil Singapore Pte Ltd |
| 17 | Repsol | Spain | Repsol YSF Trading |
| 18 | Saudi Aramco | Saudi Arabian | Aramco Overseas Company B.V. Singapore |
| 19 | Sinochem Group | China | Sinochem International Oil (S) Pte Ltd |
| 20 | Sinopec | China | Sinopec Fuel Oil (Singapore) Pte Ltd |
| 21 | Socar | Azerbaijan | Socar Trading Singapore Pte Ltd |
| 22 | Sonangol | China | Sonangol Asia Ltd |
| 23 | Sonatrach Petroleum Corporation | Algeria | Sonatrach Petroleum (Asia) Pte Ltd |
| 24 | Statoil ASA | Norwegian | Statoil Asia Pacific Pte Ltd |
| 25 | Unipecc | China | Unipecc Singapore Pte Ltd |
| 26 | PT Pertamina (Persero) | Indonesia | Pertamina Energy Service Pte Ltd |

Petra Oil, berdiri dan memiliki izin usaha di Hong Kong namun kegiatan usahanya fokus di Singapura. Komposisi kepemilikan sahamnya pertama kali itu Pertamina 40 persen, Tommy Soeharto 20 persen, Bob Hasan 20 persen, dan Yayasan Karyawan Pertamina 20 persen,” ujar Faisal, Senin (24/11).

Petral mulai melakukan trading untuk Pertamina pada tahun 2009 lalu. Sampai Juni 2012, tercatat volume perdagangan minyak petral mencapai 742 juta barel minyak per hari (mbcd) atau 104 persen dari 2012 sebesar 717 mbcd. Tercatat 97,32 persen kegiatan perdagangan Petral untuk mendukung Pertamina dalam menyediakan kebutuhan mentah dan produk minyak, sementara 2,68 persen untuk

perdagangan lain yang tidak masuk dalam sistem.

Pada 2011, Petral membukukan trading sebanyak 266,42 juta barel yang meliputi 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Dari aktivitas perdagangannya, Petral membukukan keuntungan sebesar USD31,4 miliar dengan profit margin sebesar USD47,5 juta. Petral juga berhasil membukukan efisiensi harga yang didapat terhadap market price pada tahun 2011 adalah Rp2,6 T untuk pengadaan Produk BBM (Mogas 88 RON & HSD 0.35% S) serta Rp0,4 T untuk pengadaan Crude impor.

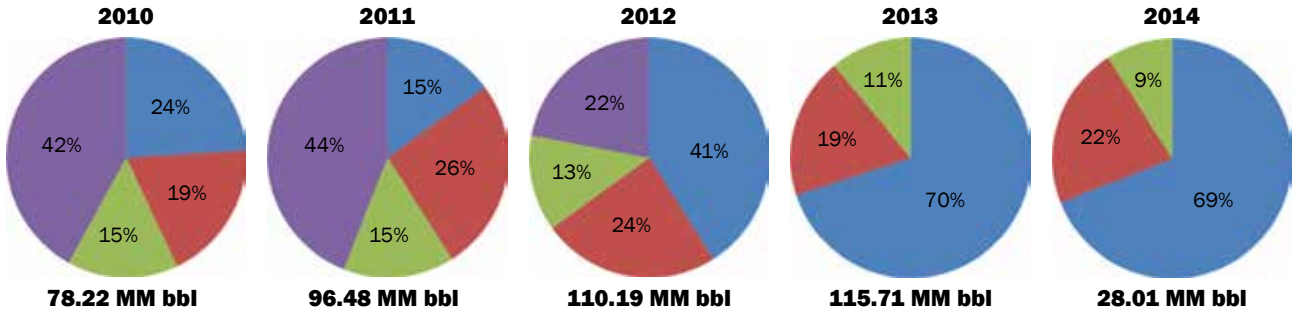
Data yang diperoleh Majalah AKTUAL menyebutkan keberadaan Petral sebagai *trading arms* yang

beroperasi di Singapura bukan hal yang aneh. Pasalnya selain Pertamina setidaknya ada 26 National Oil Company (NOC) yang memiliki *trading arms* di Singapura. Mulai dari Abudabi dengan Adnoc Marketing Internasional Pte Ltd. Brunei Darusalam memiliki Petroleum Brunei Trading Sdn Bhd. Rusia memiliki Gazprom Marketing & Trading dan masih banyak lagi.

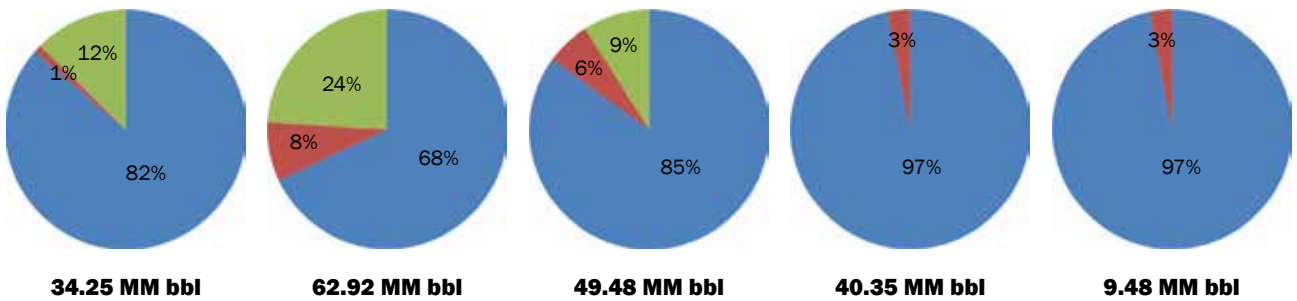
Sementara itu untuk menunjang transaksi keuangannya Petral disokong oleh 19 lembaga keuangan global. Bank nasional yang menyokong Petral saat ini hanya bank Mandiri dan BNI. Lembaga keuangan lain yang menopang Petral antara lain Credit Agricole, ABN Amro BNP Paribas (Lihat Tabel). Melihat data diatas maukah Jokowi bekukan Petral. ■

Realisasi Pembelian BBM - Gasoline RON 88 & Gasoil/ HSD

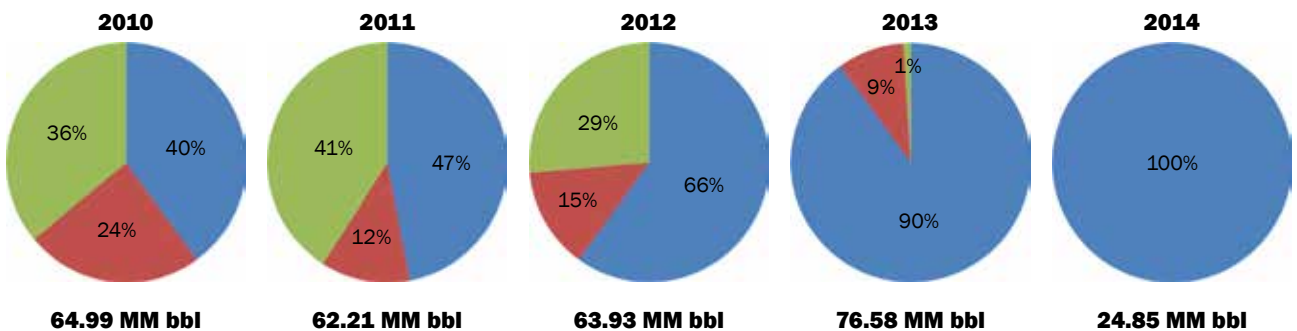
Gasoline RON 88



Gasoil/HSD



Realisasi Pembelian Minyak Mentah



● NOC ● Refiner ● Own Branding ● Trading Company

Saling Tuding Pertamina-Tim Reformasi Migas



Terkait bisnis anak usaha Petral, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Faisal Basri menuding PT Pertamina (Persero) berbohong dan menutup-nutupi proses bisnis Petral-PES. Pertamina menyatakan proses pembelian minyak mentah di Petral langsung dilakukan dengan National Oil Company (perusahaan atau produsen migas asing) tanpa perantara. Namun Faisal menemukan fakta bahwa Petral juga membeli minyak jadi dari perusahaan trading, atau broker.

“Petral beli lewat Hin Leong Trading Ltd, lalu Kernel Oil yang pernah tersandung kasus. Sebetulnya

Hin Leong itu kredibel. Cuma yang kita benci, kalau bohong. Jadi tolong kasih statement dan penjelasan yang jujur,” kata Faisal di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (4/12).

Sebetulnya dalam skema pembelian Petral-PES, pembelian minyak melalui pihak ketiga bukan hal yang aneh. Apalagi bensin premium (RON 88) yang sudah Petral tidak beredar di pasar sehingga perusahaan Trading pemenang tender mencampur RON92 dengan minyak mentah menjadi RON88.

“Trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu bukan NOC. Saya kasih data bill of leading-nya, ada invoice-nya,” tambahnya.

Menurut Faisal Basri, Petral merupakan organisasi yang bagus, cuma Faisal ingin membuat sistem bisnis yang transparan. Dengan aturan main yang jelas, sistem perminyakan Indonesia bisa transparan. Menggapi hal

tersebut, Pertamina menyatakan jika perusahaan yang dipimpinnya telah melakukan transparansi. Selama ini Pertamina telah melaporkan keuangan dan diaudit oleh auditor kelas dunia. Termasuk terkait penentuan biaya produksi BBM subsidi.

“Bisnis Pertamina dari Sabang-Marauke dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Namun Pertamina merupakan salah satu perusahaan di Indonesia paling cepat menyelesaikan laporan keuangannya. Kita diaudit oleh lembaga independen kelas dunia. Jadi bohong kalau Pertamina tidak transparan, itu tidak tepat,” kata Sugiharto, dalam acara Pertamina Energy Outlook 2015, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu (3/12).

Bahkan Pertamina menargetkan pada 14 Februari 2014 akan menyelesaikan seluruh laporan keuangan Pertamina, termasuk menyangkut laporan keuangan seluruh anak perusahaannya.

“Saya sudah minta ke Ibu Rini Soemarno (Menteri BUMN) agar Pertamina bisa menggelar RUPS pada 14 Februari guna membahas laporan keuangan. Ini sebagai bukti bahwa Pertamina selama ini transparan,” pungkasnya. / Dhanu Akbar Muhammad Daeng



Kwik: Dwi Bakal Repot Pimpin Pertamina

Ditunjuknya Direktur Utama Semen Indonesia Dwi Soetjipto menjadi Direktur Utama Pertamina menuai

berbagai kritikan. Pasalnya, Dwi dinilai sebagai sosok yang tidak paham mengenai sektor Migas.

Menanggapi hal itu, Mantan Menteri Ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan, ke depannya akan ‘reput’ jika Pertamina dipimpin oleh orang yang tidak memiliki dasar di dunia Migas.

“Agak reput, kalau tidak punya pengetahuan perminyakan. Pasalnya, minyak memiliki sesuatu yang khas, dan tidak bisa disamakan dengan sektor industri lain,” kata Kwik saat dihubungi wartawan, Sabtu (29/11).

Menurutnya, diperlukan keahlian khusus dalam memimpin perusahaan minyak. Tidak seperti sektor lain yang bisa hanya dengan kata ‘mampu’.

“Kalau sektor lain mungkin bisa hanya dengan ‘mampu’, kalau minyak tidak bisa karena minyak memiliki suatu yang khas,” ujarnya.

Ketika ditanyai mengenai sosok Dwi Soetjipto, Kwik mengaku sama sekali tidak mengenal sosok Dwi. “Saya tidak kenal dia. Saya tidak bisa mengomentari apa yang saya tidak tahu,” tandasnya.

/ Ismed Eka Kusuma - Dhanu Akbar Muhammad Daeng

Periksa Petral, Faisal Basri Dituntut Independen



Ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri akan memeriksa anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Trading Limited (Petral), yang berkantor di Singapura. Petral sendiri selama ini bertugas mengimpor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia, dimana anak usaha Pertamina ini sering dituding sebagai sarang mafia migas.

Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara berharap hasil kajian

dan review tim Faisal Basri itu komprehensif dan menyeluruh.

“Kita kan tahu, instruksi Presiden kepada Faisal untuk mengurus Petral itu dalam waktu 3 bulan. Kita harap kajiannya komprehensif dan menyeluruh sehingga bisa memberikan rekomendasi yang benar-benar dibutuhkan. Tapi segala keputusan di tangan presiden karena tugas dari Tim Komite Reformasi Tata Kelola Migas itu hanya melakukan *review* dan memberi rekomendasi,” katanya kepada Aktual.co, Kamis (20/11).

Selain itu, Marwan juga berharap, tim *ad hoc* yang diketuai Faisal Basri itu bisa independen, konsisten dan tidak tersusupi kepentingan-kepentingan mafia.

“Faisal harus independen dan tidak tersentuh oleh kepentingan mafia agar bisa memberikan rekomendasi yang tepat bagi Pemerintah. Dan kita juga berharap Istana dan DPR tidak tersusupi oleh mafia,” ungkapnya.

/ Ismed Eka Kusuma - Dhanu Akbar Muhamad Daeng

Inalum Siapkan Pembangunan PLTU

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk memperkuat pasokan energi, guna peningkatan produksi aluminium dan beberapa program lainnya.

“Kami telah menyiapkan sejumlah program pengembangan pascapengambilalihan operasional dari konsorsium perusahaan Jepang,” ujar Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Winardi, di Medan, Senin (24/11).

Di antaranya, pengolahan biji bauksit menjadi alumina sebagai bahan baku aluminium dan pengolahan aluminium menjadi berbagai produksi seperti kabel listrik, alloy, dan suku cadang otomotif.

Untuk mendukung program pengembangan produk tersebut, Inalum membutuhkan pasokan energi agar tidak mengalami kendala dalam proses produksi.

Dengan keberadaan beberapa



Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) selama ini, Inalum hanya memiliki pasokan energi listrik sebanyak 553 Megawatt.

Dari jumlah energi yang ada, Inalum harus menyumbangkan pasokan sebanyak 90 Megawatt ke PLN guna mendukung ketersediaan listrik di Sumatera Utara.

Karena itu, perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Batubara tersebut, berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan yang lokasinya masih berada dalam areal Inalum.

Dengan fasilitas yang dapat menghasilkan daya hingga 1.000 Megawatt, direncanakan pembangunan PLTU tersebut akan selesai dalam lima tahun. / Ismed Eka Kusuma - Ant



Menteri ESDM: “Let’s Play The New Game”

Menteri ESDM Sudirman Said meresmikan Amien Sunaryadi menjadi Kepala Definitif SKK Migas. Peresmian tersebut ditandai dengan Sertijab yang diserahkan oleh Plt Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko.

Dalam pidato sambutannya, Sudirman mengingatkan kepada seluruh pegawai SKK Migas agar bersinergi dengan Kepala baru agar bisa membuat perubahan dalam instansi.

“Perubahan diperlukan karena ada hal-hal yang harus diluruskan sejak lama. *Enough, it’s enough*, main-mainnya sudah cukup. *Let’s play the new game*. Mari bangun landscape baru. Sektor ini *too important*,” kata Sudirman dengan nada tinggi di kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (21/11).

Selain itu, Sudirman juga meminta kepada semua pihak yang hadir agar mendukung dan tidak melakukan ‘godaan’ kepada tim migas di pemerintahan. Ia juga melontarkan pernyataan tegas kepada para perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tidak ‘mengganggu’ timnya di Kementerian ESDM, khususnya di SKK Migas.

“Saya mohon bantu tim saya, SKK Migas, Kementerian ESDM, jangan ganggu tim saya. Kami di sini mau berbenah, menata kembali dan mengembalikan kepercayaan publik, jangan tambah beban kami lagi. Biarkan kami bekerja, jangan diganggu,” tegasnya.

Dirinya merasa agak emosional karena khawatir kalau ini SKK Migas terus dibiarkan negara ini bisa terus mengalami *get loss*. “Ini sektor yang penting bagi negara,” pungkasnya.

/ Ismed Eka Kusuma - Dhanu Akbar Muhamad Daeng



JAKSA AGUNG BISIKAN SANG SURYA

Prof Hendrawan Supratikno misalnya mengungkapkan dirinya kerap diledek oleh temannya bahwa PDI-P itu pemenang tapi pecundang. Lantaran kerap kalah mengusung kadernya masuk di kabinet Jokowi.

Oleh: Moh Sahlan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar acara pelantikan Jaksa Agung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 November 2014. Acara ini terkesan biasa namun memicu reaksi luar biasa dari berbagai kalangan. Maklum, yang dilantik sebagai Jaksa Agung adalah politikus Partai Nasdem HM. Prasetyo yang tidak memiliki prestasi sebagai jaksa.

Apalagi pria kelahiran Tuban, Jawa Timur ini masih menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 ketika pelantikannya sebagai Jaksa Agung dilaksanakan. Tak heran jika bayak pihak khawatir Prasetyo tak akan bisa menjaga netralitasnya dalam memimpin Kejaksaan. Meskipun saat dilantik ia sudah tidak lagi sebagai kader Nasdem. "Pukul 11.00 hari ini saya diberhentikan dari keanggotaan di Partai NasDem," kata Prasetyo se usai dilantik.

Sebelum surat diserahkan

Prasetyo kepada Jokowi dua jam sebelum dilantik. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pemberhentian Prasetyo dari NasDem disampaikan kepada Jokowi melalui surat yang diteken pada pukul 11.00 hari ini oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Patrice Rio Capella.

Andi menyebut sejak awal Jokowi sudah meminta Surya Paloh untuk melepas baju partai kadernya jika menjabat sebagai Jaksa Agung. Permintaan Presiden tersebut disampaikan kepada Surya saat keduanya membahas dampak kenaikan BBM yang dihadiri oleh petinggi partai pendukung pemerintah di Istana Negara. "Ya (bertemu), diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari Nasdem. Independen begitu jadi jaksa agung. Kalau tidak bisa melakukan itu, dimungkinkan pergantian segera, kata Presiden," ujar Andi.

Pelantikan Jaksa Agung. Presiden Joko Widodo (kanan) menyaksikan Jaksa Agung Prasetyo (kiri) menandatangani berita acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11).

Saat pembahasan dampak kenaikan BBM tersebut Surya sempat melontarkan saran kepada Presiden agar segera mengisi pos pimpinan lembaga yang belum diganti sejak Jokowi menjabat. Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Jaksa Agung. Kedekatan antara Surya dan Jokowi membuat Prasetyo dapat melenggang mengalahkan nama-nama tenar yang sebelumnya muncul sebagai calon pimpinan korps Adhityaksa ini.

Sebagai Jaksa, tidak banyak torehan emas diciptakan Prasetyo. Padahal dia pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum tahun 2005-2006 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nama Prasetyo juga kalah menteng dibanding kandidat lain seperti Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, serta sosok internbal Kejaksaan seperti Widyo Pramono dan Andhi Nirwanto.

Masuknya Prasetyo sebagai Jaksa Agung membuat Partai Nasdem memiliki empat wakilnya di kabinet. Setelah sebelumnya Ferry Mursidan Baldan, ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tedjo Eddy Purdijatno ditunjuk sebagai Menkopolkum.

Jatah empat kursi ini setara dengan yang diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Padahal PDI-P memperoleh suara 19 persen pada Pemilu Legislatif sementara Nasdem hanya mendapatkan 6 persen. Dalam susunan Kabinet Kerja Jokowi memberikan kursi Menteri coordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri kepada Tjahjjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM kepada Yasonna hamonangan Laoly dan Menteri Koperasi dan UKM kepada Ngurah gde Puspayoga.

Persamaan jatah kursi antara Nasdem dan PDI-P inilah yang

membuat sebagai pengurus DPP PDI-P di Lenteng Agung kecewa. Prof Hendrawan Supratikno misalnya mengungkapkan dirinya kerap diledek oleh temanya bahwa PDI-P itu pemenang tapi pecundang. Lantaran kerap kalah mengusung kadernya masuk di kabinet Jokowi. Misalnya saat Maruarar Sirait harus tersingkir sebagai kandidat Menteri Komunikasi dan Informasi di detik akhir pengumuman kabinet diganti oleh Rudy Antara.

“Itu yang membuat saya diledek teman-teman. Bagi saya nggak apa-apa kalau jago kami dikalahkan jago orang lain,” katanya. PDIP ikhlas karena memegang teguh ajaran Bung Karno, yaitu *karmane vadne adi karaste mapaleshu kadacana*, yang artinya, kerjakan tugasmu tanpa berhitung apa yang akan kau dapatkan.

Ditantang Periksa Surya

Tak lama setelah pelantikan, banyak kritikan pedas muncul di media online dan media sosial. Mereka menyebut Jokowi sudah terlalu banyak

dipengaruhi bisikan manis Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat pun menilai Jokowi telah mengorbankan harapan masyarakat yang menginginkan pembenahan lembaga kejaksaan.

“Prasetyo ini siapa dia. Saya khawatir nantinya akan membuat kejaksaan tidak independen dan mudah intervensi kekuatan politik tertentu. Padahal lembaga ini butuh pembenahan,” ucap Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, beberapa jam setelah pelantikan Prasetyo.

Emerson bahkan menantang Jaksa Agung untuk kembali memeriksa Surya Paloh dalam kasus kredit Bank Mandiri. “Kira-kira berani enggak, jadi pembuktian aja, dia (Prasetyo--red) serius apa cuma main-main. Dibuktikan di situ,” ujarnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jampidsus R Widyo Pramono sebelumnya mengatakan

bahwa pihaknya sedang menelusuri kasus-kasus lama salah satunya penyalahgunaan kredit Bank Mandiri kepada PT Citra Graha Nusantara senilai Rp160 miliar.

Untuk diketahui, dalam kasus ini pada, Senin (11/07/2005) Surya Paloh diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri. Paloh dicecar seputar adanya informasi Metro TV (PT Media Televisi Indonesia) menerima kredit PT Cipta Graha Nusantara (PT CGN) senilai Rp160 miliar. Surya Paloh diperiksa dengan materi pemeriksaan difokuskan pada penjualan dan pembelian aset PT Tahta Medan oleh PT Tri Manunggal Mandiri Persada (PT TMMP) yang merupakan perusahaan afiliasi dengan Media Group.

Aset PT Tahta Medan dibeli dari BPPN dan dijual ke PT Azalea Limited Rp160 miliar. Menurutnya, PT Media Televisi Indonesia menerima hasil penjualan aset kredit PT Tahta Medan sebesar Rp160 miliar. Surya Paloh diperiksa sebagai saksi terhadap tiga tersangka dari direksi Bank Mandiri Neloe cs. PT CGN merupakan salah satu debitor yang terkait kasus kredit macet Bank Mandiri.

Tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka dari PT CGN yaitu Direktur Utama Edison dan Direktur keuangan Diman Ponijan. Mereka telah dieksekusi untuk menjalani hukuman, sedangkan Komisaris PT CGN Saipul hingga kini masih buron.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting mengatakan, penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung memperkuat keraguan masyarakat terhadap komitmen Jokowi membenahi kejaksaan. Sosok Prasetyo tidak menunjukkan prestasi yang menonjol selama berada di kejaksaan. Namanya baru dikenal setelah masuk Nasdem, itu pun sebagai politikus. “Latar belakang Prasetyo sebagai pelaku politik berpotensi memengaruhi independensi kejaksaan sebagai penegak hukum. Menurut saya Jokowi seharusnya menunjuk jaksa agung yang integritasnya tidak diragukan,” ucap Miko. ■

Profil HM. Prasetyo

Lahir Tuban, Jawa Timur, 9 Mei 1947

Pendidikan

- SMA Negeri Bojonegoro Indonesia (1965)
- Sarjana S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung (1971)

Karier:

- Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973 - 1973)
- Kepala Bagian Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973 - 1973)
- Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1975 - 1976)
- Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1976 - 1978)
- Kepala Seksi Penuntutan I Irian Jaya Kejaksaan Agung RI (1978 - 1979)
- Pjs. Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1978 - 1978)
- Pjs. Kajari Wamena Kejaksaan Agung RI (1979 - 1980)
- Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1980)
- Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung RI (1981 - 1984)
- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung RI (1984 - 1987)
- Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1987 - 1988)
- Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1988 - 1990)
- Intelijen di Sumatera Bara Kejaksaan Agung RI (1990 - 1994)
- Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung RI (1990 - 1992)
- Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung RI (1994 - 1995)
- Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung RI (1995 - 1998)
- Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung RI (1998 - 1999)
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 - 1998)
- Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 - 1998)
- Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung RI (1999 - 2000)
- Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000 - 2003)
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003 - 2005)
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (2005 - 2006)
- Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI (2005 - 2006)
- Anggota DPR Fraksi Nasdem (2014 - 2019)

Efek Domino Kenaikan BBM

Oleh: Ismed Eka Nicha, Dhanu Akbar





Pengumuman Harga Baru BBM.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11).

Menjelang malam masyarakat Indonesia was-was menanti keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Akhirnya pada pukul 21.00 WIB, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan BBM Subsidi di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11).

“Setelah melalui sidang kabinet, pemerintah memutuskan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah menetapkan harga BBM bersubsidi baru terhitung pada tanggal 18 Nopember 2014 pukul 2014 yakni harga Premium semula Rp6.500 menjadi Rp8.500, solar ditetapkan dari semula Rp5.500 menjadi Rp7.500,” ujar Presiden Joko Widodo.

Penaikan BBM subsidi adalah pilihan sulit yang selalu dihadapkan oleh pemerintah, namun keputusan harus diambil. Dengan semakin besarnya subsidi BBM, kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial yang berorientasi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur menjadi terkendala.

“Subsidi BBM pada kenyataannya justru dinikmati oleh sebagian besar masyarakat mampu atau menengah atas. Dalam 5 tahun terakhir, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said.

Pemerintah melakukan kenaikan BBM bersubsidi bertujuan agar alokasi dana subsidi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif antara lain: program pendidikan, kesehatan serta perluasan pembangunan infrastruktur sehingga dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat.

Dengan kenaikan BBM Subsidi Rp2.000, Menteri Keuangan

(Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Pemerintah dapat menghemat lebih dari Rp100 triliun.

“Inflasi diperkirakan bertambah 2,6 persen. Jadi inflasi akhir tahun seharusnya 5,3% menjadi 7,9%,” ujar Bambang Brodjonegoro.’

Mengenai ruang fiskal pada APBN 2015 dapat dijaga Rp100 triliun dan dapat menekan defisit pada APBN 2015 sebesar 2,2%.

Praktis, dalam hitungan menit masyarakat berbondong-bondong menyerbu SPBU yang masih menjual BBM jenis premium seharga Rp6.500. Antrian panjang kendaraan salah satunya terjadi di pom bensin Bendim Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur. Tidak hanya, sepeda motor dan angkutan umum saja yang kepadatan mengantri, bahkan mobil-mobil yang notabene tidak layak mengkonsumsi Premium ikut terlihat mengantri.

Aksi penolakan pun muncul dari berbagai elemen masyarakat antara lain seperti mahasiswa di Sulawesi selatan yang menuntut pembatalan kenaikan BBM Subsidi. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berjanji akan terus menentang kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut penurunan tiga menteri neolib, Sudirman Said, Rini Soemarno dan Sofjan Djalil. Mahasiswa Front Mahasiswa Nasionalis (FMN) di Kota Medan, Sumatera Utara pun ikut melakukan aksi turun ke jalan menuntut hal serupa.

Naiknya harga BBM membawa dampak ekonomi dengan naik harga kebutuhan pokok. Harga bahan pokok di beberapa pasar tradisional di Jakarta Timur merangkak naik dengan kisaran harga dari Rp 1.000 hingga Rp 5.000. Bahkan Cabe rawit dari Rp20.000 sempat meroket hingga Rp60.000.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Sudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Timur, Jhony Siregar mengatakan kenaikan harga kebutuhan pokok terdampak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah.



Antrian Kendaraan di SPBU. Kendaraan roda dua antre membeli bahan bakar premium di Jakarta, Senin malam (17/11).

Foto kanan: Agus Martowardojo

Selain komoditas pangan, tarif jasa pun merangkak naik. Salah satunya tarif bus Kopamilet Jaya (Kopaja) dan Ojek.

“Biasanya jarak jauh atau dekat Rp3.000, sekarang jadi Rp4.000,” ujar Penumpang Kopaja Senen-Lebak Bulus, Galih di Jakarta.

Tidak hanya tarif Kopaja yang naik, transportasi umum jenis motor (ojek) juga mengalami kenaikan. Salah satu pengemudi ojek di Stasiun Gondangdia, Soleh mengatakan bahwa kenaikan terjadi sebesar Rp2.000 - Rp5.000.

“Kalau ojek susah menghitung kenaikan harga. Kita kan sendiri-sendiri, tidak seperti angkutan umum lainnya ada yang mengelola. Jarak dekat sekarang Rp12.000, kalau jauh Rp15.000-Rp20.000,” jelas Soleh.

Selain Jasa dan pasar tradisional, Produk ritel juga mengalami kenaikan harga berkisar 10-15 persen.

“Mau tidak mau, kenaikan BBM pasti akan berdampak pada usaha ritel. Perhitungan kenaikan diperkirakan 10-15 persen,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo),

Satria Hamid Ahmadi, di Jakarta.

Kenaikan produk ritel tersebut akan terjadi secara bertahap hingga awal tahun 2015 mendatang, namun dirinya berharap pemerintah bisa segera melakukan operasi pasar agar harga-harga kebutuhan pokok bisa segera stabil.

“Kenaikannya akan bertahap, dan juga sejalan dengan efek dari pemerintah apa bisa meredam dampak dari kenaikan BBM, jika tidak diredam pasti bisa tidak akan terkendali pada 2015 nanti,” ujar Satria.

Sehari pasca kenaikan BBM Subsidi, Bank Indonesia langsung merespon dengan memutuskan menaikkan bunga acuan 25 basis poin menjadi 7,75 persen.

“BI memutuskan untuk memperkuat bauran kebijakan dalam merespon kebijakan reformasi subsidi BBM yang ditempuh pemerintah. Pertama, kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,75 persen, dengan suku bunga “*lending facility*” naik sebesar 50 bps menjadi 8,0 persen dan suku bunga “*deposit facility*” tetap pada level 5,75 persen berlaku efektif sejak 19 November 2014,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Kedua, BI mempersiapkan penyesuaian kebijakan makprudensial guna memperluas

sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas. Kebijakan meliputi perluasan cakupan definisi simpanan dengan memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR dalam kebijakan GWM-LDR, dan pemberian insentif untuk mendorong penyaluran kredit UMKM.

“Kebijakan moneter ini untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendal di 2,5 – 3 persen dari PDB dan tidak membesar,” kata Agus.

BI beralasan, kenaikan suku bunga acuan untuk memastikan kepercayaan investor tentang keseluruhan konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia.

“Memelihara kepercayaan investor ini penting, agar likuiditas global yang mengalir ke pasar saham dan obligasi kita, terutama obligasi negara, dapat tetap tinggi. Ini pada gilirannya akan mengurangi beban pembiayaan pembangunan melalui Surat Berharga Negara,” ujar Agus.

Dalam jangka pendek, Kepala Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Semarang Stephanus Cahyanto Kristiadi mengatakan kenaikan BBM berpengaruh pada penurunan besaran laba perusahaan. Hal inilah yang selanjutnya berdampak pada pasar saham. Beberapa sektor saham yang berpotensi mengalami penurunan transaksi dalam waktu yang relatif cukup lama, yaitu

- Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan transportasi, perumahan dan berbagai jenis produk.
- Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau.
- Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan.

properti, manufaktur, dan perbankan.

Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi berpengaruh terhadap tarif kereta api. Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Gatut Sutiyatmoko mengatakan PT KAI berencana menaikkan tarif sebesar 10 persen untuk menekan biaya operasional karena harga solar naik.

“Mudah-mudahan berjalan normal (kenaikan harga tiket),” kata Gatut

Di Sektor Properti, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Pekalongan, Ricsa

Mangkulla menyatakan bahwa pengembang dipastikan menaikkan harga rumah sebagai upaya menyeimbangkan harga bahan bangunan dan bahan bakar minyak (BBM).

“Kami belum bisa memastikan kapan waktunya menaikkan harga rumah. Akan tetapi rencana menaikkan harga rumah itu sudah pasti. Diperkirakan berpengaruh sebesar 10 sampai dengan 15 persen terhadap bisnis properti,” katanya.

Efek domino kenaikan BBM yaitu kenaikan BI Rate, sedikit banyak akan

mempengaruhi investor properti. Namun itu hanya sementara saja.

“Kami optimis tahun depan BI rate bakal turun lagi dan penjualan pasar properti bakal meningkat tajam,” ujar Senior Director Ciputra Group, Agussurja Widjaja di Jakarta.

Pertumbuhan properti di 2014 sempat mengalami perlambatan. Salah satu sebab yaitu situasi politik yang memanas. Terkait kenaikan harga BBM subsidi, menurutnya akan sedikit berpengaruh pada harga jual produk properti.

“Penaikkan BBM subsidi sedikit berpengaruh terhadap harga jual properti. Namun jangka panjangnya lebih bagus karena inflasi bakal terkendali, ekonomi bakal stabil, trade deficit bakal berkurang, pembangunan bakal berjalan,” tambahnya.

Namun ditengah penaikkan BBM subsidi, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengatakan, potensi jebolnya kuota BBM subsidi tetap masih besar. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi hanya dapat ditekan 300.000 kiloliter (KL).

“Jadi dengan kenaikan harga BBM Rp2.000 per liter, prognosa over kuota sebesar 1,6-1,7 juta KL. Ada penghematan atau penurunan konsumsi 200.000-300.000 KL sampai akhir tahun ini,” ungkapnya.

Pihaknya memperkirakan jatah BBM subsidi akan habis sekitar tanggal 20 Desember. Namun Pertamina menjamin pasokan BBM subsidi tetap ada.

“Nanti Kementerian Keuangan akan rapat dengan Pertamina untuk hitung-hitungan kuota, berapa dana subsidi yang diperlukan untuk tambahan kuota,” pungkasnya. ■



Agus Martowardojo

Mardiasmo Resmi Jabat PIt Dirjen Pajak

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo resmi mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (PIt)Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggantikan Fuad Rahmany yang memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2014.

“Dalam sisa waktu sebulan ini, harus betul-betul mampu melaksanakan tugas dengan baik. Arahannya agar keinginan Bapak Presiden Joko Widodo (tentang target penerimaan pajak) dapat tercapai,” kata Mardiasmo setelah serah terima jabatan di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (1/12).

Seiring dengan mendekati tutup tahun 2014, Mardiasmo meminta para Direktur di Ditjen Pajak dan semua jajarannya, serta Kepala



Kantor Wilayah Pajak untuk mengoptimalkan kinerja agar mampu meningkatkan penerimaan pajak, sehingga dapat memperluas ruang fiskal pemerintah.

“Jadi bukan hanya kerja keras yang kita butuhkan, tapi juga harus kerja yang tuntas, dan mencapai target, bekerja penuh integritas tentunya,” ujar Mardiasmo.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak untuk 2014 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sebesar Rp1.072,3 triliun.

Mardiasmo mengakui dirinya menghadapi tantangan besar, mengingat realisasi penerimaan pajak hingga 14 November 2014 baru mencapai Rp812,1 triliun atau baru 75,73 persen dari target di APBN-P.

/ Ismed Eka Kusuma - (Ant)

Kemendag Akan Evaluasi Impor Sapi

Kementerian Perdagangan akan mengevaluasi tata niaga impor produk sapi, hidup maupun daging beku.

Penyebabnya, harga daging sapi di pasar ternyata tetap tinggi kendati keran impor terbuka lebar.

“Jika dilihat dari realisasi tidak sebanyak itu (tidak sebanyak izin impor yang diberikan, red.), jadi nanti akan kita evaluasi bersama dari data kita, dengan data di Karantina,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan di Jakarta, Minggu (30/11).

Dia menjelaskan izin yang diberikan Kementerian Perdagangan pada 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pada 2013. Namun, hingga akhir tahun nanti realisasi impor diperkirakan hanya 65 persen dari total alokasi yang diberikan.

“Izinnya naik, tapi realisasi masih 65 persen hingga Desember 2014, kita lihat nanti,” kata Partogi.

Pada 2014, Kemendag telah



menetapkan perhitungan indikasi untuk impor sapi hidup sebanyak 750.000 ekor atau setara dengan 130.000 ton daging, sementara untuk importasi daging beku, pemerintah membebaskan tanpa adanya perhitungan indikatif.

Kendati pemerintah telah membuka impor, harga daging sapi rata-rata masih berada pada kisaran Rp95.000-Rp100.000 per kilogram.

Pihaknya akan mencabut izin para importir jika tidak mampu merealisasikan impor sebesar 80 persen dari alokasi yang sudah diberikan oleh Kementerian Perdagangan.

“Kita akan cabut jika tidak 80 persen (Realisasi impornya, red.), saya rasa para importir tidak main-main soal ini,” kata Partogi. / M Vidia Wirawan - Ant

Tol Laut Dapat Turunkan Biaya Logistik Sampai 15 Persen



Tol laut atau Pendulum Nusantara diyakini akan menurunkan biaya logistik 10-15 persen, kata Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional Nofrisel.

Nofrisel saat ditemui di Yogyakarta, Sabtu (29/11) mengatakan, bahkan tol laut bisa menekan biaya “overhead” perusahaan sebesar 14 persen.

“Tapi tergantung efektifnya tol laut, tapi kalau sesuai perencanaan bisa turun biaya logistik, presentasinya 10 sampai 15 persen,” ucapnya.

Dia mengatakan biaya logistik selama ini menyumbang 18-22 persen dari biaya produksi, sementara itu, biaya logistik nasional masih menyumbang 26 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara ASEAN, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35 dan Vietnam 48.

Nofrisel mengaku optimistis dengan adanya tol laut dengan rencana pembangunan 24 pelabuhan akan mengurangi biaya logistik, meskipun saat ini sistem yang diterapkan adalah transportasinya terlebih dahulu diadakan, baru industrinya dibangun atau “ships promote the trade” bukan sebaliknya “ships follow the trade”.

“Seperti di Shanghai, dulu ‘kan dibangun dulu jalurnya, industrinya enggak ada. Begitu ada pelabuhan, pemerintahnya paksa industri untuk dibangun di sana,” tegasnya. / Faizal Rizki - Ant

Rusdi Kirana Bakal Pertemuan Jokowi dengan Bos Airbus

CEO Lion Air Group Rusdi Kirana berencana mempertemukan pimpinan puncak Airbus Group dan anak perusahaannya ATR (Aerei da Trasporto Regionale) dengan Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi.

“Saya akan atur waktunya, mungkin awal tahun depan,” kata Rusdi di Roma, Kamis (27/11) tengah malam WIB.

Undangan kepada Airbus dan ATR ini dilakukan Rusdi untuk merealisasikan ambisinya menghidupkan kembali bisnis dirgantara nasional yang menjadi wilayah kepakaran PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Menurut Rusdi, pengalaman dan kepakaran Airbus serta ATR dalam memproduksi dan memasarkan pesawat akan amat penting dalam membangkitkan lagi industri pesawat

domestik yang sudah dirintis lama itu.

Rusdi berulang kali mengatakan ingin memajukan lagi industri dirgantara domestik lewat PT DI yang memproduksi pesawat relatif sejenis dengan yang dibuat ATR, pesawat baling-baling turbojet dua mesin dan dua kokpit.

Rusdi menilai Indonesia dalam beberapa waktu ke depan mampu mengembangkan sendiri industri dirgantaranya.

“Karena kita sudah bisa bikin pesawat. Seperti PT DI yang sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi,” kata Rusdi.

Kalangan kebijakan dan industri dirgantara Italia dan Prancis sendiri telah membuka tangan lebar-lebar untuk kerjasama lebih luas lagi dengan Indonesia.



“Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dengan negeri Anda,” kata Perdana Menteri Italia Matteo Renzi kepada Rusdi Kirana sewaktu penandatanganan pembelian 40 pesawat ATR tersebut.

Bahkan dengan nada berseloroh, Renzi menyatakan pihak Italia siap datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama lebih luas lagi, terutama dengan Lion Air Group.

“Kesepakatan berikutnya tidak akan dilakukan di Italia atau Prancis, namun di negeri Anda sendiri, Indonesia,” demikian Renzi. / Ismed Eka Kusuma - Ant

Pemerintah Pastikan Cari Utang ke China

Presiden Joko Widodo memastikan diri Indonesia bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diprakarsai pemerintah Tiongkok. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. “Sudah, sudah dipastikan. Menkeu akan segera datang ke China, kalau enggak salah awal Desember untuk tanda tangan,” ujarnya, Kamis (27/11).

AIIB merupakan lembaga keuangan yang disebut sebagai pesaing World Bank, Asian Development Bank, hingga International Monetary Fund. Dalam struktur AIIB, Tiongkok menjadi pemegang saham terbesar. Sofyan menyebut kesepakatan ini akan



membuat Indonesia tidak bergantung kepada Bank Dunia dan IMF dalam mencari pinjaman.

Modal dasar AIIB juga sangat besar yakni berkisar 100 miliar dolar, dan setengahnya berasal dari kantong Tiongkok. Untuk mendapatkan pinjaman dari AIIB, Sofyan mengaku Indonesia masih harus bersaing dengan 21 negara lain yang sudah

bergabung terlebih dulu di bank tersebut.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ketertarikannya bergabung dengan AIIB saat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun, Jokowi meminta dua syarat yang harus dipenuhi AIIB sehingga Indonesia bersedia bergabung ke

bank yang dikhawatirkan oleh blok barat tersebut.

“Pertama, kita harapkan regional headquarter-nya ada di Indonesia. Presiden juga mengharapkan direksi utamanya menyertakan pejabat dari Indonesia. Itu yang akan diperjuangkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan,” ucap Andi.

/ Ismed Eka Kusuma - Dhanu Akbar Muhammad Daeng

DIPLOMASI JOKOWI DI PENTAS GLOBAL

Presiden Jokowi menyosialisasikan doktrin poros maritim dan diplomasi pro-rakyat, pada lawatan luar negeri pertamanya di forum APEC, ASEAN, dan G20. Namun, yang perlu diperhatikan, seberapa jauh diplomasi itu betul-betul mewakili kepentingan nasional.

Oleh: Satrio Arismunandar

Untuk seorang presiden baru, yang tidak memiliki latar belakang karir diplomat dan minim pengalaman politik luar negeri, Joko Widodo (Jokowi) ternyata melampaui semua perkiraan. Mengingat bekal pengalaman luar negerinya yang terbatas, sejumlah kalangan awalnya tidak berharap terlalu banyak dari Jokowi. Tetapi kini ada apresiasi baru terhadap “gebrakan” diplomasi Jokowi.

Pada pertengahan November 2014, Presiden Jokowi mengawali lawatan perdananya ke luar negeri dengan menghadiri tiga forum regional dan internasional. Pertemuan puncak itu adalah Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, China (10-11 November), Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar (12-13 November), dan pertemuan G20 di Brisbane, Australia (15-16 November).

Selama ini Indonesia memang aktif di forum APEC, ASEAN, dan G20. Bahkan di tahun 2013 Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC. Indonesia juga menjadi ketua Kelompok Kerja untuk Investasi dan Infrastruktur di G20, termasuk menjadi ketua Kelompok Kerja Agenda Pembangunan G20. Di forum ASEAN, Indonesia merupakan inisiator proses reformasi ASEAN. Jadi, Presiden Jokowi meneruskan jalur yang sudah dibuka oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lawatan perdana ini punya arti penting bagi pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden

Jokowi. Kebijakan luar negeri Jokowi mengedepankan diplomasi pro-rakyat, sekaligus mensinergikan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagi Indonesia, ASEAN berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Maka Jokowi memilih forum ini untuk menyampaikan gagasannya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan harapannya tentang peran ASEAN ke depan.

Lima Pilar Utama Poros Maritim

Dalam pidatonya di Nay Pyi Taw, 13 November 2014, Jokowi menguraikan lima pilar utama poros maritim. Pilar pertama, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya dan kemakmurannya ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.

Pilar kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Caranya adalah melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. “Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Jokowi.

Ketiga, Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas



maritim. Caranya adalah dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar keempat, melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak semua mitranya untuk bekerjasama di bidang kelautan. Juga, menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. “Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua,” tutur Jokowi.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

经合组织工商领导 CEO SUMMIT 2014

11月8日-10日 Beijing, China 8th-10th November 2014



Persaingan China dan Amerika

Gagasan Jokowi tentang pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia rupanya menarik perhatian banyak negara besar. Negara adidaya China menunjukkan minatnya melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi. Wang Yi mengajak Indonesia mengharmonisasikan gagasan sebagai poros maritim dunia dengan kebijakan pembangunan China di masa mendatang. Menurut Wang, ada ketertautan antara gagasan poros maritim dan kebijakan pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang dicanangkan China.

Jepang juga menyatakan sangat tertarik dengan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jepang telah meminta dilibatkan dalam pembangunan poros maritim, terutama dalam proses pembangunan konektivitas infrastruktur maritim. Konektivitas infrastruktur ini memang dibutuhkan dan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan gagasan poros maritim.

Tak mau kalah dengan China dan Jepang, Amerika Serikat juga berjanji mendukung program-program

pembangunan Indonesia. Persaingan pengaruh antara China dan AS di kawasan Asia memang cukup tajam, dan AS tak ingin ketinggalan kereta dalam mendukung gagasan poros maritim Jokowi.

Jokowi juga gesit menggaet mitra Eropa. Jokowi berhasil mengajak PM Prancis Francois Hollande untuk mencapai visi kemaritimannya. Kedua negara setuju bekerjasama mengembangkan sektor kemaritiman, terutama dalam industri galangan kapal. Prancis adalah salah satu negara pembuat kapal militer terbesar di Eropa. Di pasar komersial, industri kapal Prancis adalah nomor dua sesudah Jerman dan lebih baik dari Inggris.

Memanfaatkan momen forum APEC di Beijing, Jokowi pada 10 November mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Jokowi mengungkapkan begitu banyaknya kesempatan investor untuk ikut serta membangun Indonesia. "Dalam lima tahun, kami ingin membangun setidaknya 24 pelabuhan termasuk pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan dalam forum pertemuan para pengusaha atau CEO Summit APEC 2014 di Beijing, Senin (10/11). Pada forum tersebut Presiden Joko Widodo menawarkan peluang investasi bidang infrastruktur di Indonesia.

Jokowi mengakui masih adanya kendala untuk berinvestasi di Indonesia. "Memang banyak investor yang mengeluhkan soal pembebasan lahan. Namun saya akan mendorong menteri, gubernur, walikota saya untuk membereskan masalah ini. Saya menjamin, pemerintah akan membantu perizinan bisnis secara cepat," tandas Jokowi.

Kemenlu di Bawah Retno Lestari

Gebrakan Jokowi dalam politik luar negeri sebenarnya sudah dimulai dengan menunjuk Retno Lestari Priansari Marsudi (52) sebagai Menteri Luar Negeri. Retno saat itu adalah Duta Besar RI di Belanda, yang dipanggil pulang Jokowi untuk membantu pemerintahannya. Jokowi menyebut Retno, menteri luar negeri perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia, sebagai sosok pekerja keras, tegas, dan visioner.

Phillip J. Vermonte, pengamat dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, memandang dipilihnya Retno sebagai Menlu merupakan keputusan simbolis. Retno pernah bertugas sebagai sebagai dubes RI di Norwegia, negara yang mengakui konsep negara kepulauan dan aktif dalam hukum kelautan. Dengan memilih Retno, misi Jokowi untuk memperkuat kelautan Indonesia di mata internasional mungkin bisa diwujudkan.

Tetapi seperti apa sebenarnya garis kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi? Belum ada penjabaran yang rinci. Namun Retno telah menyebutkan tiga pendekatan umum bagi kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia akan menampilkan sikap yang (lebih) tegas dan bermartabat, dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Kedua, kebijakan luar negeri akan bersifat pro-rakyat. Ketiga, sebagai konsekuensinya, kebijakan luar negeri juga akan bersifat lebih membumi.

Selama ini, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menlu Marty Natalegawa mengedepankan semboyan “thousand friends, zero enemy.” Pendekatan a’la SBY ini telah berhasil memberi panggung yang lebih luas bagi peran Indonesia di forum-forum internasional. Namun, pendekatan SBY terkesan terlalu lunak atau kurang greget, ketika menyangkut perselisihan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Di era SBY, Indonesia dianggap sering menunjukkan sikap yang “kurang konfrontatif” jika bersinggungan dengan negara tetangga. Misalnya, dalam kasus friksi-friksi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia atau Malaysia. Apakah Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah pimpinan Retno akan siap bersikap “lebih konfrontatif,” ketimbang di bawah pimpinan Marty? “Tegas bukan berarti harus konfrontatif. Yang terpenting itu tujuan kita tercapai,” ujar Retno, menjelaskan.

Sebagai penjabaran dari politik luar negeri yang pro-rakyat, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Di antara kebijakan yang pro-rakyat adalah meningkatkan upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kemlu

akan melakukan pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan secara tepat jika WNI menghadapi masalah hukum di luar negeri. Diplomasi Indonesia juga harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan, dan membuka peluang bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam mengimplementasikan diplomasi yang pro-rakyat dan membumi, Pemerintah Jokowi harus lebih melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Hingga saat ini nasib buruh migran Indonesia masih sering diabaikan dalam diplomasi luar negeri, bahkan sering dilupakan untuk menjadi agenda yang harus diperjuangkan di forum APEC, ASEAN, dan G20. Padahal, jika dilihat dari struktur kontribusi pembiayaan pembangunan, remitansi buruh migran di kawasan Asia Pasifik—termasuk di kawasan ASEAN—telah melonjak secara signifikan. Namun perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan buruh migran masih sering diabaikan.

Forum ASEAN, APEC, dan G20

Kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi, meski dalam gebrakan perdananya di forum APEC, ASEAN, dan G20 terkesan cukup menjanjikan, masih perlu perumusan yang lebih jelas. Hal ini terutama terkait dengan target pencapaiannya, dan seberapa jauh diplomasi luar negeri itu betul-betul mandiri dan merepresentasikan kepentingan nasional. Khususnya dalam hal memberi solusi pada masalah-

masalah ekonomi nasional yang cukup berat saat ini.

Irhas Akhmadi, yang mewakili koalisi organisasi nonpemerintah, Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP), mencoba memberi masukan kritis. Irhas mengingatkan di Jakarta, 9 November 2014, bahwa kehadiran Indonesia di forum-forum APEC, ASEAN, dan G20 selama ini tak lebih dari fasilitator atas kepentingan global, baik di regional maupun di dalam negeri. Kebijakan tersebut tak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bahkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dan disetujui Indonesia mendatangkan kerentanan bagi rakyat Indonesia di semua sektor.

Forum APEC, ASEAN, dan G20 memang memiliki agenda dan cakupan yang berbeda. Namun, orientasi dan tujuan ketiga forum tersebut adalah mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi pasar bebas, dan merumuskan tata kelola kebijakan ekonomi global sebagai pemandunya.

Integrasi tersebut ditandai dengan kesamaan agenda perundingan di tiga pertemuan tersebut, yaitu liberalisasi perdagangan, investasi, dan keuangan. Agenda utama APEC adalah penyatuan perdagangan dan ekonomi, termasuk konektivitas Asia Pasifik melalui infrastruktur. ASEAN sedang giat menyiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diterapkan tahun depan. Sementara G20 menekankan pada pertumbuhan global sebesar 2% dalam lima tahun ke depan.

Konsekuensi dari operasi ekonomi pasar bebas adalah eksploitasi sumber daya alam. Hal ini bukan hanya menghasilkan kerusakan lingkungan hidup, tetapi juga menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat marginal, seperti nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan kaum perempuan. Hal-hal semacam inilah yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah Jokowi. ■



(Diolah dari berbagai sumber)



Aktifis sayap kiri Israel ikut dalam demonstrasi menentang rencana pemerintah Israel untuk membentuk undang-undang negara Yahudi, di Yerusalem, Sabtu (20/11).

membutuhkan negara Palestina. Itu tujuan utama dan sikap UE,” ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini saat berkunjung ke Gaza, sebagaimana dikutip Alarabiya, 8 November 2014. “Semua pihak tak bisa hanya duduk dan menunggu. Jika hanya menunggu, mungkin perlu 40 tahun lagi negara Palestina berdiri,” tambahnya.

MEMICU “PERANG AGAMA” DI JERUSALEM

Pemerintah Israel melancarkan kebijakan yang berpotensi membangkitkan “perang agama” di Jerusalem. Prospek perdamaian Palestina-Israel praktis sudah dibunuh lewat aksi-aksi provokasi tersebut.

Oleh: Satrio Arismunandar

Kehidupan di kota suci tiga agama, Jerusalem, sebulan terakhir ini panas oleh berbagai tindakan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan Israel, warga Yahudi—khususnya yang termasuk kelompok ekstrem Yahudi—dan warga Palestina. Sejumlah warga Yahudi dan Palestina tewas dalam aksi saling serang, yang menjurus ke semacam “perang agama” karena dikaitkan dengan tempat suci agama.

Bermula dengan diizinkan sebuah kelompok garis keras Yahudi oleh aparat Israel untuk memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat suci umat Islam di Jerusalem, aksi provokatif itu lalu memicu aksi balasan dari warga Palestina. Tindakan warga Palestina dibalas lagi dengan aksi dari warga Yahudi dan aparat keamanan, dan terjadilah kekerasan berkelanjutan.

Terkadang sulit memahami logika berpikir Israel dalam situasi saat ini. Fakta obyektifnya adalah posisi Israel semakin terdesak dalam diplomasi internasional, justru sejak serangan membabitanya ke Gaza, yang

memakan ribuan korban warga sipil Palestina. Israel kehilangan simpati internasional. “Menjual” penderitaan orang Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II, di mana Adolf Hitler menerapkan kebijakan ekstrem anti-Yahudi di Jerman, sudah tidak mempan lagi untuk menarik simpati.

Mentorpedo proses perdamaian

Bagi dunia internasional, khususnya negara-negara Uni Eropa, langkah-langkah PM Israel Benjamin Netanyahu, yang terus mendorong pembangunan permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat jelas mentorpedo proses perdamaian. Ini berakibat pemerintah baru Swedia menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina, sebagai langkah memberi kesetaraan posisi pada Palestina dalam berhadapan dengan Israel. Status Palestina yang meningkat diharapkan akan mendorong perdamaian.

Langkah Swedia itu dikecam keras oleh Israel dan Amerika. Namun tren ini sudah bergulir dan sulit ditahan. Parlemen Inggris mengadakan pemungutan suara internal, yang berujung ke keluarnya imbauan tidak mengikat agar pemerintah Inggris juga segera mengakui negara Palestina. Terakhir, parlemen Perancis melakukan hal yang sama.

Uni Eropa juga mendukung upaya mewujudkan negara Palestina.” Kami

RUU yang sangat rasist

Perkembangan terakhir justru lebih mengecilkan hati. Pemerintah Israel telah sepakat mengusulkan rancangan undang-undang, yang akan mengubah dasar negara itu dari Yahudi yang berdemokrasi menjadi semata-mata berlandaskan hukum Yahudi, yang menekankan paham Semitisme dalam setiap aspek berbangsa. Langkah ini semakin mengancam warga keturunan Palestina dan Arab di Israel, yang menganggap RUU ini sangat rasist.

Keputusan ini merupakan hasil pemungutan suara kabinet Israel pada 23 November 2014. Dengan perbandingan suara 14 mendukung dan enam menentang, mayoritas kabinet mendukung pembentukan negara Yahudi. RUU ini masih harus disetujui parlemen sebelum jadi undang-undang. Dalam RUU itu disebutkan, Israel harus menegaskan karakter Yahudi mereka dan menjadikan hukum Yahudi sebagai dasar pembuat peraturan.

Sedangkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kedua setelah Ibrani, juga akan dihapuskan. RUU ini juga memungkinkan pemerintah untuk mencabut seluruh hak-hak warga Arab yang dianggap turut serta atau memicu kekerasan, termasuk melempari aparat dengan batu.

Warga Muslim Arab dan Kristen yang terdiri dari 20 persen populasi Israel menentang keputusan tersebut. Mereka khawatir dengan adanya UU ini, maka rasisme yang mereka rasakan sekarang akan lebih parah. ■

(Diloh dari berbagai sumber)

Harga Bensin di Lanny Jaya Papua Tembus Rp30 Ribu per Liter



Harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, di tingkat pengecer mencapai Rp30 ribu per liter.

"Satu liter bensin atau solar itu Rp30 ribu," kata Pekis Weyato, salah

satu pengecer BBM solar dan bensin di Pasar Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Sabtu (29/11).

Ia mengungkapkan sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar dan bensin, harga seliter Rp25 ribu, namun setelah ada pengumuman resmi, pihaknya menaikkan menjadi Rp30 ribu/liter.

"Kami biasa mendapatkan jatah dari Pertamina itu 70 drum dalam sebulan, dengan rincian 30 drum bensin, 30 drum solar dan 10 drum minyak tanah. Kalau untuk minyak tanah Rp25 ribu/liter," katanya.

/ Faizal Rizki-Ant

Pengguna Pertamina di Jabar Meningkat



External Relation Pertamina Jawa Barat Mila Suciyani mengatakan bahwa pascakenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium, terdapat indikasi peralihan konsumsi dari Premium ke Pertamina.

"Pascakenaikan BBM bersubsidi jenis premium ada kenaikan penggunaan BBM non subsidi jenis Pertamina di sejumlah SPBU," kata Mila, di Bandung, Jumat (21/11).

Menurut dia, untuk wilayah Jawa bagian barat kenaikan konsumsi

kesetiaan konsumen, Pertamina melakukan *monitoring* stok BBM agar selalu tersedia.

"Stok BBM jenis premium, Pertamina dan Pertamina Plus dalam kondisi aman, pasokan lancar," katanya.

Monitoring stok BBM baik yang bersubsidi maupun yang non subsidi terus dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan BBM dapat terpenuhi.

/ Karel Stefanus Ratulangi-Ant

Pabrik Semen Baru akan Dibangun di Kupang



Menteri Prindustrian Saleh Husin mengatakan Pabrik Semen Kupang hingga saat ini merupakan satu-satunya industri di NTT yang menjadi kebanggaan masyarakat, dan harus dikembangkan.

Saleh menyatakan dukungannya untuk pembangunan pabrik Semen Kupang III, setelah mendengarkan paparan Dirut PT Semen Kupang Abdul Madjid Nampira.

Kendala yang saat ini dihadapi PT Semen Kupang adalah listrik dan juga pendanaan. Namun, bisa dibangun pembangkit listrik sendiri. Sementara mengenai pendanaan bisa dilakukan *sharing* dengan BUMN, swasta dan dibantu APBN.

"Saya kira pendanaan bisa saja. Pak Tumanggor pasti setuju," kata Saleh menunjuk komisaris Wilmar Group, MP Tumanggor yang ikut mendampinginya.

Wilmar Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan investasi mencapai puluhan triliun di Indonesia. Dimana salah satu anak perusahaannya SAG, menjalin KSO dengan Semen Kupang sejak tahun 2009 lalu.

Sebelumnya, Dirut PT Semen Kupang, Abdul Madjid Nampira menyebutkan Pabrik Semen Kupang P III akan memiliki kapasitas produksi 1,5 juta ton per tahun. Saat ini Pabrik Semen Kupang II baru memproduksi 300 ribu ton per tahun.

Rencana pembangunan Pabrik Semen Kupang III yakni menelan dana Rp 2,5 triliun itu akan mempunyai pelabuhan sendiri. Hal ini untuk memudahkan proses distribusi. Pemasarannya akan mencakup Maluku, Papua, NTB, Timor Leste dan Australia. / Karel Stefanus Ratulangi-Albertus Vincintius

Pemda Duduki Rangkaing Tertinggi Buruknya Pelayanan Publik



Dalam pelayanan publik, Pemerintah Daerah masih buruk. Selama periode Januari-Oktober 2014, terbukti aduan masyarakat diduduki pemerintah daerah dengan mencapai 40 persen. Disusul, 30 persen Kepolisian RI, dan 20 persen Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Pemerintah Daerah baik dari kabupaten/ kota berada di 35 Provinsi Jawa Tengah masih buruk, termasuk Pemerintah Provinsi. Sedangkan, sisanya pelayanan publik di instansi BUMD, BUMN, dan instansi lain,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Ahmad Zaed, di Semarang, Sabtu (29/11).

Indikator buruknya pelayanan publik yang terlalu lama terkait perizinan. Selain itu, komposisi SDM tidak berkompeten dalam bidang. Dengan begitu, masyarakat merasa dirugikan terkait proses perizinan bertele-tela.

“Petugas di pelayanan perizinan tidak berkompeten dan selalu terjadi lempar-lemparan,” ujar dia.

Lebih lanjut, pengaduan pelayanan publik di Kepolisian terkait proses penyidikan yang lambat dan tidak jelas.

Selama hampir setahun jumlah aduan masyarakat yang diterima tersebut, pihaknya telah menyelesaikan separuh lebih. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian aduan dengan melakukan investigasi, klarifikasi dan rekomendasi ke lembaga yang berwenang.

“Sekitar 40 persen telah kita selesaikan aduan masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan publik. Sesuai hasil yang kita rekomendasikan akan diselesaikan ke masing-masing lembaga.” / Karel Stefanus Ratulangi- Muhammad Dasuki

Harga Cabai di Kupang Naik Lebih dari 100 Persen

Pasca pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM, harga cabai merah dan cabai keriting di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kenaikan sangat signifikan.

Pantauan di Pasar Kasih Naikoten, Kota Kupang, Jumat (21/11), harga cabai merah keriting dari sebelumnya Rp25.000 naik menjadi Rp59.000 per kg. Sedangkan cabai biasa dari Rp25.000 per kg naik menjadi Rp36.000 per kg.

“Harga cabai keriting mengalami kenaikan sekitar Rp 34.000 per kg, sedangkan cabai biasa Rp 11.000,” kata Ina, salah seorang pedagang.

Menurut dia, naiknya harga cabai dipengaruhi oleh terbatasnya persediaan di tangan pedagang, karena selama ini hanya mengandalkan produksi cabai dari luar Kota Kupang, seperti dari daratan Flores Selain itu, mahal biaya transportasi juga menjadi pemicu. / Karel Stefanus Ratulangi- Muhammad Dasuki



Indonesia menjadi habitat tuna terbesar di dunia berdasarkan data rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol, yang menghasilkan lebih dari 1,1 juta ton per tahun dengan nilai perdagangan yang disumbangkan sekitar Rp40 triliun. Keuntungan itu lantaran kondisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera yakni Pasifik dan Hindia.

Berdasarkan data FAO melalui State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2014, sekitar 6,8 juta metrik ton berbagai jenis tuna ditangkap di seluruh dunia. Dari jumlah itu, sekitar 4,5 juta ton berasal dari produksi utama tuna seperti albacore, bigeye, bluefin, skipjack, dan yellowfin.

“Pada tahun yang sama, secara global Indonesia berhasil memasok lebih dari 16 persen total produksi tuna. Permintaan pasar dan harga yang tinggi membuat produksi tuna kian menjadi primadona di tingkat global,” kata Menteri Kelautan

Industri Ikan Tuna Indonesia Sumbang Devisa Rp40 Triliun

dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat membuka Bali Tuna Conference, di Kuta, Bali, Kamis (20/11).

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi ke depan adalah eksploitasi terhadap ikan tuna akan berdampak buruk bagi kelangsungan sumberdaya dan habitat tuna.

Hal itu akan berdampak pada menurunnya produktivitas, ukuran tuna yang dihasilkan cenderung mengecil dan daerah tangkapan ikan yang semakin jauh ke laut lepas.

“Imbasnya tentu akan mengancam keberlangsungan mata pencarian nelayan dan juga bisnis tuna. Maka diperlukan *sustainable fisheries development* agar habitat tuna tidak rusak,” kata Susi.

Beberapa langkah yang telah diambil diantaranya melalui pencabutan izin kapal yang beroperasi dan terindikasi melakukan kegiatan IUU Fishing. Selain itu, dikeluarkan moratorium izin penangkapan ikan baru agar dapat memberi kesempatan kepada anak-anak ikan dan juvenil berbagai jenis sumber daya ikan, termasuk untuk tumbuh dan berkembang biak. / Karel Stefanus Ratulangi- Bobby Andalan

Politik Identitas Kartini dan Rusa

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

Suatu masa dalam era Presiden Soeharto, sosok Kartini pernah diabadikan dalam mata uang Republik Indonesia 1985, untuk nominasi nilai Rupiah terbesar Rp10.000. Yang menarik penominasian nilai terbesar hingga terendah uang kertas Rupiah semasa itu adalah tidak sepenuhnya bergambarkan para tokoh pahlawan nasional prakemerdekaan.

Setelah nominal tertinggi warna ungu bergambar Kartini, 1986 diedarkan pula nominal Rp5.000 warna coklat muda bergambarkan Teuku Umar. Juga tahun 1987 beredar satuan nominal Rp1.000 warna biru yang bergambar Sisingamangaraja XI.

Namun gambar untuk urutan nominal yang lebih kecil, Rp500 yang berwarna hijau, dan Rp100 yang berwarna merah muda, tak lagi sosok pahlawan. Untuk yang Rp500 bergambar kekayaan sumber daya alami khas Nusantara berupa fauna, yaitu rusa, sesuai emisi 1988. Dan nominal Rp100 gambar burung dara mahkota emisi tahun 1984, yang kemudian digantikan dengan gambar kapal Phinisi pada 1992.

Lantas apa? Ternyata seri nominal Rupiah tahun 1980an itu, memicu bisik-bisik spekulatif atas alam bawah sadar yang mendominasi pola pikir rejim Jenderal Soeharto. Ditengarai seolah ada rekayasa rejim yang sengaja men-stereotip-kan identitas sosio kultural menjadi politik kelas.

Spekulasi yang menyebut seolah lapis elite teratas di Republik semasa itu, merupakan privelese hanya bagi Suku Jawa yang Muslim, sepanjang dia Abangan atau Priyayi, asal bukan Santri. Ini terwakili dari simbolisasi sosok Kartini. Simbolisasi ini seakan menegaskan posisi puncak lapis elite ini, tidak bisa tidak, harus tetap figur Soeharto. Lalu untuk lapis elite kedua di bawahnya merupakan hak penuh bagi Muslim non-Jawa, seperti tersimbolkan pada sosok pahlawan Aceh, Teuku Umar. Lapis elite ketiga, yang disimbolkan pada pahlawan Batak, Sisingamangaraja, jelas menyiratkan posisi ini ditempati oleh Non-Muslim yang Non-Jawa.

Lantas bagaimana dengan posisi berikut di bawahnya? Apakah mereka dianggap sebagai mirip Rusa yang meski masih banyak ditemukan, tapi karena bernasib langka hingga perlu dilestarikan dalam cagar

budaya bangsa? Atau diperlakukan bak burung dara mahkota hewan cantik piaraan, maupun warisan budaya bak kapal Phinisi dari Sulawesi?

Identitas sebagaimana dijelaskan Stuart Hall dalam *The Question of Cultural Identity*, 1994, merupakan sesuatu yang secara aktual terbentuk melalui proses tidak sadar yang melampaui waktu. Bukan kondisi yang terberi begitu saja dalam kesadaran sejak lahir. Sehingga dalam identitas itu, terdapat sesuatu yang bersifat "imajiner" atau difantasi atas keutuhan identitas yang diidamkan. Alhasil tiap identitas niscaya menysikan ketidaklengkapan. Selalu "dalam proses" atau "sedang dibentuk".

Politik identitas sendiri adalah tindakan politis mengedepankan kepentingan-kepentingan anggota suatu kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasis ras, etnis, jender, atau keagamaan. Sehingga politik identitas juga berarti sebagai rumusan lain dari politik perbedaan.

Cressida Heyes dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2007, merumuskan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam arti luas, sekaligus teorisasi atas trauma pengalaman ketidakadilan dari anggota kelompok sosial tertentu di lingkup kehidupan bersama antar kelompok. Karuan politik identitas juga berarti upaya pembebasan diri kelompoknya dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi mereka dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Akan tetapi penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, niscaya kian mempertajam perbedaan dan memicu pertikaian. Ini terlihat dalam kasus perseteruan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ).

Di lain pihak, politik identitas juga seakan meneguhkan adanya kebutuhan yang bersifat esensialistik atas keberadaan kelompok sosial tertentu sesuai identifikasi primordialitas. Terbukti dalam perkembangan berikut, politik identitas justru acap dibajak dan ditunggangi kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan mereka. Nominalisasi Rupiah Kartini hingga Rusa mungkin bisa menjadi rujukan untuk itu. ■



Memperkuat Daya Saing Industri Dengan Gas Bumi

"Berkat biaya energy yang lebih murah, sektor industri yang telah menggunakan gas PGN menjadi semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan para kompetitor baik dipasar domestik maupun ekspor."



Mulai tahun 2015 Indonesia akan memasuki babak baru dalam konteks persaingan usaha dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Pelaksanaan AEC secara otomatis akan mendorong perdagangan menjadi semakin terbuka. Lalu lintas barang dan jasa dari berbagai negara ASEAN berpotensi untuk membanjiri pasar Indonesia.

Sebagai negara terbesar dengan 237 juta penduduk plus perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia pasti akan menjadi target pasar bagi produk-produk para pelaku usaha dari berbagai negara di kawasan ini. Untuk menghadapi AEC, penguatan daya saing akan menjadi salah satu kunci sukses sektor usaha di Indonesia dalam berkompetisi dengan kompetitornya dari ASEAN.

Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan pemerintah dan para pengusaha nasional untuk memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri. Diantaranya dengan menggunakan energi yang lebih efisien dan sumbernya tersedia sangat besar di Indonesia yaitu gas bumi.

Dengan harga gas bumi yang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) industri, para pengusaha mampu menekan beban biaya, sehingga harga produknya ketika sampai di pasar masih sangat kompetitif.

Hingga saat ini ribuan perusahaan dari berbagai industri telah memanfaatkan gas bumi dengan menjadi pelanggan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Sektor industri yang telah melakukan konversi ke gas bumi seperti industri

kimia, keramik, makanan, tekstil, semen dan listrik. Gas bumi PGN ini mengalir melalui jaringan pipa yang dibangun secara mandiri oleh PGN di berbagai wilayah seperti Medan, Batam, Bekasi, Kerawang, Surabaya, Gresik hingga Malang di Jawa Timur.

Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan, dengan menggunakan gas bumi para pelanggan PGN mampu melakukan penghematan biaya energy yang sangat besar. Sebagai contoh pada tahun 2013 PGN menyalurkan gas bumi ke sektor industri, UKM dan rumah tangga sebanyak 827 MMSCFD atau setara dengan 145 ribu barel minyak per hari. Maka dalam setahun nilai penghematan yang bisa dilakukan dengan memakai gas bumi mencapai Rp 55 triliun.

Berkat biaya energi yang lebih murah, sektor industri yang telah menggunakan gas PGN menjadi semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan para kompetitor baik dipasar domestik maupun ekspor.

"Sebagai BUMN yang telah membangun infrastruktur dan menyalurkan gas bumi, PGN memiliki komitmen untuk memperbesar pemanfaatan gas bumi ini, sehingga akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional," jelas Irwan.

Irwan menambahkan, pemanfaatan gas bumi juga terbukti mampu mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak. Misalnya penggunaan gas bumi bagi pembangkit listrik berbasis gas milik PLN. Itu sebabnya, PGN kini terus berusaha mempercepat proyek pipanisasi gas dari lapangan gas Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah. "Dengan menggunakan gas bumi, PLTGU Tambak Lorok akan mampu menghemat biaya energy hingga Rp 2 triliun per tahun dan mengurangi subsidi pemerintah," tandas Irwan.

Saat ini PGN telah membangun lebih dari 6000 kilometer jaringan gas bumi diberbagai wilayah di Indonesia. PGN juga menyalurkan gas bumi kepada sektor transportasi, UKM dan rumah tangga dengan tingkat efisiensi dan keamanan yang teruji dan terbukti.

MAJALAH DIGITAL
AKTUAL



Klik www.aktual.co untuk pemesanan majalah Aktual versi digital

m.aktual.co
www.aktual.co

<http://www.facebook.com/aktualco> 
<http://www.twitter.com/Aktualco> 